

**MODEL KOMUNIKASI PEMBANGUNAN
DALAM PENYEDIAAN PRASARANA PERDESAAN
DI KAWASAN PESISIR UTARA JAWA TENGAH
(Studi Kasus Desa Morodemak dan Purwosari Kabupaten Demak)**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota**

Oleh:

**AMIR MAHMUD
L4D005046**



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER TEHNIK PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2007**

**MODEL KOMUNIKASI PEMBANGUNAN
DALAM PENYEDIAAN PRASARANA PERDESAAN
DI KAWASAN PESISIR UTARA JAWA TENGAH
(Studi Kasus Desa Morodemak dan Purwosari Kabupaten Demak)**

**Tesis diajukan kepada
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro**

Oleh:

**AMIR MAHMUD
L4D005046**

**Diajukan pada Sidang Ujian Tesis
Tanggal 27 Maret 2007**

**Dinyatakan Lulus
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik**

Semarang, 27 Maret 2007

Pembimbing Pendamping

Pembimbing Utama

Mussadun, ST, MSi

Dr. rer. nat. Ir. Imam Buchori

**Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro**

Prof. Dr. Ir. Sugiono Soetomo, DEA

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dalam tesis saya ternyata ditemui duplikasi, jiplakan (plagiat) dari tesis orang lain/institusi lain maka saya bersedia menerima sanksi untuk dibatalkan kelulusan saya dan saya bersedia melepaskan gelar Magister Teknik dengan penuh rasa tanggung jawab.

Semarang, 27 Maret 2007

AMIR MAHMUD
NIM L4D005046

*Allah pasti mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian
dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat
(Q.S. Al-Mujadalah: 11)*

Tesis ini kupersembahkan untuk:

- *Ibuku tercinta, Hj. Masmidah;*
- *Istriku terkasih, Idarotus Sa'adah;*
- *Anak-anakku tersayang, Dzaky Zakiyah Fawwaz dan Tuhfatul Husna Attaqiyah.*

Abstrak

Penyediaan prasarana salah satu solusi terpenting dalam pembangunan dan pengembangan wilayah perdesaan. Pada kenyataannya kemampuan pemerintah dalam menyediakan prasarana perdesaan terbatas, sedang partisipasi masyarakat tidak selalu muncul dengan sendirinya sehingga perlu terus-menerus didorong melalui suatu kegiatan komunikasi pembangunan.

Di kawasan Pesisir Utara Jawa Tengah terdapat suatu fenomena, perhatian masyarakat terhadap sarana-prasarana keagamaan melebihi prasarana perdesaan non-keagamaan, sehingga dipandang perlu mengadopsi model komunikasi penyediaan sarana prasarana keagamaan (model kontrol) sebagai basis pengembangan model komunikasi penyediaan prasarana perdesaan non keagamaan (model eksperimen)

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbang pemikiran tentang konsep pengembangan model komunikasi penyediaan prasarana perdesaan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Pesisir Utara Jawa Tengah, sehingga dapat memberi alternatif pemecahan bagi persoalan partisipasi yang sangat terkait dengan kegiatan komunikasi pembangunan.

Mengingat luasnya wilayah penelitian, maka penelitian dilakukan dengan studi kasus melalui pendekatan kuantitatif berdasar pemikiran positivistik, serta menggunakan metode penelitian pengembangan dan survey, dengan instrumen penelitian berupa kuesioner. Stakeholders pembangunan di tingkat desa dijadikan sebagai sampel penelitian, di mana pengambilannya memadukan teknik purposive, proportional dan disproportionate stratified random sampling.

Sesuai kajian teori disusun model hipotetik dengan komponen utama forum komunikasi dan teknik komunikasi. Komponen forum komunikasi mencerminkan tahapan kegiatan komunikasi sejak perencanaan, pengorganisasian, penggerakan hingga pengawasan pembangunan, juga memuat prinsip-prinsip forum berupa keikutsertaan warga, keterbukaan forum, rutinitas kegiatan dan kohesivitas forum. Sedang komponen teknik komunikasi meliputi teknik komunikasi dua tahap, persuasif, dialogis dan deliberatif.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa model hipotetik dapat diterapkan pada kedua model, serta model kontrol terbukti berbeda secara signifikan dengan model eksperimen, sehingga dapat diadopsi sebagai pengembangan model eksperimen.

Sesuai hasil analisis IPA (Importance-Performance Analysis), terlihat bahwa akses stakeholders dalam setiap tahapan kegiatan forum komunikasi rendah, ditandai dengan rendahnya tingkat keikutsertaan warga, keterbukaan forum, rutinitas kegiatan dan kohesivitas forum. Begitu pula tingkat penerapan teknik komunikasi dua tahap, persuasif, dialogis dan deliberatif yang sebenarnya sesuai dengan kondisi perdesaan juga rendah, sehingga komponen-komponen tersebut masih menjadi prioritas utama pengembangan model. Sehingga direkomendasikan: 1) perlu penerapan pola komunikasi yang memberi peluang keikutsertaan publik; 2) forum lokal terutama lembaga keagamaan dapat dijadikan sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi prasarana perdesaan karena terbukti lebih fleksibel terhadap prinsip keikutsertaan, keterbukaan, rutinitas dan kohesivitas; 3) kegiatan komunikasi hendaknya memperhatikan peran tokoh informal sebagai mediator dan komunikator di tingkat lokal, penggunaan pesan yang memperjelas manfaat, akibat, dan dalil penguat, mengedepankan feedback dan prinsip permusyawaratan; 4) penyerahan proyek-proyek pemerintah skala desa kepada masyarakat.

Kata kunci: model komunikasi, forum komunikasi, teknik komunikasi, prasarana perdesaan non keagamaan, sarana prasarana keagamaan.

Abstract

Providing of infrastructure is one of the most important solutions in developing and expanding rural region. In fact, the government ability in providing rural infrastructure is limited, while society participation not always emerges by itself so that need motivated continuously through an activity of development communication.

In North Coastal area of Central Java there is a phenomenon, the attention of society to religious facilities-infrastructures exceed countryside's non-religious infrastructures, so that considered necessary to adopt communication model of providing religious facilities-infrastructure (control model) as development base of communication model of providing non-religious facilities-infrastructure (experiment model).

This research expected can give to contribute ideas to the concept of the development of providing countryside infrastructure communication model according to the characteristic of the society in North Coastal area of Central Java, so that can give alternative resolving to participation problems which very related to development communications activity.

Considering widely scope of this research, hence it was conducted with case study through quantitative approach based on positivistic consideration, and also used research development and survey methods, with research instrument, questionnaire. The stakeholders of the development in rural area are being as the research sample, where its sample taken by fusing all purposive technique, proportional and disproportionate stratified random sampling.

According to theory, it compiled hypothetic model with main component of communications forum and communications technique. Components of communications forum reflect steps of communications activity from planning, organizing, powering till supervising development, also load principles of forum such as citizen participation, openness of forum, routines activities and cohesively forum. While components of communications technique are include two-steps, persuasive, dialogic and deliberative communication techniques.

The result shows that hypothetic model can be applied on both models, and also the control model proved significantly different with the experiment model.

Following to the result of Importance-Performance Analysis (IPA), seems that stakeholders' access is low in each step activity of communications forum, marked by slightly citizen participation level, openness forum, routine activities dan cohesively forum. As well as the level applying of two-steps, persuasive, dialogic and deliberative communication techniques which in fact as according to condition of countryside also in low level, so that those components still become the main priority of model development. So that it recommended: 1) need applying communications pattern that giving opportunity for public participation; 2) local forum particularly religious institution can be made as communications media and spreading information of rural infrastructure due to proven more flexible to participation, openness, routine and cohesively principles; 3) communications shall pay attention the role of informal figure as mediator and communicator at local level, usage of message which clarifying benefits, effect, and supporting theory, placing forward parley principle and feedback; 4) Taking over government projects in rural scale to the community.

Keywords: communications model, communications forum, communications technique, non-religious rural infrastructure, religious facilities and infrastructure.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbi 'alamin. Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas karuniaNya penulisan tesis dengan judul *Model Komunikasi Pembangunan dalam Penyediaan Prasarana Perdesaan di Kawasan Pesisir Utara Jawa Tengah* ini dapat terselesaikan. Tesis ini merupakan laporan hasil penelitian yang dilakukan dengan kajian secara akademik dalam rangka memenuhi persyaratan Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari, bahwa tesis ini dapat tersusun berkat dukungan dan bantuan berbagai pihak, terutama Bapak Dr. rer. nat. Ir. Imam Buchori (Pembimbing Utama) dan Bapak Mussadun, ST, Msi (Pembimbing Pendamping) yang telah berkenan memberi arahan, bimbingan, masukan, dan petunjuk metodologis dalam pembuatan tesis ini. Karena itu, ungkapan terima kasih yang setulus-tulusnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada beliau berdua.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Ir. Dedy S. Priatna, MSc (Kepala Pusbindiklatren Bappenas), Bapak Prof. Dr. Sugiono Soetomo, DEA (Ketua Program), Bapak Drs. H. Tafta Zani, MM (Bupati Demak) yang telah berkenan memberi izin dan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti program pendidikan di MTPWK Universitas Diponegoro Semarang; Bapak Bambang Setioko, M.Eng (Penguji 1) dan Bapak Samsul Ma'rif, SP, MT (Penguji 2) yang telah berkenan memberi masukan perbaikan bagi penyusunan tesis ini; Segenap dosen MTPWK yang telah memberikan materi perkuliahan sehingga penulis memperoleh wawasan keilmuan yang sangat menunjang penulisan tesis ini; Segenap staf MTPWK yang seringkali penulis repotkan dengan urusan-urusan administrasi perkuliahan; Dita, Mbak Wahyu, Mbak Endang, Mas Jhoni, Pak Aflah dan teman-teman mahasiswa Bappenas Angkatan 28 yang senantiasa menjalin kebersamaan dan saling memberi semangat; serta anak istri dan segenap keluarga yang dorongan dan doa mereka senantiasa menyertai kelancaran studi ini. Hanya anugerah dan karunia Allah SWT yang penulis mohonkan atas kebaikan mereka.

Akhirnya, meskipun penulisan dilakukan dengan segala kemampuan, tetapi disadari sepenuhnya tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, sumbang saran dan masukan perbaikan sangat penulis nantikan. Penulis berharap, semoga dari karya yang sederhana ini, banyak memberi manfaat.

Semarang, Maret 2007

Penulis,

Amir Mahmud

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	4
1.3 Model Hipotetik.....	9
1.4 Tujuan dan Sasaran Penelitian.....	10
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	10
1.4.2 Sasaran Penelitian.....	10
1.5 Kegunaan Penelitian.....	11
1.6 Ruang Lingkup Materi dan Wilayah Penelitian.....	11
1.6.1 Ruang Lingkup Materi.....	11
1.6.2 Ruang Lingkup Wilayah.....	13
1.7 Kerangka Pemikiran.....	17
1.8 Metodologi Penelitian.....	20
1.8.1 Pendekatan Penelitian.....	20
1.8.2 Metode Penelitian.....	21
1.8.3 Teknik Sampling.....	21
1.8.4 Kebutuhan Data.....	23
1.8.5 Teknik Pengolahan Data.....	25
1.8.6 Teknik Analisis.....	26
1.9 Sistematika Pembahasan.....	31
 BAB II MODEL KOMUNIKASI PEMBANGUNAN DALAM PENYEDIAAN PRASARANA PERDESAAN DI KAWASAN PESISIR	 33
2.1 Konsep Pembangunan Kawasan Pesisir.....	33
2.1.1 Definisi Kawasan Pesisir.....	33
2.1.2 Permukiman Kawasan Pesisir.....	34
2.1.3 Kebutuhan Prasarana Perdesaan.....	34
2.2 Model Komunikasi Pembangunan.....	36
2.2.1 Pengertian Model Komunikasi.....	36
2.2.2 Hubungan Komunikasi dan Pembangunan.....	36

2.2.3	Pengertian Komunikasi Pembangunan.....	37
2.3	Unsur dan Proses Komunikasi Pembangunan.....	38
2.3.1	Unsur Komunikasi Pembangunan.....	38
2.3.2	Proses Komunikasi Pembangunan	39
2.3.3	Stakeholders dan Agen Perubahan.....	40
2.4	Pengembangan Model Komunikasi Pembangunan.....	41
2.4.1	Pendekatan Manajemen Sumber Daya Lokal.....	41
2.4.2	Pola Komunikasi dan Forum Komunikasi.....	41
2.4.2.1	Pola Komunikasi Pembangunan.....	41
2.4.2.1	Forum Komunikasi.....	43
2.4.3	Teknik Komunikasi.....	46
2.4.3.1	Efektivitas Penyuluhan.....	46
2.4.3.2	Model Komunikasi Dua Tahap.....	47
2.4.3.3	Model Komunikasi Persuasif.....	50
2.4.3.4	Model Komunikasi Dua Arah.....	51
2.4.3.5	Model Komunikasi Deliberatif.....	52
2.4.4	Perhatian dan Partisipasi Masyarakat.....	53
2.5	Sintesis Kajian Teori.....	54
BAB III	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	58
3.1	Kondisi Geografis.....	58
3.1.1	Posisi Geografis.....	58
3.1.2	Tata Guna Lahan.....	60
3.2	Kondisi Demografis.....	61
3.2.1	Kepadatan Penduduk.....	61
3.2.2	Mata Pencarian.....	63
3.2.3	Tingkat Pendidikan.....	67
3.2.4	Pemeluk Agama.....	68
3.3	Kondisi Sarana Prasarana.....	69
3.3.1	Prasarana Perdesaan.....	69
3.3.2	Sarana Prasarana Keagamaan.....	73
3.3.2.1	Fasilitas Ibadah.....	74
3.3.2.2	Fasilitas Pendidikan Agama.....	76
BAB IV	MODEL KOMUNIKASI PEMBANGUNAN DALAM PENYEDIAAN PRASARANA PERDESAAN DI KAWASAN PESISIR UTARA JAWA TENGAH	77
4.1	Identifikasi Karakteristik Masyarakat, Peran Agen Perubahan, Efektivitas Penyuluhan dan Perhatian Masyarakat	77
4.1.1	Karakteristik Masyarakat Pelaku Komunikasi	78
4.1.2	Identifikasi Peran Agen Perubahan	90
4.1.3	Identifikasi Efektivitas Penyuluhan	95
4.1.4	Identifikasi Perhatian Masyarakat	102
4.2	Perbedaan Pola Komunikasi Sarana Prasarana Keagamaan dan Prasarana Perdesaan Non Keagamaan ..	106

4.2.1	Analisis Pola Komunikasi Penyediaan Prasarana Perdesaan Non Keagamaan	107
4.2.2	Analisis Pola Komunikasi Penyediaan Sarana Prasarana Keagamaan	115
4.2.3	Sintesis Pola Komunikasi Penyediaan Prasarana Perdesaan.....	118
4.3	Model Komunikasi.....	125
4.3.1	Model Forum Komunikasi	125
4.3.1.1	Analisis Diskriptif Model Forum Komunikasi	125
4.3.1.2	Analisis Ujiterap Model Forum Komunikasi	136
4.2.2	Analisis Model Teknik Komunikasi.....	143
4.4	Validasi Model Komunikasi Penyediaan Prasarana Perdesaan Non Keagamaan	147
BAB V	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	158
5.1	Kesimpulan	158
5.2	Rekomendasi	160
5.3	Studi Lanjut	163

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Jumlah Penduduk Miskin di Kawasan Pesisir Kabupaten Demak Tahun 2005	3
Tabel I.2	Jumlah Prasarana Keagamaan di Kawasan Pesisir Kabupaten Demak Tahun 2005	4
Tabel I.3	Instrumen Pengumpulan Data	23
Tabel I.4	Kode dan Tabulasi Data Mentah	26
Tabel II.1	Sintesis Kajian Teori	54
Tabel III.1	Daftar Pabrik Industri di Desa Purwosari Tahun 2005.....	61
Tabel III.2	Mata Pencaharian Penduduk Tahun 2004.....	64
Tabel III.3	Jumlah Penduduk Menurut Agama Tahun 2004.....	68
Tabel III.4	Proyek Prasarana Perdesaan di Desa Morodemak Tahun 1999-2006	69
Tabel III.5	Proyek Prasarana Perdesaan di Desa Purwosari Tahun 1999-2006	71
Tabel III.6	Jumlah Fasilitas Ibadah Tahun 2004	74
Tabel III.7	Jumlah Fasilitas Pendidikan Agama Tahun 2004	76
Tabel IV.1	Mobilitas Pelaku Komunikasi	84
Tabel IV.2	Daftar Penyuluh dan Forum Komunikasi	93
Tabel IV.3	Jenis-jenis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Sarana Prasarana Keagamaan	106
Tabel IV.4	Peraturan yang Mendasari Komunikasi Penyediaan Prasarana Perdesaan	108
Tabel IV.5	Muatan Informasi Standar Kegiatan Komunikasi Penyediaan Prasarana Perdesaan	109
Tabel IV.6	Arah Pengembangan Pola Komunikasi Penyediaan Prasarana Perdesaan.....	119
Tabel IV.7	Hasil Ujiterap Model Hipotetik Forum Komunikasi	137
Tabel IV.8	Hasil Ujiterap Model Hipotetik Teknik Komunikasi	144
Tabel IV.9	Hasil Perhitungan Analisis IPA	153

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Model Hipotetik Penelitian	9
Gambar 1.2	Peta Jawa Tengah I	14
Gambar 1.3	Peta Jawa Tengah II	15
Gambar 1.4	Peta Kabupaten Demak	16
Gambar 1.5	Kerangka Pemikiran	19
Gambar 1.6	Kerangka Analisis Pengembangan Model	28
Gambar 2.1	Hubungan Komunikasi dan Pembangunan	37
Gambar 2.2	Elemen dan Proses Komunikasi	39
Gambar 2.3	Model Wetley dan MacLean	49
Gambar 3.1	Jalur Penyeberangan Warga Morodemak	59
Gambar 3.2	Tata Guna Lahan Tahun 2004	60
Gambar 3.3	Jumlah Penduduk Tahun 2004	62
Gambar 3.4	Komposisi Usia Kerja Tahun 2004	63
Gambar 3.5	Pasar Ikan dan Kawasan Industri Menandai Desa Purwosari sebagai Desa Kota	66
Gambar 3.6	Tingkat Pendidikan Penduduk	67
Gambar 3.7	Kondisi Prasarana Jalan di Desa Morodemak	70
Gambar 3.8	Kondisi Prasarana Jalan dan Irigasi di Desa Purwosari	72
Gambar 3.9	Pembangunan Prasarana oleh Masyarakat di Desa Purwosari	73
Gambar 3.10	Fasilitas Ibadah di Desa Morodemak dan Purwosari	75
Gambar 4.1	Pendidikan Formal Pelaku Komunikasi	80
Gambar 4.2	Pendidikan Informal Pelaku Komunikasi	82
Gambar 4.3	Kepemilikan Media Massa	85
Gambar 4.4	Muatan Media Massa yang Disukai	86
Gambar 4.5	Terpaan Informasi Pembangunan Perdesaan	87
Gambar 4.6	Aktivitas Keorganisasian	89
Gambar 4.7	Pendapatan Rata-rata Pelaku Komunikasi	90
Gambar 4.8	Peran Agen Perubahan dalam Komunikasi Pembangunan	91
Gambar 4.9	Penerapan Teknik Komunikasi	96
Gambar 4.10	Bentuk Perhatian/Partisipasi Masyarakat terhadap Prasarana Perdesaan	103
Gambar 4.11	Bentuk Perhatian/Partisipasi Masyarakat terhadap Prasarana Keagamaan	105
Gambar 4.12	Pola Komunikasi Penyediaan Prasarana Perdesaan	112
Gambar 4.13	Pola Komunikasi Penyediaan Prasarana Keagamaan	117
Gambar 4.14	Pola Komunikasi Penyediaan Prasarana Perdesaan yang Bertumpu pada Sumber Daya Lokal	122
Gambar 4.15	Keikutsertaan Warga dalam Forum Komunikasi Penyediaan Prasarana Perdesaan	126

Gambar 4.16	Keterbukaan Forum Komunikasi Penyediaan Prasarana Perdesaan	128
Gambar 4.17	Rutinitas Kegiatan Forum Komunikasi Penyediaan Prasarana Perdesaan	130
Gambar 4.18	Kohesivitas Forum Komunikasi Penyediaan Prasarana Perdesaan	131
Gambar 4.19	Keikutsertaan Warga dalam Forum Komunikasi Penyediaan Prasarana Keagamaan	132
Gambar 4.20	Keterbukaan Forum Komunikasi Penyediaan Prasarana Keagamaan	133
Gambar 4.21	Rutinitas Kegiatan Forum Komunikasi Penyediaan Prasarana Keagamaan	134
Gambar 4.22	Kohesivitas Forum Komunikasi Penyediaan Prasarana Keagamaan	135
Gambar 4.23	Diagram Kartesius Prioritas Model	151
Gambar 4.24	Model Komunikasi Penyediaan Prasarana Perdesaan Non Keagamaan di Desa Morodemak	155
Gambar 4.25	Model Komunikasi Penyediaan Prasarana Perdesaan Non Keagamaan di Desa Morodemak	156

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A	Daftar Sampel Penelitian.....	169
Lampiran B	Kuesioner.....	173
Lampiran C	Rekapitulasi Jawaban Responden.....	180
Lampiran D	Skor Jawaban Responden.....	189
Riwayat Hidup	Penulis.....	199

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan prasarana atau infrastruktur merupakan bagian terpenting dalam upaya pembangunan dan pengembangan wilayah, utamanya wilayah perdesaan. Tersedianya prasarana yang memadai dapat meningkatkan perkembangan kegiatan sosial ekonomi (Jayadinata, 1999:31), sehingga akan lebih mendorong kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, dengan kondisi sosial ekonomi yang baik, masyarakat akan lebih memiliki kemampuan untuk terlibat dalam penyediaan prasarana di lingkungannya.

Infrastruktur adalah aset fisik yang juga sangat penting dalam memberikan pelayanan publik. Infrastruktur yang kurang atau bahkan tidak berfungsi akan menimbulkan dampak yang sangat besar bagi masyarakat (Kodoatie, 2005:9), yaitu terganggunya aktivitas sosial ekonomi masyarakat yang pada akhirnya akan memperlambat pertumbuhan wilayah dan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana kawasan pesisir pada umumnya, pembangunan di kawasan Pesisir Utara Jawa Tengah masih menghadapi beberapa masalah di antaranya: sebagian besar merupakan daerah terisolir; sarana pelayanan dasar termasuk prasarana fisik masih terbatas; kondisi lingkungan kurang terpelihara sehingga kurang memenuhi persyaratan kesehatan; air bersih dan sanitasi jauh dari

mencukupi, keadaan perumahan umumnya masih jauh dari layak huni; dan pendapatan penduduk masih sangat rendah (Dahuri,2004:299).

Penyediaan prasarana yang memadai jelas menjadi salah satu solusi yang sangat urgen dalam penanggulangan masalah-masalah kawasan pesisir di atas. Tetapi langkah penanggulangan tersebut dihadapkan pada suatu kenyataan, bahwa kemampuan pemerintah dalam penyediaan prasarana perdesaan sangat terbatas, sedang perhatian masyarakat terhadap penyediaan prasarana juga tidak selalu muncul dengan sendirinya.

Di banyak hal pemerintah harus terus-menerus mendorong, menggerakkan, bahkan terkadang diperlukan suatu kebijaksanaan melalui peraturan-peraturan yang mengharuskan masyarakat terlibat dalam proses pembangunan. Program, ide atau inovasi pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah tidak selalu mendapat dukungan atau berimbas pada terserapnya partisipasi masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari kondisi, karakteristik, serta latar belakang masyarakat yang bersangkutan. Sehingga kebutuhan akan format komunikasi pembangunan yang tepat menjadi sangat relevan. Perlu diterapkan model komunikasi pembangunan yang berbeda, jika memang kondisi, karakteristik dan latar belakang masyarakatnya berbeda.

Kemiskinan memang menjadi persoalan tersendiri bagi masyarakat pesisir untuk turut ambil bagian dalam penyediaan prasarana perdesaan seperti prasarana jalan, drainase, prasarana persampahan, prasarana sanitasi/MCK, prasarana air bersih, dan sebagainya. Umumnya penyediaan prasarana-prasarana tersebut masih sangat bergantung pada program-program pemerintah. Tetapi, di balik

keterbatasan penyediaan prasarana tersebut dan kerentanan masyarakat secara ekonomis, terdapat suatu fenomena yang sangat unik di kawasan Pesisir Utara Jawa Tengah, yaitu kesadaran masyarakat dalam membangun sarana prasarana keagamaan relatif tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh banyaknya sarana prasarana keagamaan yang dibangun dengan partisipasi dan swadaya penuh dari masyarakat.

Sebagai ilustrasi, di kawasan Pesisir Kabupaten Demak jumlah penduduk miskin pada tahun 2005 mencapai 121.499 jiwa (37,49%). Angka tersebut lebih besar dibanding persentase kemiskinan nasional untuk kondisi hingga Juli 2005, yaitu 18,7% (Kompas, 26-8-2006).

TABEL I.1
JUMLAH PENDUDUK MISKIN
DI KAWASAN PESISIR KABUPATEN DEMAK TAHUN 2005

No.	Kecamatan	Jml. Penduduk (Jiwa)	Jml. Penduduk Miskin (Jiwa)	Persentase (%)
1	Sayung	91.334	35.250	38,59%
2	Karangtengah	56.985	23.178	40,67%
3	Bonang	96.593	43.816	45,36%
4	Wedung	79.147	19.255	24,33%
	Jumlah/Rata-rata	324.059	121.499	37,49%

Sumber: BPS Kabupaten Demak, 2005

Sementara itu, jumlah bangunan tempat ibadah, pesantren, dan gedung madrasah yang dibangun oleh masyarakat di kawasan ini cukup tinggi, yaitu sebagaimana tabel I.2. Jika standar prasarana peribadatan 1 musholla untuk 50-500 penduduk dan 1 masjid untuk 200-2500 penduduk (Jayadinata, 1999:96), maka jumlah sarana-prasarana ibadah yang ada di kawasan ini sudah melebihi dari standar kebutuhan, karena dengan 209 masjid dan 1.007 musholla cukup untuk 114.950 hingga 2.718.900 penduduk.

TABEL I.2
JUMLAH SARANA PRASARANA KEAGAMAAN
DI KAWASAN PESISIR KABUPATEN DEMAK TAHUN 2005

No	Kecamatan	Masjid	Musholla	Ponpes	MI	MTs	Madin	MA
1.	Sayung	69	341	21	7	7	56	5
2.	Karangtengah	43	208	9	3	3	41	1
3.	Bonang	60	289	25	15	7	102	4
4.	Wedung	37	169	23	15	11	52	6
	Jumlah	209	1007	78	40	28	251	16

Sumber: BPS Kabupaten Demak, 2005

Sebagai suatu proses kegiatan, penyediaan prasarana perdesaan non keagamaan maupun sarana prasarana keagamaan sangat terkait dengan proses komunikasi pembangunan yang dijalankan, baik oleh pemerintah maupun pihak-pihak yang memprakarsai adanya penyediaan sarana prasarana tersebut. Sehingga penelitian yang berhubungan dengan model komunikasi pembangunan dalam penyediaan prasarana perdesaan non keagamaan dan sarana prasarana keagamaan menjadi sangat penting, karena adanya fenomena perbedaan perhatian masyarakat terhadap penyediaan sarana prasarana di atas.

1.2 Perumusan Masalah

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, berikut dirubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan regulasi tentang Pelaksanaan Forum Musrenbang dan Perencanaan Partisipatif sebagaimana diatur dalam surat edaran bersama Kepala Bappenas dan Depdagri Nomor 1354/M.PPN/03/2004-050/744/SJ, tanggal. 24 Maret 2004, dapat menjadi garansi formal bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan secara partisipatif.

Sebagai sebuah model pembangunan yang mendasarkan pada paradigma manajemen sumberdaya lokal, maka penggalian inisiatif, prakarsa dan kreativitas masyarakat lokal, serta proses pembelajaran sosial (*social learning*) melalui jaringan koalisi dan komunikasi antarpelaku dan organisasi lokal merupakan karakteristik yang sangat penting bagi pembangunan secara partisipatif (Tjokrowinoto, 1999:218).

Dengan demikian, komunikasi pembangunan adalah bagian integral dari aktivitas Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, terutama yang berhubungan dengan proses penyediaan barang-barang publik (*public goods*), di antaranya prasarana perdesaan.

Rendahnya perhatian masyarakat terhadap penyediaan prasarana perdesaan non keagamaan di kawasan Pesisir Utara Jawa Tengah menunjukkan belum efektifnya kegiatan komunikasi pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah setempat dalam mendorong partisipasi masyarakat.

Di Kabupaten Demak, terdapat beberapa permasalahan terkait kegiatan komunikasi pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, di antaranya:

- a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang relatif rendah (tabel I.1), berpengaruh terhadap kemampuan dan kesempatan partisipasi masyarakat. Adanya pendapatan masyarakat yang rendah mendorong sebagian besar waktu mereka teralokasikan untuk bekerja agar dapat menutup kebutuhan keluarga; akibatnya kesempatan dan kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam penyediaan prasarana perdesaan di lingkungannya juga cenderung rendah.

- b. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 14 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), pembahasan APBDes dilakukan bersama oleh Lurah dan BPD (pasal 10 ayat 2). Dalam melakukan perencanaan APBDes Lurah Desa dapat mengikutsertakan Lembaga Kemasyarakatan (pasal 3); artinya tidak wajib mengikutsertakan. Selanjutnya dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan disebutkan lembaga kemasyarakatan yang perlu dibentuk, yaitu LKMD, RT/RW. Aturan tersebut hanya memberi ruang partisipasi (*public sphere*) bagi sebagian kecil elite desa dalam proses komunikasi, yaitu sebatas Pemerintah Desa dan tokoh-tokoh dari lembaga-lembaga representasi yang dibentuk oleh pemerintah, yaitu BPD, LKMD dan RT/RW. Kondisi demikian berpotensi mengesampingkan peran agen-agen perubahan (*change agents*) di tingkat lokal, yaitu tokoh-tokoh informal dari lembaga kemasyarakatan non pemerintah (NGO, *Non-Governmental Organizations*) seperti tokoh-tokoh dari organisasi keagamaan, tokoh-tokoh dari organisasi sosial, dan sebagainya yang secara faktual memiliki pengaruh sangat besar terhadap masyarakat di lingkungannya.
- Sebagaimana model komunikasi dua tahap (*two step flow communications*), agen-agen perubahan adalah komunikator lokal/pemuka pendapat (*opinion leaders*) yang sangat berpengaruh dalam mewarnai penerimaan pesan (Mulyana, 2005:105), terutama pada masyarakat tradisional atau perdesaan (Susanto, 1977a:11). Mereka sebenarnya merupakan faktor komunikasi potensial bagi penunjang kegiatan pembangunan yang lebih luas, apabila

mampu didorong menjadi agen-agen perubahan yang inovatif, yang mampu menjadi ujung tombak bagi percepatan pembangunan yang *bottom-up* di desanya (Muhadjir, 2001:vi). Sehingga, kurang optimalnya peran agen perubahan dalam komunikasi penyediaan prasarana perdesaan non keagamaan patut diduga menjadi salah satu penyebab kurangnya perhatian masyarakat dalam penyediaan prasarana perdesaan non keagamaan tersebut.

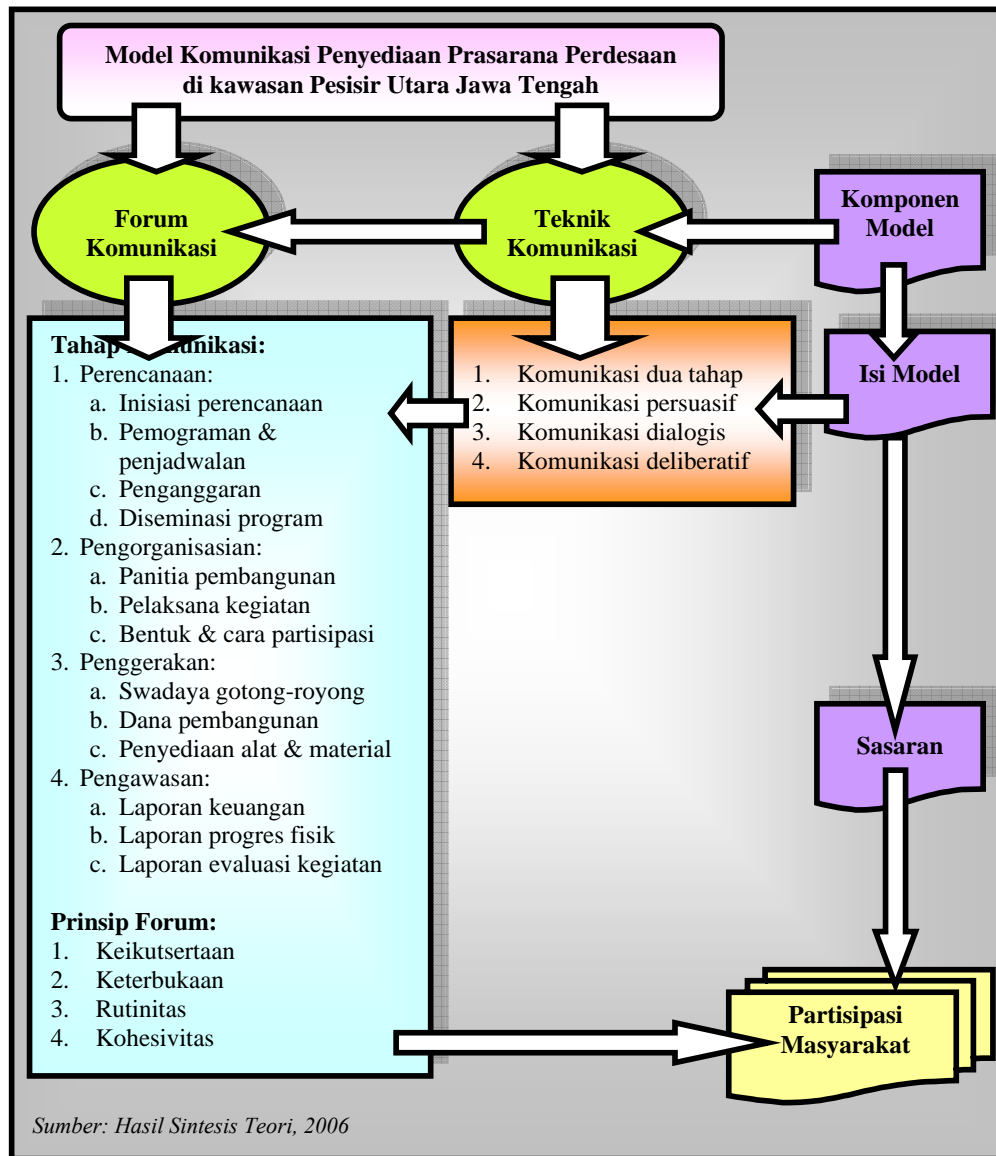
- c. Banyak program pembangunan masuk desa tidak melibatkan masyarakat tetapi dikelola langsung oleh dinas melalui pihak ketiga, sehingga pola komunikasi yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah tidak memberikan akses pembelajaran bagi masyarakat desa untuk menggali inisiatif, kreativitas dan prakarsa lokal dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya. Program-program tersebut bersifat *top-down* sehingga tidak sejalan dengan kebutuhan desa dan masyarakatnya. Akibatnya, pola komunikasi pembangunan sebagaimana tercermin dalam kegiatan-kegiatan forum komunikasi yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak cukup memberi ruang bagi stakeholders untuk berpartisipasi dalam keseluruhan proses komunikasi, sejak pada tahap perencanaan, pengorganisasian, penggerakan/pelaksanaan hingga tahap pengawasan.

Forum-forum Musrenbangdes, Musrenbangdus dan forum-forum konsultasi publik (*public hearing*) yang diharapkan dapat menjadi matarantai perencanaan di tingkat bawah dan menjembatani kesenjangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sulit terselenggara karena kendala biaya (Sumarto, 2004:181). Sebagaimana kita ketahui, bahwa kegiatan-kegiatan

komunikasi pembangunan penyediaan prasarana perdesaan non keagamaan selama ini melekat dan sangat bergantung pada proyek-proyek pemerintah.

- d. Akibat dari rendahnya akses warga terhadap forum-forum komunikasi yang diselenggarakan oleh pemerintah secara simultan juga dapat mempengaruhi efektivitas penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah. Penyuluhan kurang efektif karena tidak memposisikan tokoh-tokoh lokal (agen-agen perubahan) sebagai komunikator bagi masyarakat di lingkungannya. Penerapan teknik komunikasi deliberatif sebagaimana pola-pola diskusi yang dikembangkan dalam forum Musrenbang atau forum-forum penyuluhan yang lain juga tidak cukup efektif, karena efek komunikasi tidak menerpa masyarakat akar rumput (*grass roots*) yang sebenarnya merupakan basis partisipasi. Begitu pula penggunaan teknik komunikasi persuasif dan teknik komunikasi dialogis/dua arah dalam setiap kegiatan penyuluhan tidak cukup efektif, karena peserta terbatas pada lembaga-lembaga representasi.

Melihat kenyataan belum optimalnya komunikasi pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan prasarana perdesaan non keagamaan di satu sisi, dan keberhasilan komunikasi pembangunan yang dijalankan oleh tokoh-tokoh informal dalam mendorong partisipasi penyediaan sarana prasarana keagamaan di sisi yang lain, maka dipandang *perlu mengadopsi model komunikasi pembangunan dalam penyediaan sarana prasarana keagamaan sebagai basis pengembangan model komunikasi pembangunan dalam penyediaan prasarana perdesaan di kawasan Pesisir Utara Jawa Tengah.*



GAMBAR 1.1
MODEL HIPOTETIK PENELITIAN

1.3 Model Hipotetik

Berdasarkan kajian literatur yang ada, disusun suatu model yang bersifat hipotetik (gambar 1.1). Model ini akan diujiterapkan (*treatment*) pada data dan informasi yang diperoleh dari lapangan untuk membuat suatu model komunikasi

pembangunan dalam penyediaan prasarana perdesaan non keagamaan sebagai model eksperimen dan model komunikasi pembangunan dalam penyediaan sarana prasarana keagamaan sebagai model kontrol, yaitu dengan cara membuktikan signifikansi hubungan antara komponen-komponen model dengan partisipasi masyarakat.

1.4 Tujuan dan Sasaran Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan model komunikasi pembangunan dalam penyediaan prasarana perdesaan di kawasan Pesisir Utara Jawa Tengah

1.4.2 Sasaran Penelitian

Agar sesuai dengan tujuan penelitian, maka sasaran yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Identifikasi karakteristik masyarakat, peran agen perubahan, efektivitas penyuluhan dan perhatian masyarakat;
- b. Analisis perbedaan pola komunikasi pembangunan dalam penyediaan prasarana perdesaan non keagamaan dan sarana prasarana keagamaan;
- c. Analisis model komunikasi pembangunan dalam penyediaan prasarana perdesaan non keagamaan sebagai *model eksperimen* dan sarana prasarana keagamaan sebagai *model kontrol*;
- d. Validasi model komunikasi pembangunan dalam penyediaan prasarana perdesaan non keagamaan;

- e. Perumusan model komunikasi pembangunan dalam penyediaan prasarana perdesaan non keagamaan.

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini di antaranya: 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang pemikiran tentang suatu konsep pengembangan model komunikasi pembangunan penyediaan prasarana perdesaan non keagamaan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat di kawasan Pesisir Utara Jawa Tengah; 2) Dalam konteks pembangunan wilayah/kota, maka penelitian ini diharapkan dapat memberi alternatif pemecahan persoalan partisipasi dalam penyediaan prasarana yang sangat penting bagi pembangunan dan pengembangan wilayah perdesaan; di mana persoalan tersebut sangat terkait dengan proses komunikasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

1.6 Ruang Lingkup Materi dan Wilayah Penelitian

1.6.1 Ruang Lingkup Materi

Materi yang menjadi kajian dalam penelitian ini perlu dilakukan pembatasan tentang beberapa istilah dasar yang terkait, dan variabel-variabel atau komponen-komponen model yang akan diteliti, serta hubungan antar variabel dengan komponen model, sehingga penelitian lebih fokus dan mengarah pada tujuan penelitian. Adapun ruang lingkup materi dalam penelitian ini meliputi:

1. Model komunikasi didefinisikan sebagai gambaran tentang komponen-komponen komunikasi pembangunan dan hubungan antar komponen-komponen tersebut. Model komunikasi dalam penelitian ini akan dilihat dari

hubungan antara komponen forum komunikasi dan teknik komunikasi terhadap partisipasi masyarakat.

2. Komunikasi pembangunan adalah proses interaksi dan penyebaran informasi yang melibatkan pemerintah, masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam setiap tahapan pembangunan untuk menumbuhkan kesadaran dan menggerakkan partisipasi masyarakat.
3. Prasarana perdesaan non keagamaan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan perumahan di perdesaan, seperti: jalan, saluran air minum, saluran air limbah, saluran air hujan, pembuangan sampah dan jaringan listrik yang penyediaannya dikoordinasikan oleh pemerintah.
4. Sarana prasarana keagamaan adalah kelengkapan dasar fisik keagamaan seperti masjid, musholla, madrasah, pondok pesantren, beserta fasilitas penunjangnya yang penyediaannya dikoordinasikan oleh pengurus/panitia pembangunan yang dibentuk dalam lembaga bersangkutan.
5. Kawasan Pesisir Utara Jawa Tengah adalah wilayah perdesaan di sepanjang Kawasan Pantai Utara Jawa Tengah, di mana wilayah tersebut masih mendapat pengaruh sifat-sifat laut seperti pasang-surut, angin laut, dan perembesan air asin.
6. Dalam penelitian ini variabel karakteristik masyarakat, peran agen perubahan dan efektivitas penyuluhan menjadi dasar bagi konsep pengembangan model teknik komunikasi. Karakteristik masyarakat meliputi aspek pendidikan, mobilitas, akses media, keorganisasian, dan pendapatan. Peran agen perubahan akan dilihat dari peran tokoh masyarakat sebagai pemantau kondisi

(*monitor role*), penyebar informasi (*disseminator role*), penyampai informasi/juru bicara (*spokesman role, linker*) dan penggerak partisipasi (*activator role*). Peran agen perubahan merupakan indikator teknik komunikasi dua arah yang turut berpengaruh terhadap efektivitas penyuluhan. Sedang indikator-indikator efektivitas penyuluhan yang lain adalah penggunaan pesan, umpan balik (*feedback*) dan pengambilan keputusan, masing-masing melahirkan komponen teknik komunikasi persuasif, dialogis/dua arah dan deliberatif.

7. Tahapan-tahapan komunikasi yang tercermin dalam variabel pola komunikasi menjadi dasar bagi konsep pengembangan model forum komunikasi. Dalam forum komunikasi masing-masing kegiatan komunikasi akan dilihat dari indikator keikutsertaan warga, keterbukaan forum, rutinitas kegiatan dan kohesivitas forum. Oleh karena indikator-indikator tersebut merupakan aspek penentu akses stakeholders terhadap kegiatan-kegiatan komunikasi, maka dalam model tersebut dijadikan sebagai komponen prinsip forum komunikasi.
8. Adapun variabel perhatian masyarakat dalam model akan melahirkan komponen partisipasi masyarakat. Indikator-indikator partisipasi diperlukan dalam ujiterap model hipotetik.

1.6.2 Ruang Lingkup Wilayah

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, dengan pertimbangan: 1) Wilayah penelitian sangat luas, yaitu kawasan Pesisir Utara Jawa Tengah., sehingga perlu dipilih lokasi penelitian yang dianggap dapat merepresentasikan wilayah penelitian; 2) Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan penelitian lebih fokus pada fenomena yang terjadi (Yin, 2002 :1).

Dalam penelitian ini dipilih Kabupaten Demak sebagai lokasi penelitian, untuk merepresentasikan daerah-daerah yang berada di kawasan Pantai Utara Jawa Tengah. Pengambilan sampel penelitian dilakukan di dua tempat, yaitu: a) Desa Morodemak Kecamatan Bonang untuk merepresentasikan kawasan perdesaan pesisir yang bercirikan desa (desa desa) karena letaknya relatif jauh dari perkotaan dan berada pada bagian paling ujung dari Pantai Utara Kabupaten Demak; dan b) Desa Purwosari Kecamatan Sayung untuk merepresentasikan kawasan perdesaan pesisir yang mendapat pengaruh kota (desa kota), karena selain menjadi ibukota Kecamatan Sayung, Purwosari juga berdekatan dengan pengaruh Kota Semarang.

1.7 Kerangka Pemikiran

Komunikasi pembangunan merupakan bagian dari aktivitas Pemerintah Daerah dalam mengkoordinasikan dan menyelenggarakan urusan-urusan publik (*public goods*) seperti penyediaan prasarana perdesaan non keagamaan. Masyarakat, lembaga kemasyarakatan (*civil society*) baik dari unsur organisasi pemerintah maupun organisasi non pemerintah, dan pemerintahan desa adalah *stakeholders* pembangunan dan sekaligus pelaku komunikasi pembangunan pada level desa yang seharusnya secara aktif dilibatkan dalam seluruh tahapan kegiatan pembangunan sejak dari proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan maupun pengawasan.

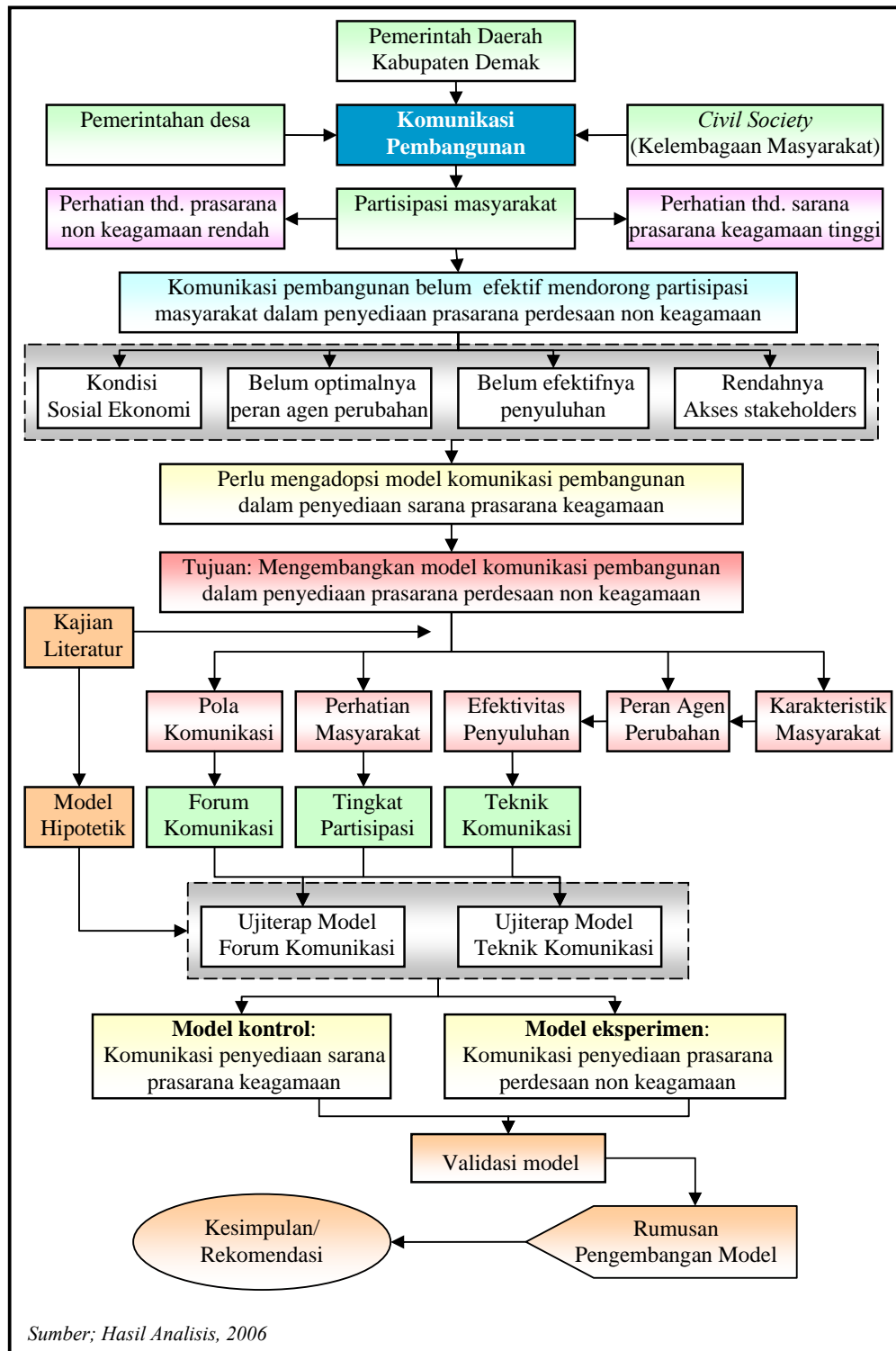
Adanya fenomena perhatian masyarakat kawasan Pesisir Utara Jawa Tengah yang relatif kurang terhadap penyediaan prasarana perdesaan non keagamaan, dan cukup tinggi terhadap penyediaan sarana prasarana keagamaan

sangat berhubungan dengan proses komunikasi pembangunan yang menyertainya. Kegiatan komunikasi pembangunan yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah selama ini pada kenyataannya belum mampu secara optimal mendorong partisipasi masyarakat. Sementara kegiatan komunikasi pembangunan yang diprakarsai oleh tokoh-tokoh informal lokal terbukti mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan prasarana perdesaan non keagamaan.

Belum efektifnya kegiatan komunikasi pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah di antaranya disebabkan oleh: rendahnya kondisi sosial ekonomi masyarakat, belum optimalnya peran agen perubahan, belum efektifnya kegiatan penyuluhan dan rendahnya akses *stakeholders* terhadap forum-forum komunikasi yang ada.

Mengingat permasalahan-permasalahan di atas, maka dipandang perlu mengadopsi model komunikasi pembangunan dalam penyediaan sarana prasarana keagamaan sebagai dasar pengembangan model komunikasi penyediaan prasarana perdesaan non keagamaan di kawasan Pesisir Utara Jawa Tengah.

Untuk menghasilkan suatu model hipotetik yang secara signifikan dapat diujiterapkan pada model komunikasi pembangunan penyediaan prasarana perdesaan non keagamaan sebagai *model eksperimen* dan model komunikasi pembangunan penyediaan sarana prasarana keagamaan sebagai *model kontrol* maka dilakukan kajian literatur yang berhubungan dengan tujuan dan sasaran penelitian. Berdasarkan kajian literatur tersebut, maka variabel-variabel dalam penelitian ini meliputi: karakteristik masyarakat, peran agen perubahan, efektivitas penyuluhan, pola komunikasi dan perhatian masyarakat.



GAMBAR 1.5
KERANGKA PEMIKIRAN

Analisis diskriptif dilakukan terhadap variabel-variabel karakteristik masyarakat, peran agen perubahan, efektivitas penyuluhan, pola komunikasi dan perhatian masyarakat. Analisis karakteristik masyarakat dilakukan untuk menunjang analisis peran agen perubahan. Analisis efektivitas penyuluhan dipergunakan untuk melihat tingkat pemanfaatan teknik komunikasi, sedang analisis pola komunikasi dipergunakan untuk melihat proses penyebaran informasi yang menandai kegiatan komunikasi dalam forum komunikasi.

Untuk menghasilkan model eksperimen dan model kontrol, maka dilakukan ujiterap (*treatment*) model hipotetik dengan cara melakukan uji korelasi bivariate ‘*Pearson Product Moment*’ antara komponen-komponen forum komunikasi dan teknik komunikasi terhadap partisipasi masyarakat. Berdasarkan hasil uji korelasi tersebut, disusunlah *model eksperimen* dan *model kontrol*.

Validasi model komunikasi pembangunan penyediaan prasarana perdesaan non keagamaan dilakukan dengan cara melakukan uji kesesuaian model eksperimen terhadap model kontrol melalui teknik analisis IPA (*Importance Performance Analysis*). Hasil validasi dipergunakan sebagai dasar perumusan model komunikasi pembangunan dalam penyediaan prasarana perdesaan non keagamaan di kawasan Pesisir Utara Jawa Tengah. Selanjutnya pada bagian akhir penelitian disusun kesimpulan dan rekomendasi.

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang didasarkan aliran pemikiran positivistik dengan proses penelitian yang bersifat deduktif. Dengan

pendekatan ini, diharapkan hasil yang diperoleh di lokasi sampel penelitian dapat dijadikan sebagai generalisasi terhadap populasi yang telah ditetapkan.

1.8.2 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2006:3). Berdasarkan tujuannya, penelitian ini menggunakan metode penelitian pengembangan (*research and development*), yaitu untuk menghasilkan suatu model dan menguji keefektifan model tersebut. Berdasarkan tingkat kealamiahannya (*natural setting*), metode penelitian ini termasuk metode penelitian survey karena untuk mendapatkan data peneliti melakukannya dengan mengedarkan kuesioner kepada responden di lokasi penelitian (Sugiyono, 2006:6-8).

1.8.3 Teknik Sampling

Menurut Atherton dan Klemmack, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi dalam prosedur pengambilan sampel, yaitu sampel harus representatif dan besar sampel harus memadai (Suhartono, 2002:58). Agar kedua syarat terpenuhi, maka pengambilan sampel dilakukan dengan teknik-teknik sebagai berikut:

1. Pemilihan Sampel

Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik *purpoosive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap memiliki sangkut paut dengan karakteristik populasi (Ruslan, 2003:146). Penelitian ini terkait dengan pengembangan model komunikasi

pembangunan di kawasan pesisir Utara Jawa Tengah, agar representatif maka pemilihan sampel mempertimbangkan aspek lokasi dan sumber informasi.

Kabupaten Demak dipilih sebagai lokasi penelitian untuk merepresentasikan daerah-daerah di Kawasan Pantai Utara Jawa Tengah. Sedangkan pengambilan sampel dilakukan di dua desa, yaitu Morodemak dan Purwosari, masing-masing merepresentasikan kawasan perdesaan dengan karakteristik *rural* (desa desa) dan *urban* (desa kota).

Penelitian ini berusaha menggali informasi dari para pelaku komunikasi pembangunan di level desa, yang tak lain adalah *stakeholders* pembangunan bagi pemerintah daerah, meliputi unsur-unsur: masyarakat, pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan meliputi organisasi pemerintah dan organisasi non pemerintah. Sehingga pengambilan sampel mencerminkan ketiga unsur *stakeholders* pembangunan tersebut.

2. Perhitungan Sampel

Agar besar sampel memadai, maka pengambilan sampel dilakukan dengan teknik sebagai berikut: 1) Pengambilan sampel unsur masyarakat menggunakan teknik *proportional random sampling*, yaitu pengambilan sampel secara acak dengan mempertimbangkan proporsi masing-masing sub populasi (Hadi, 1983:83). Perhitungan sampel dilakukan dengan rumus Yamane (Rakhmat,

1995:82):
$$n = \frac{N}{N.d^2 + 1}$$
, di mana n=jumlah sampel, N=jumlah populasi, dan

d=presisi (ditetapkan 10% dari populasi). Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh jumlah sampel unsur masyarakat 96 KK.

Pengambilan sampel untuk unsur pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan dilakukan dengan teknik *disproportionate stratified random sampling*, yaitu pengambilan sampel secara acak dan berstrata tetapi sebagian ada yang kurang proporsional pembagiannya. Hal ini dilakukan karena populasi bersifat heterogen (Riduwan, 2004:59). Pengambilan sampel unsur pemerintahan desa didasarkan pada jumlah aparatur desa dan anggota BPD, sedang pengambilan sampel dari unsur lembaga kemasyarakatan diambil berdasarkan jumlah organisasi pemerintah maupun non pemerintah.

Dari hasil perhitungan diperoleh jumlah sampel dari unsur pemerintahan desa (9 responden), dan lembaga kemasyarakatan 37 responden terdiri dari 15 responden tokoh organisasi pemerintah dan 22 orang responden tokoh organisasi non pemerintah. Data perhitungan sampel dapat dilihat pada lampiran A.

1.8.4 Kebutuhan Data

Berdasarkan kajian literatur yang dilakukan, maka disusun kebutuhan data sebagai berikut:

TABEL I.3
INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

No.	Variabel	Data	Sumber	Manfaat
1.		Data kependudukan Data Prasarana dan sarana	Demak dalam Angka dan Kecamatan dalam Angka	Untuk mengetahui gambaran umum wilayah studi
2.	-	Peta wilayah	RTRW Kabupaten Demak	Untuk mengetahui lokasi penelitian
3.	Karakteristik Masyarakat	Tempat kerja Pendidikan Pendapatan Media informasi Informasi yang disenangi Keaktifan dalam orsospol	Data primer (kuesioner)	Untuk memperoleh gambaran karakteristik pelaku komunikasi di kawasan pesisir

No.	Variabel	Data	Sumber	Manfaat
4.	Peran agen perubahan	Peran pemantau Peran penyebar informasi Peran juru bicara Peran penggerak partisipasi	Data primer (kuesioner)	Untuk menunjang analisis teknik komunikasi dua arah
5.	Efektivitas penyuluhan	Peran Tokoh informal Muatan pesan: -Manfaat -Ganjaran (reward) -Akibat -Ancaman -Dalil/pendapat Umpan balik: -Kesempatan usul -Tanggapan masalah -Keberatan -Jawaban pertanyaan Pengambilan keputusan: -Program/kegiatan -Jadwal kegiatan -Rencana anggaran biaya -Jenis & besar partisipasi -Panitia/pelaksana	Data primer (kuesioner)	Muatan pesan untuk menunjang analisis teknik komunikasi persuasif. Umpan balik untuk menunjang analisis teknik komunikasi dialogis (dua arah) Pengambilan keputusan untuk menunjang analisis teknik komunikasi deliberatif.
5.	Pola komunikasi	Tahap Perencanaan: Inisiasi perencanaan Pemograman & penjadwalan Penganggaran Desiminasi program Tahap Pengorganisasian: Pembentukan panitia Penunjukan pelaksana Benuk dan cara partisipasi Tahap Penggerakan: Swadaya gotong-royong Dana pembangunan Penyediaan alat & material Tahap Pengawasan: Laporan keuangan Laporan progres fisik Laporan evaluasi kegiatan	Data primer (kuesioner, wawancara)	Selain untuk melihat perbedaan pola komunikasi antara penyedia prasarana perdesaan non keagamaan dan keagamaan, output analisis pola komunikasi dipergunakan untuk menunjang analisis tingkat pemanfaatan forum komunikasi.
6.	Forum warga	Prinsip forum: -Keterlibatan warga -Keterbukaan forum -Rutinitas kegiatan -Kohesivitas forum Tahapan komunikasi: -Perencanaan -Pengorganisasian -Penggerakan -Pengawasan	Data primer (kuesioner)	Untuk analisis model forum warga dalam kegiatan komunikasi pembangunan
7.	Teknik komunikasi	-Komunikasi dua tahap -Komunikasi persuasif -Komunikasi dialogis -Komunikasi deliberatif	Data primer (kuesioner)	Untuk analisis model teknik komunikasi dalam kegiatan komunikasi pembangunan

No.	Variabel	Data	Sumber	Manfaat
8	Perhatian & Partisipasi Masyarakat	-Bantuan dana -Bantuan pemikiran -Bantuan material -Bantuan tenaga	Data primer (kuesioner)	Untuk uji model hipotetik

Sumber: Hasil rangkuman teori, 2006

1.8.5 Teknik Pengolahan Data

Untuk memudahkan proses analisis dan interpretasi data hasil penelitian, pengolahan data dilakukan dengan teknik: 1) Pengeditan (*editing*), merupakan proses pengecekan dan penyesuaian yang diperlukan terhadap data penelitian, yaitu dengan cara memberi kode dan melakukan pemrosesan data melalui teknik statistik. Tujuan pengeditan data adalah untuk menjamin kelengkapan, konsistensi dan kesiapan data dalam proses analisis; 2) Pemberian kode (*coding*) adalah proses identifikasi dan klasifikasi data penelitian ke dalam skor numerik. Penskoran ini dilakukan terhadap jawaban responden atas pertanyaan-pertanyaan yang bersifat tertutup (*close ended questions*) maupun jawaban yang bersifat terbuka (*open ended questions*) dari kuesioner yang telah diedarkan. Pengkodean ini akan memudahkan dan mengefisienkan proses entry data ke sistem program komputer; 3) tabulating, yaitu penyusunan data ke dalam bentuk tabel-tabel; 4) Pemrosesan data (*data processing*) dilakukan untuk menganalisa data secara diskriptif maupun inferensial dengan menggunakan program SPSS release 11.5.





Pengkodean dan tabulasi data mentah yang diperoleh dari responden dibuat sebagaimana tabel I.4. Data tersebut menjadi dasar pembuatan grafik, tabel dan keperluan analisis lainnya yang penyajiannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan analisis.

TABEL I.4
PENKODEAN DAN TABULASI DATA MENTAH

A. FORUM KOMUNIKASI

POLA KOMUNIKASI			Planning				Organizing			Actuating			Controlling			Skor/Bobot
			Inisiasi	Pemrograman	Penganggaran	Diseminasi	Panitia Pembangunan	Pelaksana Kegiatan	Jenis, besar & cara partisipasi	Swadaya gotong-royong	Penggalangan dana	Penyediaan alat/material	Laporan keuangan	Progres fisik	Evaluasi kegiatan	
MODEL FORUM KOMUNIKASI	Prinsip	Kode	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	
	Keikutsertaan	F1														
	Keterbukaan	F2														
	Rutinitas	F3														
	Kohesivitas	F4														
	Skor/Bobot															

B. TEKNIK KOMUNIKASI

EFEKTIVITAS PENYULUHAN																		
Peran Agen Perubahan				Penggunaan pesan					Umpan balik				Keputusan					
Pemantau kondisi	Penyebab informasi	Penyampai aspirasi	Penggerak partisipasi	Manfaat	Ganjaran	Akibat	Rasa khawatir	Dalil penguat	Usul	Tanggapan masalah	Keberatan	Tanggapan pertanyaan	Penetapan program	Penetapan jadwal	Penetapan anggaran	Jenis & besar partisipasi	Penggalangan dana	Penetapan panitia
X14	X15	X16	X17	X18	X19	X20	X21	X22	X23	X24	X25	X26	X27	X28	X29	X30	X31	X32
																		
Teknik Dua Tahap (T1)				Teknik Persuasif (T2)					Teknik Dialogis (T3)				Teknik Deliberatif (T4)					
MODEL TEKNIK KOMUNIKASI																		

C. PARTISIPASI MASYARAKAT

PERHATIAN MASYARAKAT			
Bantuan uang	Bantuan Pemikiran	Bantuan Material	Bantuan Tenaga
Y1	Y2	Y3	Y4
PARTISIPASI MASYARAKAT (Y)			

Sumber: Hasil rangkuman teori, 2006

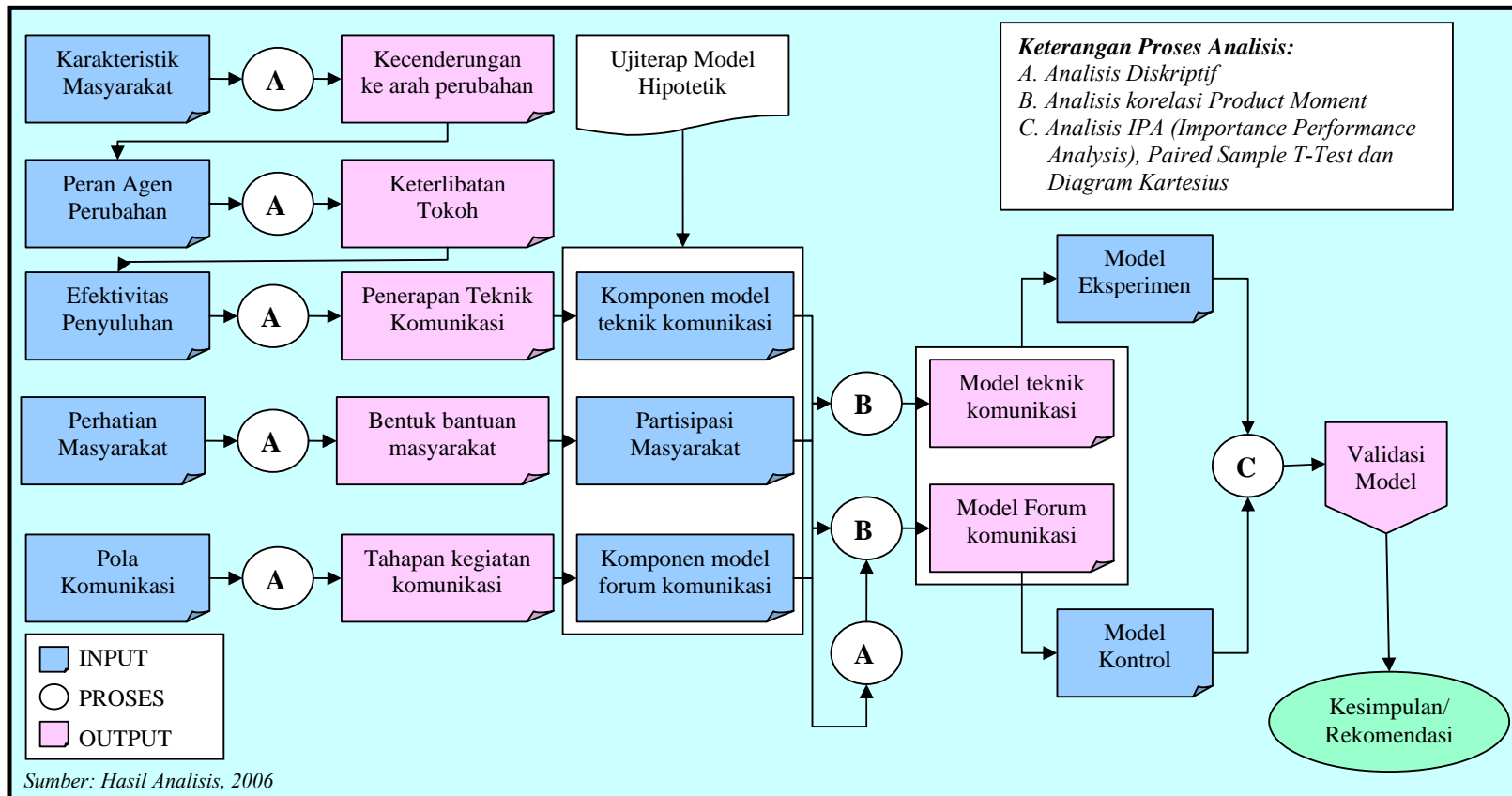
1.8.6 Teknik Analisis

Teknik analisis dalam penelitian ini dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi Karakteristik Masyarakat, Peran Agen Perubahan, Efektivitas Penyuluhan dan Perhatian Masyarakat

Analisis ini dilakukan secara diskriptif terhadap variabel karakteristik masyarakat, peran agen perubahan, efektivitas penyuluhan dan perhatian masyarakat.

- a. Analisis karakteristik masyarakat, untuk mengidentifikasi ciri-ciri khusus masyarakat pelaku komunikasi di lokasi penelitian dilihat dari aspek pendidikan, mobilitas, akses media, keorganisasian dan pendapatan. Output dari analisis ini adalah diskripsi tentang kecenderungan masyarakat ke arah perubahan yang menandai peran sebagai agen perubahan.
- b. Analisis peran agen perubahan dipergunakan untuk mengidentifikasi peran tokoh-tokoh masyarakat, baik sebagai pemantau kondisi, penyebar informasi, penyampai aspirasi/juru bicara maupun penggerak partisipasi. Output dari analisis ini adalah diskripsi tentang keterlibatan tokoh-tokoh informal dalam kegiatan komunikasi pembangunan penyediaan prasarana perdesaan non keagamaan maupun sarana prasarana keagamaan.
- c. Analisis efektivitas penyuluhan, dipergunakan untuk mengidentifikasi keterlibatan tokoh masyarakat, penggunaan pesan, umpan balik (*feedback*), dan cara pengambilan keputusan dalam kegiatan penyuluhan/komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah. Output dari analisis ini yaitu diskripsi tentang penerapan teknik-teknik komunikasi yang sesuai dengan kondisi perdesaan.
- d. Analisis perhatian masyarakat, dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai bentuk bantuan masyarakat yang menandai perhatian mereka terhadap penyediaan prasarana perdesaan non keagamaan maupun keagamaan. Output dari analisis ini adalah diskripsi tentang tingkat partisipasi masyarakat.



GAMBAR 1.6
KERANGKA ANALISIS PENGEMBANGAN MODEL

2. Analisis Perbedaan Pola Komunikasi Penyediaan Prasarana perdesaan Non Keagamaan dan Sarana Prasarana Keagamaan

Analisis ini dilakukan secara diskriptif komparatif untuk melihat perbedaan proses penyebaran informasi pembangunan dalam penyediaan prasarana perdesaan non keagamaan dan sarana prasarana keagamaan sejak tahap perencanaan hingga tahap pengawasan. Output dari analisis ini diperlukan untuk menunjang analisis forum komunikasi.

3. Analisis Model Komunikasi Pembangunan dalam Penyediaan Prasarana Perdesaan Non Keagamaan dan Sarana Prasarana keagamaan

Analisis ini dilakukan untuk melihat penerapan *model hipotetik* pada model komunikasi penyediaan prasarana perdesaan non keagamaan sebagai model eksperimen maupun model komunikasi penyediaan sarana prasarana keagamaan sebagai model kontrol, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Analisis model forum komunikasi:

- Analisis diskriptif forum komunikasi untuk melihat gambaran akses stakeholders dalam setiap tahapan komunikasi pembangunan berdasarkan indikator keikutsertaan, keterbukaan, rutinitas dan kohesivitas forum.
- Analisis ujiterap model forum komunikasi dilakukan dengan teknik analisis korelasi *bivariate 'Pearson Product Moment'* untuk menguji ada tidaknya hubungan antara forum komunikasi dengan partisipasi masyarakat, sehingga dapat terlihat dapat tidaknya komponen dan struktur model hipotetik forum komunikasi diterapkan sebagai model forum komunikasi penyediaan prasarana perdesaan non keagamaan (*model eksperimen*) dan model forum komunikasi penyediaan sarana

prasarana keagamaan (*model kontrol*). Output dari analisis ini adalah dihasilkannya rumusan model forum komunikasi pada model eksperimen maupun model kontrol.

b. Analisis model teknik komunikasi:

- Uji signifikansi model teknik komunikasi dilakukan dengan teknik analisis korelasi *bivariate 'Pearson Product Moment'* untuk menguji ada tidaknya hubungan antara teknik komunikasi dengan partisipasi masyarakat, sehingga dapat terlihat dapat tidaknya komponen dan struktur model hipotetik teknik komunikasi diterapkan sebagai model teknik komunikasi penyediaan prasarana perdesaan non keagamaan sebagai model eksperimen dan model teknik komunikasi penyediaan sarana prasarana keagamaan sebagai model kontrol.
- Output dari analisis ini adalah dihasilkannya rumusan model teknik komunikasi pada model eksperimen maupun model kontrol.

4. Validasi Model Komunikasi Penyediaan Prasarana Perdesaan Non Keagamaan

Validasi model komunikasi penyediaan prasarana perdesaan non keagamaan adalah analisis yang dimaksudkan untuk mengevaluasi, menyempurnakan model komunikasi pembangunan dalam penyediaan prasarana perdesaan non keagamaan sebagai model eksperimen dengan cara melihat tingkat kesesuaiannya terhadap model komunikasi pembangunan dalam penyediaan sarana prasarana keagamaan sebagai model kontrol. Teknik analisis yang dipergunakan adalah teknik analisis IPA (*Importence-Performance Analysis*), yaitu membandingkan kinerja model komunikasi

penyediaan prasarana perdesaan non keagamaan (*performance*) dengan model yang akan diadopsi/model komunikasi penyediaan sarana prasarana keagamaan (*importance*), dengan langkah-langkah (Ruslan, 2003:217):

- Menghitung tingkat kesesuaian model dengan rumus: $Tk = X_A/X_B \times 100\%$.
- Melakukan uji beda model dengan teknik statistik '*Paired Sample T-Test*'
- Menentukan prioritas model dengan diagram kartesius.
- Identifikasi temuan studi.

5. Perumusan Model Komunikasi Pembangunan dalam Penyediaan Prasarana Perdesaan Non Keagamaan.

Setelah pada tahap validasi dapat diidentifikasi temuan-temuan studi, maka pada tahap terakhir dari proses analisis ini adalah merumuskan model komunikasi pembangunan dalam penyediaan prasarana perdesaan non keagamaan, dengan cara menyempurnakan model hipotetik atas dasar temuan-temuan studi tersebut.

1.9 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dijabarkan sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

Pada bagian pendahuluan memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan sasaran penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup materi dan wilayah penelitian, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab 2 Model Komunikasi Pembangunan dalam Penyediaan Prasarana Perdesaan di Kawasan Pesisir

Bab ini berisi kajian teori yang mendasari penelitian. Teori-teori tersebut di antaranya tentang konsep pembangunan kawasan pesisir dan pengembangan model komunikasi pembangunan.

Bab 3 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada bab ini akan dipaparkan tentang kondisi geografis, demografis, prasarana perdesaan dan sarana prasarana keagamaan yang ada di lokasi penelitian.

Bab 4 Model Komunikasi Pembangunan dalam Penyediaan Prasarana Perdesaan di Kawasan Pesisir Utara Jawa Tengah

Bab ini berisi tentang keseluruhan tahapan analisis yang mencerminkan sasaran penelitian.

Bab 5 Kesimpulan dan Rekomendasi

Pada bab ini akan disampaikan kesimpulan yang berisi tentang arah pengembangan model dan rekomendasi hasil penelitian.

BAB II

MODEL KOMUNIKASI PEMBANGUNAN DALAM PENYEDIAAN PRASARANA PERDESAAN DI KAWASAN PESISIR

2.1 Konsep Pembangunan Kawasan Pesisir

2.1.1 Definisi Kawasan Pesisir

Menurut Tarigan (2005:114), pengertian kawasan (*area*) lebih mengacu pada jenis wilayah homogen, sedang daerah mengacu pada jenis wilayah administratif. Hoover (1975) dan Glasson (1974) memiliki pendapat yang sama, bahwa kawasan adalah wilayah homogen yang dibatasi berdasarkan keseragamannya secara internal (*internal uniformity*). Sehingga pengertian kawasan pesisir disandarkan pada pengertian wilayah sebagai wilayah homogen.

Selanjutnya, ada beberapa pendapat tentang definisi wilayah pesisir. Dahuri (2004:2) mengartikan wilayah pesisir sebagai wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Beatley et.al. (1994) lebih spesifik menyebut wilayah peralihan yang menandai wilayah pesisir tersebut, ke arah darat mencakup daerah yang masih terkena percikan air laut atau pasang surut, dan ke arah laut meliputi daerah paparan (*continental shelf*). Menurut, Soegiarto (1976), definisi wilayah pesisir yang sering dipergunakan di Indonesia adalah daerah pertemuan antara darat dan laut; ke arah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin; sedangkan ke arah laut mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang

terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran.

2.1.2 Permukiman Kawasan Pesisir

Lingkungan permukiman nelayan di kawasan pesisir pada umumnya merupakan kawasan kumuh dengan tingkat pelayanan akan pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana dasar lingkungan yang sangat terbatas, khususnya keterbatasan untuk memperoleh pelayanan sarana air bersih, drainase dan sanitasi, serta prasarana dan sarana untuk mendukung pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Direktorat Jenderal Permukiman Departemen Pekerjaan Umum memberi arahan penanggulangan kawasan permukiman nelayan di antaranya: a) Peningkatan aksesibilitas masyarakat miskin di permukiman nelayan; b) Peningkatan kualitas lingkungan serta prasarana serta sarana penunjang kegiatan ekonomi dengan pemberdayaan masyarakat; c) Penataan lingkungan fisik dan kualitas hunian melalui penyediaan prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukiman; d) Pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan tatanan sosial kemasyarakatan termasuk pengembangan kegiatan usaha ekonomi masyarakat (http://www.pu.go.id/Ditjen_mukim/htm-lampau/pk-kimpraswil.htm).

2.1.3 Kebutuhan Prasarana Perdesaan

Sebagaimana kawasan yang lain, secara administratif pada kawasan pesisir dikenal adanya desa, kecamatan, kota, kabupaten, propinsi, dan sebagainya;

sehingga kita juga mengenal adanya prasarana perdesaan, prasarana perkotaan, dan sebagainya.

Penyediaan prasarana perdesaan bagi pengembangan kawasan pesisir sangatlah urgen, karena sebagian besar permasalahan kawasan pesisir pemecahannya sangat terkait dengan penyediaan prasarana tersebut. Prasarana dapat dianggap sebagai faktor potensial dalam menentukan perkembangan suatu wilayah perkotaan maupun perdesaan. Pembangunan wilayah tidak dapat berjalan dengan lancar jika prasarana tidak memadai (Jayadinata, 1999:31).

Dalam konteks lingkungan permukiman, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman memberi definisi tentang prasarana lingkungan sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dapat berfungsi sebagaimana mestinya, seperti: jalan, saluran air minum, saluran air limbah, saluran air hujan, pembuangan sampah dan jaringan listrik. Lebih jauh, kebutuhan prasarana dasar permukiman menurut Dirjen Cipta Karya (dalam Anggrahini, 2003:28) meliputi: jalan lingkungan, jalan setapak, kran umum, sumur gali, drainase, Mandi Cuci Kakus (MCK) dan Tempat Pembuangan Sampah (TPS).

Penyebutan prasarana biasanya dikaitkan dengan sarana. Jika prasarana atau infrastruktur menunjuk alat utama bagi kegiatan sosial ekonomi, maka sarana adalah alat pembantu dalam prasarana (Jayadinata, 1999:31). Sarana lingkungan adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997:880). Sedang menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, sarana lingkungan adalah fasilitas penunjang

yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial budaya, sarana lingkungan berupa fasilitas pendidikan, kesehatan, perbelanjaan pemerintah dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olahraga dan lapangan terbuka.

2.2 Model Komunikasi Pembangunan

2.2.1 Pengertian Model Komunikasi

Model adalah gambaran yang dirancang untuk mewakili kenyataan. Model adalah tiruan gejala yang akan diteliti. Model menggambarkan hubungan di antara variabel-variabel atau sifat-sifat atau komponen-komponen gejala tersebut. (Rakhmat, 1995:60). Model adalah representasi suatu fenomena, baik nyata maupun abstrak, dengan menonjolkan unsur-unsur terpenting fenomena tersebut. Model komunikasi bukanlah fenomena komunikasi itu sendiri, tetapi hanya alat untuk menjelaskan dan mereduksi fenomena komunikasi (Mulyana, 2005:121). Model komunikasi adalah deskripsi ideal tentang apa yang dibutuhkan untuk terjadinya komunikasi (Sereno & Mortensen dalam Cassata, 1979:63-64).

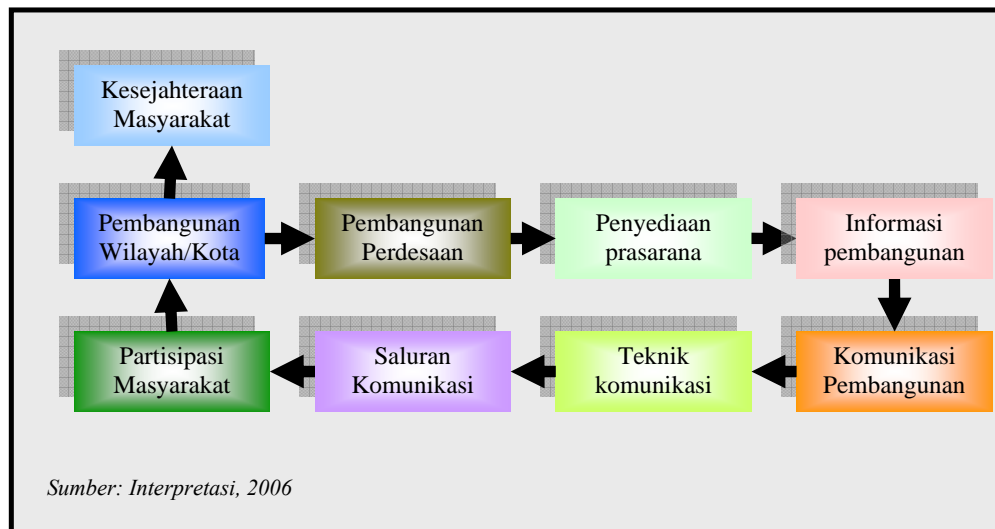
Dengan demikian secara sederhana, model komunikasi dapat diartikan sebagai gambaran tentang variabel-variabel atau komponen-komponen komunikasi, dan hubungan antara variabel-variabel atau komponen-komponen komunikasi tersebut.

2.2.2 Hubungan Komunikasi dan Pembangunan

Menurut Schramm, bahwa untuk meningkatkan kehidupan masyarakat perlu pembangunan. Pembangunan memerlukan keaktifan masyarakat. Supaya

masyarakat berpartisipasi, pembangunan harus diinformasikan. Karena itu perlu adanya sarana/saluran informasi dan pembangunan komunikasi (Nasution, 2002:120). Pembangunan komunikasi dapat dilakukan melalui suatu perencanaan komunikasi yang dapat mengaktualisasikan pesan pembangunan dengan cara-cara yang dapat mendorong tercapainya tujuan pembangunan (Hancock, 1978:2).

Berdasarkan kedua pendapat di atas, maka dalam konteks pembangunan prasarana perdesaan dan lebih luas pembangunan wilayah/kota, dapat diinterpretasikan suatu sketsa hubungan sebagai berikut:



GAMBAR 2.1
HUBUNGAN KOMUNIKASI DAN PEMBANGUNAN

2.2.3 Pengertian Komunikasi Pembangunan

Effendy (2006:92) mengartikan komunikasi pembangunan sebagai proses penyebaran pesan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada khalayak guna mengubah sikap, pendapat, dan perilakunya dalam rangka meningkatkan kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah.

Komunikasi pembangunan merupakan proses interaksi seluruh warga masyarakat (aparatur pemerintah, penyuluh, tokoh masyarakat, LSM, individu atau kelompok/organisasi sosial) untuk menumbuhkan kesadaran dan menggerakkan partisipasi melalui proses perubahan terencana demi tercapainya mutu-hidup secara berkesinambungan, dengan menggunakan teknologi atau menerapkan ide-ide yang sudah terpilih (Mardikanto, 1987:20).

Komunikasi pembangunan meliputi peran dan fungsi komunikasi - sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan secara timbal-balik - di antara semua pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan; terutama antara masyarakat dengan pemerintah, sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan dan penilaian terhadap pembangunan (Nasution, 2002:106).

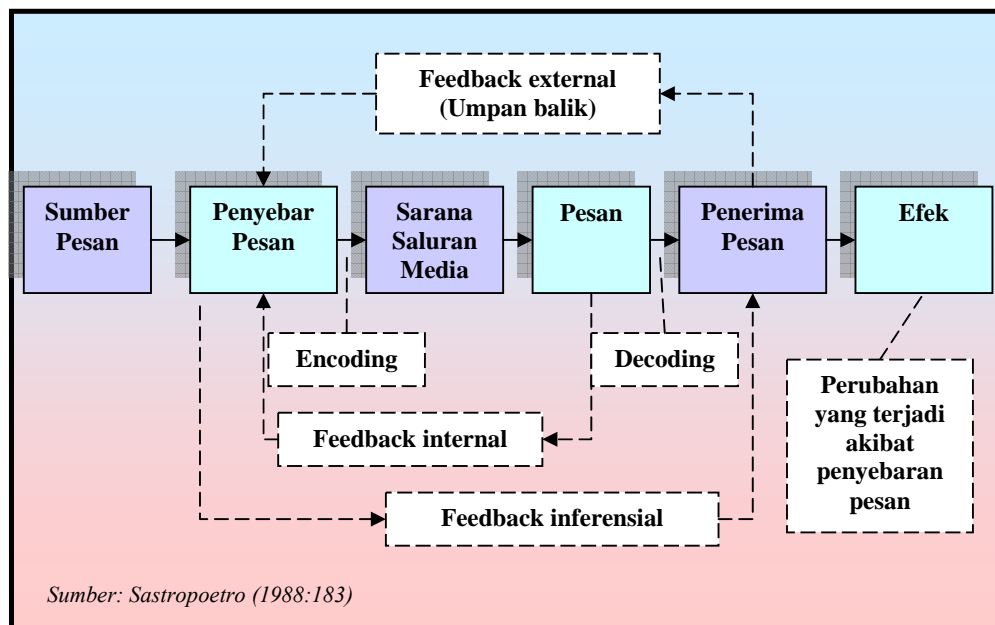
Dengan demikian dapat disarikan, bahwa komunikasi pembangunan adalah proses interaksi dan penyebaran informasi secara timbal balik antara pihak-pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan (pemerintah, masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan) sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga penilaian pembangunan. Komunikasi pembangunan dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat.

2.3 Unsur dan Proses Komunikasi Pembangunan

2.3.1 Unsur Komunikasi Pembangunan

Lasswell (Effendy, 2006:10) mempergunakan model verbal untuk mendefinisikan komunikasi dengan mengatakan, bahwa cara terbaik menjelaskan komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan: *who says what in which channel to whom with what effect?* Atau siapa mengatakan apa dengan saluran apa

kepada siapa dengan pengaruh bagaimana. Berdasarkan definisi Lasswell tersebut dapat diturunkan lima unsur komunikasi yang saling bergantung satu sama lain, yaitu: komunikator (*communicator, source, sender, encoder*), pesan (*message*), media (*channel*), komunikan (*Communicant, communicatee, receiver, recipient, decoder*), dan efek (*effect, impact, influence*).



GAMBAR 2.2
ELEMEN DAN PROSES KOMUNIKASI

2.3.2 Proses Komunikasi Pembangunan

Dalam proses komunikasi pembangunan, pemerintah atau pihak-pihak yang memiliki ide-ide tentang pembangunan dapat berperan sebagai sumber pesan. Pesan tersebut disebarkan kepada komunikan (penerima pesan) oleh komunikator melalui suatu saluran atau media dengan efek tertentu. Dalam proses komunikasi dapat terjadi umpan balik (*feedback*) dari komunikan kepada komunikator sebagai reaksi atas pesan-pesan pembangunan yang disampaikan.

Umpan balik tersebut dapat dilakukan langsung oleh komunikan (*feedback external*) ataupun diinterpretasikan sendiri oleh komunikator (*feedback inferensial*)

2.3.3 Stakeholders dan Agen Perubahan

Komunikasi pembangunan melibatkan *stakeholders* pembangunan, yaitu semua individu, kelompok atau organisasi yang memiliki kepentingan, terlibat atau dipengaruhi (secara positif maupun negatif) oleh suatu kegiatan atau program pembangunan (Sumarto, 2004:18). *Stakeholders* pembangunan di level desa meliputi: pemerintahan desa, masyarakat dan lembaga kemasyarakatan (*civil society*). Ketiganya komponen tersebut merupakan pelaku komunikasi pembangunan di level desa, dan menjadi partner pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan prasarana perdesaan.

Usaha-usaha pembangunan suatu masyarakat selalu ditandai oleh adanya sejumlah orang yang mempelopori, menggerakkan dan menyebarluaskan proses perubahan. Orang-orang tersebut dikenal dengan sebutan agen perubahan (*change agents*) (Nasution, 2002:127).

Pembangunan memerlukan adanya pihak-pihak yang selalu mendorong ke arah perubahan (modernisasi). Menurut Teori *Propensity of Change* Lerner (Nasution, 2002:108), modernisasi suatu bangsa ditandai terjadinya urbanisasi (*urbanization*). Urbanisasi akan meningkatkan melek huruf (*literacy*), lalu meningkatkan penggunaan media (*media participation*), berikut akan meningkatkan partisipasi politik masyarakat (*political participation*). Sehingga karakteristik masyarakat yang berpotensi menjadi agen-agen perubahan di

lingkungannya dapat dilihat dari aspek urbanisasi, pendidikan, akses media dan partisipasi organisasi sosial politik.

2.4 Pengembangan Model Komunikasi Pembangunan

2.4.1 Pendekatan Manajemen Sumberdaya Lokal

Pengembangan model komunikasi pembangunan didasarkan pada pendekatan Manajemen Sumberdaya Lokal (*Community-Based Resource Management*), yaitu suatu paradigma pembangunan yang menempatkan peranan individu, bukan sebagai subyek tetapi sebagai pelaku yang turut menentukan tujuan yang hendak dicapai, menguasai sumber-sumber dan mengarahkan proses yang menentukan hidup mereka sendiri (Korten, 1984).

Paradigma ini memberi tempat yang sangat penting bagi prakarsa dan keanekaragaman lokal, serta menekankan pentingnya masyarakat lokal yang mandiri (*self-reliant communities*) sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri.

Keterlibatan seluruh pihak yang berkepentingan atau pemegang peran pembangunan (*stakeholders*) dalam suatu komunitas, dan perhatian terhadap keberadaan institusi-institusi lokal, kelompok-kelompok lokal, inisiatif lokal, kapital sosial, kearifan lokal, nilai-nilai tradisi lokal, dan sebagainya menjadi faktor kunci dari pendekatan manajemen sumberdaya lokal (Nugroho, 2004:1).

2.4.2 Pola Komunikasi dan Forum Komunikasi

2.4.2.1 Pola Komunikasi Pembangunan

Peranan individu dalam sistem komunikasi ditentukan oleh hubungan struktur antara satu individu dengan individu yang lain. Hubungan ini ditentukan

oleh pola hubungan interaksi individu dengan arus informasi dalam jaringan komunikasi yang membentuk suatu pola komunikasi (Muhammad, 2005:102).

Pola komunikasi di masyarakat dapat dilakukan dengan mengidentifikasi: bagaimana penyebaran informasi di masyarakat, siapa yang menjadi sumber informasi, di mana pusat-pusat penyebaran informasi, dan saluran komunikasi apa yang dipergunakan (Sastropetro, 1988:232).

Oleh karena komunikasi pembangunan meliputi peran dan fungsi komunikasi sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan dan penilaian terhadap pembangunan (Nasution, 2002:106), maka proses penyebaran informasi yang membentuk pola komunikasi tercermin dalam keseluruhan tahapan komunikasi pembangunan yang sejalan dengan tahapan manajemen pembangunan, yaitu meliputi kegiatan-kegiatan: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*) (Terry dalam Winardi, 1983:5).

Pada tahap perencanaan, kegiatan komunikasi terkait dengan aktivitas: prakiraan (*forecasting*), penetapan tujuan (*establishing objective*), pemograman (*programming*), penjadwalan (*schedulling*), penganggaran (*budgeting*), pengembangan prosedur (*developing procedure*), serta penetapan dan iterpretasi kebijakan (*establishing and interpreting policies*) atas dasar kondisi yang ada. Allan (dalam Siswanto, 2006:45-46)

Dalam kegiatan perencanaan diperlukan adanya sosialisasi untuk menyampaikan informasi, membangun kesadaran publik, menampung aspirasi dan *feedback*, serta peningkatan partisipasi warga (Sumarto, 2004:408). Inisiasi

merupakan bentuk sosialisasi yang dimaksudkan untuk menghimpun fakta, menjangking inisiatif, berbagi peran atau bersifat konsultatif (Sumarto, 2004:232).

Kegiatan komunikasi pembangunan pada tahap pengorganisasian terkait dengan aktivitas: pembagian kerja (*division of labor*), departementalisasi (*departementalization*), rentang kendali (*span of control*) dan delegasi (Gibson, 1980, dalam Siswanto, 2006:85). Pada tahap ini dilakukan pembentukan organisasi proyek, tata kerja dalam melaksanakan proyek, dan personalia proyek (Siagian, 1984:175-181)

Penggerakan (*actuating*) merupakan usaha untuk menggerakkan anggota kelompok (Winardi, 1983:297). Dalam konteks pembangunan perdesaan, maka penggerakan berarti usaha untuk menggerakkan partisipasi masyarakat. Sedang bentuk partisipasi menurut Sastropetro (1988:56) dapat berupa: pikiran (*psychological participation*), tenaga (*physical participation*), keahlian (*participation with skill*), barang (*material participation*), uang (*money participation*) atau jasa-jasa lainnya (*serve participation*).

Pada tahap pengawasan, kegiatan komunikasi terkait dengan laporan akuntabilitas, yang meliputi akuntabilitas keuangan (laporan keuangan), akuntabilitas manfaat (evaluasi kegiatan), dan laporan prosedural (pelaksanaan kebijakan, misalnya progres fisik) (LAN dan BPKP, 2000:28-29).

2.4.2.2 Forum Komunikasi

Apabila pola komunikasi menunjuk proses penyebaran informasi pembangunan, maka bagaimana proses penyebaran informasi itu dilakukan tercermin dari saluran yang dipergunakan. Dalam kegiatan komunikasi

pembangunan, penyediaan forum komunikasi menjadi saluran yang memungkinkan terjadinya proses penyebaran informasi dan interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, forum komunikasi merupakan bagian yang utama dari model komunikasi pembangunan.

Penyediaan forum komunikasi bagi terjalinnya suatu komunikasi yang intensif antara pemerintah dan segenap elemen masyarakat dalam proses pembangunan adalah suatu kebutuhan yang sangat vital. Melalui forum tersebut, pemerintah dapat menyampaikan/menyebarkan pesan-pesan pembangunan, sekaligus mendengar berbagai masukan dan umpan balik (*feedback*) dari masyarakat atas pesan-pesan yang disampaikan/disebarkan tersebut.

Sumarto (2004:42) mengartikan forum komunikasi atau forum warga sebagai suatu forum konsultasi dan penyaluran aspirasi warga untuk urusan pembangunan dan pelayanan publik di tingkat lokal. Forum komunikasi dipergunakan untuk merumuskan permasalahan bersama, mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi komunitas, sekaligus menjadi media resolusi konflik di tingkat lokal.

Beberapa prinsip dasar yang dapat dijadikan sebagai indikator forum komunikasi di antaranya: *Pertama*, keikutsertaan warga dan keterbukaan forum. Penyediaan forum komunikasi harus dapat memberi akses informasi dan komunikasi bagi masyarakat. Akses berarti ruang dan kapasitas masyarakat untuk masuk dalam arena *governance*, yakni mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta terlibat aktif mengelola barang-barang publik. Ada dua hal penting dalam akses: keterlibatan secara terbuka (*inclusion*) dan keikutsertaan (*involvement*).

Inclusion menyangkut siapa yang terlibat, sedangkan *involvement* berbicara tentang bagaimana masyarakat terlibat. http://www.ireyogya.org/sutoro/voice_dan_akses_masyarakat.pdf.

Kedua, rutinitas dan kohesivitas forum komunikasi. Tidak semua forum komunikasi dapat dijadikan sebagai forum warga yang efektif, sebab forum warga harus memungkinkan rutinitas warga untuk dapat berkonsultasi, berinteraksi dan mencari solusi tentang berbagai masalah publik (Sumarto, 2004:42). Partisipasi dapat muncul jika terjadi interaksi yang mendorong solidaritas dan internalisasi norma-norma kelompok, di mana seseorang telah mengidentifikasikan dirinya dengan kelompok beserta norma-normanya, sehingga ia mengambil oper sistem norma, termasuk sikap sosial yang dimiliki kelompok (Gerungan, 1991:94-99). Oleh karena itu keterikatan warga terhadap kelompok (kohesivitas forum) juga merupakan indikator yang sangat penting. Sebagaimana pendapat Pratikto (1987:58), bahwa akibat adanya identifikasi norma kelompok dan lamanya anggota bergaul dalam kelompok dapat menyebabkan terjadinya kohesivitas kelompok, yaitu kekuatan yang menahan orang untuk tinggal dalam suatu kelompok.

Dengan demikian, komunikasi pembangunan akan lebih efektif apabila dapat memanfaatkan kelompok-kelompok lokal sebagai forum komunikasi yang memang telah secara rutin dihadiri oleh warga, dan wargapun memiliki ikatan yang kuat terhadap kelompok tersebut. Selain RT/RW, lembaga-lembaga keagamaan (jama'ah masjid/musholla, jam'iyah ta'lim, jam'iyah tahlil/ yasinan, dan sebagainya) dapat dijadikan sebagai forum komunikasi. Sebab, kohesifitas

warga terhadap lembaga-lembaga keagamaan sangat tinggi karena adanya motif teogenetis, yaitu dorongan untuk menjalankan ajaran agama (Gerungan, 1991:143).

2.4.3 Teknik Komunikasi

2.4.3.1 Efektivitas Penyuluhan

Menurut Lionberger dan Gwin (1982:218), menyatakan seorang penyuluh memiliki tugas ganda, yaitu selain menyampaikan informasi, juga berupaya mengubah perilaku masyarakat yang menjadi sasarannya. Artinya di samping ia melaksanakan fungsi sebagai komunikator, ia juga harus mampu mempengaruhi masyarakat sasaran agar memiliki perilaku tertentu untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan yang sedang diupayakan. Agar kegiatan penyuluh berhasil dengan baik, maka harus diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi. Emerson (1982:16) mengartikan efektivitas sebagai pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedang Gill (1982:7) mendefinisikan efektivitas sebagai suatu tingkat prestasi dalam mencapai tujuan, artinya sejauhmana tujuan yang telah ditetapkan akan dicapai. Dengan demikian komunikasi dikatakan efektif apabila sasaran dan tujuan komunikasi dapat tercapai.

Oleh karena itu efektivitas penyuluhan/komunikasi melekat dengan teknik komunikasi yang dipergunakan. Jika forum komunikasi merupakan saluran bagi penyebaran pesan pembangunan, maka teknik komunikasi adalah cara bagaimana supaya penyebaran pesan pembangunan dapat menimbulkan efek yang diharapkan, sebab fungsi teknik komunikasi yang utama adalah: 1) membangun

pengertian atau pemahaman yang sama tentang suatu pesan/informasi. Sesuai dengan asal katanya komunikasi (*communication*) dari kata Latin *communis* yang berarti sama, atau *communico* yang berarti membuat sama (Mulyana, 2005:41); 2) mengarahkan komunikan pada tujuan komunikasi (*distination*), yaitu terjadinya perubahan pendapat, sikap, atau perilaku ditunjukkan melalui umpan balik (*feedback*) dari komunikan (Charnley, 1965:335).

Beberapa teknik komunikasi yang sesuai dengan kondisi perdesaan dan sangat menentukan efektivitas penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah di antaranya sebagai berikut:

2.4.3.2 Model Komunikasi Dua Tahap

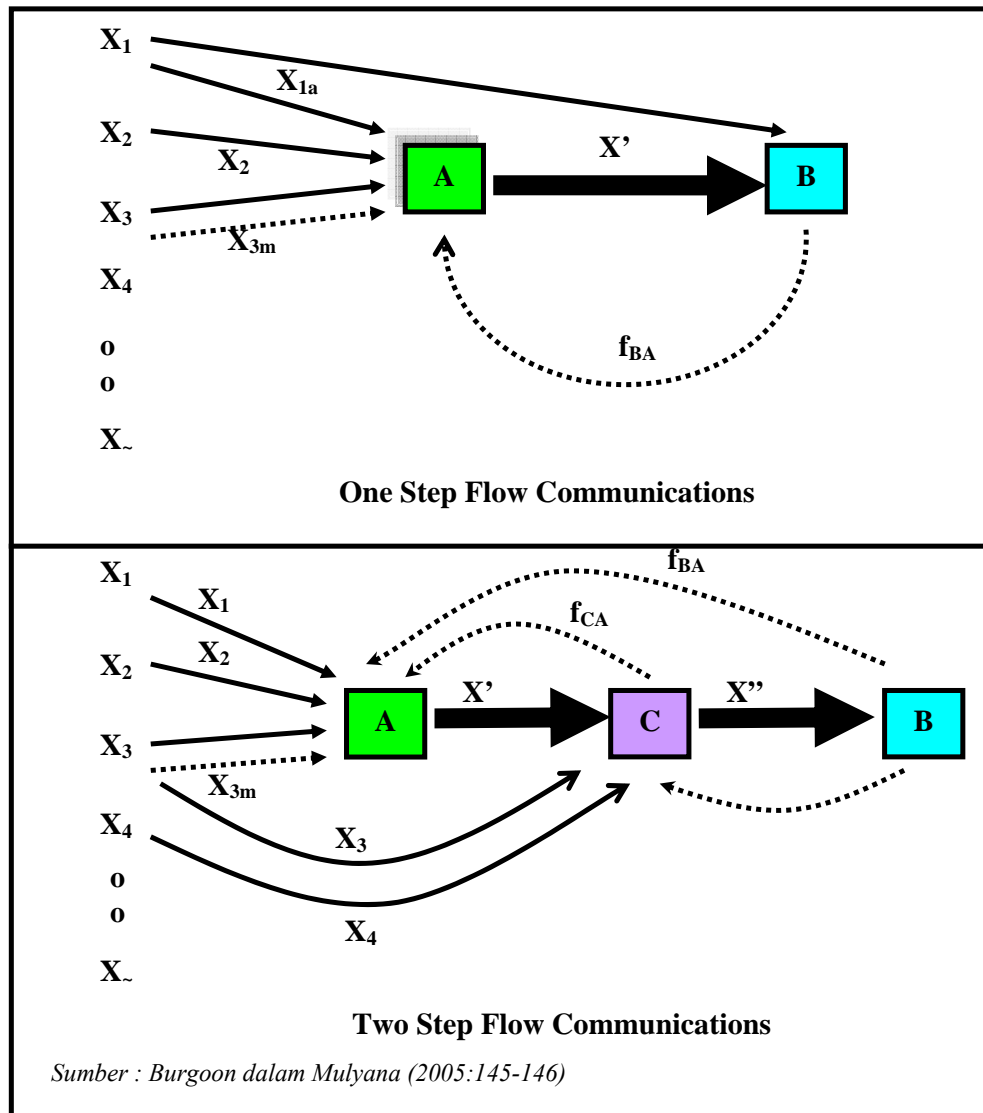
Agen perubahan merupakan pelaku komunikasi dengan peran-peran tertentu. Peran agen perubahan menunjukkan adanya aspek dinamis dari kedudukan seorang agen perubahan (Lavael, 1996:81) Peran utama agen perubahan adalah: a) katalisator yang menggerakkan masyarakat untuk melakukan perubahan, b) pemberi pemecahan persoalan, c) pembantu proses perubahan: membantu proses pemecahan masalah dan penyebaran inovasi; serta d) penghubung (*linker*) dengan sumber-sumber yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi (Havelock, 1973:7).

Keberadaan agen perubahan (*change agents*) dalam kegiatan komunikasi pembangunan sekaligus merupakan komunikator lokal bagi lingkungannya. Model komunikasi dua tahap (*two step flow communications*) menempatkan agen perubahan sebagai pemuka pendapat (*opinion leaders*) dalam proses berkomunikasi.

Menurut Susanto (1977a:11), pada masyarakat tradisional (perdesaan) dependensi terhadap pemuka pendapat khususnya dalam menginterpretasikan isi pesan komunikasi sangat tinggi. Pemuka pendapat adalah pemimpin informal yang tidak selalu memiliki otoritas formal namun sangat berperan dalam membimbing tingkahlaku dan mempengaruhi keputusan masyarakat (Muhammad, 2005:102). Atas dasar kedua pendapat tersebut, maka keberadaan pemuka pendapat sangat diperlukan dalam mempengaruhi sikap, pendapat dan perilaku (partisipasi) masyarakat.

Posisi agen-agen perubahan dalam penyebaran ide-ide pembangunan dapat dilihat dalam model komunikasi dua tahap. Pada model komunikasi satu tahap (*one step flow communications*), sumber (A) menyoroti objek atau peristiwa tertentu dalam lingkungannya ($X_1, X_2, X_3, X_4, \dots, X_n$) dan menciptakan pesan (X') yang ia kirimkan kepada penerima (B). Selanjutnya B mengirimkan umpan balik atau *feed back* (f_{BA}) kepada A.

Dengan cara menambahkan suatu unsur lain (C) yaitu pemuka pendapat/agen perubahan, Westley dan MacLean mengubah model tersebut menjadi model komunikasi dua tahap. Dalam model kedua ini, pemuka pendapat (C) menerima pesan (X') dari sumber (A) atau menyoroti objek orientasi (X_3, X_4) dalam lingkungannya. Dari informasi yang diperoleh, pemuka pendapat menciptakan pesan sendiri (X'') yang ia kirimkan kepada penerima (B), sehingga terbentuk suatu sistem penyaringan, karena penerima tidak memperoleh informasi langsung dari sumbernya, melainkan dari pemuka pendapat.



GAMBAR 2.3
MODEL WESTLEY DAN MACLEAN

Adapun fungsi pemuka pendapat di antaranya sebagai: penyaring informasi/ide (*gatekeeper*), penyebar informasi, dan penghalang/pembendung atau pemercepat penyebaran dan penerimaan informasi (Susanto, 1977a:88). Pemuka pendapat dapat juga dapat menjalankan peranan informasional (*informational roles*) berupa: a) peranan monitor (*monitor role*), yaitu memandang

lingkungannya sebagai sumber informasi; b) peranan penyebar (*disseminator role*), menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat di lingkungannya; c) Peranan jurubicara (*spokesman role*) yaitu menyampaikan aspirasi masyarakat di lingkungannya (Effendy, 2006:119).

2.4.3.3 Model Komunikasi Persuasif

Persuasif adalah komunikasi yang ditujukan untuk mempengaruhi pilihan komunikan, demikian menurut Brembeck and William S. Howell (1976:19). Komunikasi persuasif dapat didefinisikan sebagai proses mempengaruhi dan mengendalikan perilaku orang lain melalui pendekatan psikologis (Rakhmat, 1995:6). Komunikasi persuasif adalah suatu teknik mempengaruhi manusia dengan memanfaatkan data dan fakta psikologis maupun sosiologis dari komunikan yang hendak dipengaruhi (Susanto, 1977a:17).

Teknik komunikasi persuasif dapat dilakukan dengan cara (Kertapati, 1980:34): 1) *acceptance device*, yaitu penyampaian pesan dengan kata-kata atau simbol-simbol komunikasi yang memberikan asosiasi yang menyenangkan. Cara ini dapat dipergunakan untuk memperoleh penerimaan (*acceptance*), kepercayaan (*confidence*), dukungan (*support*) dan partisipasi masyarakat; 2) *rejection device*, yaitu penyampaian pesan dengan kata-kata tau simbol-simbol komunikasi yang membangkitkan rasa khawatir atau takut (*fear arousing*); 3) *testimonal device*, yaitu pesan/ajakan dilakukan dengan cara mensitir, kata-kata, pendapat orang-orang yang terkenal, atau dalil-dalil penguat; 4) *bandwagon device*, yaitu persuasi dengan cara menyediakan suporter atau tukang tepuk.

Selain itu, pesan pembangunan dapat diterima oleh masyarakat apabila ada harapan akan memperoleh manfaat (*expectation of reward*) (Susanto, 1977a:11), dan sesuai dengan *Dissonance Reduction Theory*, manusia tidak menyukai adanya perbedaan/pertentangan antara norma-norma dalam dirinya dan ia akan menerima pendapat yang dapat mengurangi ketegangan atau pertentangan norma dalam dirinya (Susanto, 1977b:151). Oleh karena itulah dalam penyebaran pesan pembangunan pada masyarakat yang agamis akan sangat efektif apabila menggunakan motivasi agama dan penguatan dalil-dalil agama.

2.4.3.4 Model Komunikasi Dua Arah

Penyebaran pesan pembangunan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: komunikasi satu arah (*one way traffic of communication*) dan komunikasi yang bersifat timbal balik/komunikasi dialogis/komunikasi sambung rasa (Sastropetro, 1988:211). Penyebaran informasi dalam komunikasi pembangunan hendaknya menimbulkan pengertian yang benar dan jelas dan sekaligus pengertian yang sama di antara komunikator dan komunikan, sehingga perlu adanya komunikasi yang dialogis (*two way traffic of communications*).

Unsur utama terjadinya komunikasi dua arah, adalah adanya tanggapan/balikan (*feedback*) dari komunikan terhadap pesan/informasi yang diberikan oleh komunikator (Sailer dalam Muhammad: 2005:13), sehingga antara komunikator dan komunikan berada dalam situasi komunikasi yang saling berinteraksi dan sejajar.

Komunikasi dua arah dapat dilakukan dengan cara menjaring aspirasi atau masukan publik dengan mengadakan konsultasi publik (Sumarto, 2004:172), yaitu

suatu metode untuk pertukaran informasi, gagasan dan kepedulian tentang suatu isu antara pemerintah dan masyarakat. Melalui proses ini masyarakat memperoleh kesempatan untuk mempengaruhi perumusan kebijakan. Dengan konsultasi publik diharapkan terbangun dukungan dari masyarakat terhadap program yang diusulkan. Dalam proses konsultasi akan terjadi proses saling mendengar antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dan pelaksana pembangunan memiliki kesempatan untuk mendengar dan melihat kenyataan di masyarakat setempat.

2.4.3.5 Model Komunikasi Deliberatif

Prasarana perdesaan adalah barang publik yang dalam penyediaannya membutuhkan adanya keputusan publik. Oleh karena keputusan publik sangat terkait dengan proses berdemokrasi, maka pengembangan komunikasi pembangunan dalam penyediaan prasarana perdesaan hendaknya juga memperhatikan bagaimana tipologi berdemokrasi yang ada di desa.

Diamond (1999) berpendapat, bahwa demokrasi perwakilan hanya cocok sampai tingkat kabupaten, karena dari segi wilayah dan penduduk, maka gagasan demokrasi menggunakan metode musyawarah tidak mungkin diterapkan. Di desa, karena ukurannya yang masih terjangkau, akan lebih baik mempraktikkan demokrasi partikular yang berbasis pada komunitarian. Dengan demikian teknik komunikasi deliberatif menjadi salah satu teknik komunikasi pembangunan yang sangat penting dalam proses penyediaan prasarana di wilayah perdesaan. Oleh Sumarto (2004:14), teknik komunikasi deliberatif didefinisikan sebagai proses

pengambilan keputusan yang didahului dengan diskusi (musyawarah) tentang alasan dukungan/penentangan terhadap suatu pandangan.

2.4.4 Perhatian dan Partisipasi Masyarakat

Andersen (Rakhmat, 1994:52) mengartikan perhatian (*attention*) sebagai suatu proses mental ketika stimuli atau rangkaian stimuli menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat stimuli lainnya melemah. Perhatian sering muncul sesuai dengan kepercayaan, sikap, nilai, dan kepentingan yang dimiliki, sehingga perhatian bersifat sangat selektif (*selective attention*) (Suprpto, 2006:10). Perhatian sangat mempengaruhi persepsi (Rakhmat, 1994:52).

Perhatian masyarakat terhadap prasarana di lingkungannya sangat terkait bagaimana persepsi sosial (*social perception*) yang mereka miliki, yaitu kecakapan untuk melihat dan memahami perasaan-perasaan, sikap-sikap, kebutuhan-kebutuhan masyarakat sebagai keseluruhan (Gerungan, 1991:136). Hal inilah yang menyebabkan penerimaan setiap orang terhadap suatu gagasan, ide atau inovasi pembangunan mengalami tahapan yang berlainan.

Adanya perhatian merupakan salah satu bentuk dari efek komunikasi yang positif. Menurut *Stimulus-Organisme-Response Theory* (Teori S-O-R) yang diperkenalkan oleh Hovland, Jenis dan Kelley, bahwa suatu pesan atau inovasi (*stimulus*) yang disampaikan kepada komunikan mungkin diterima atau ditolak. Komunikasi akan berlangsung jika ada perhatian dari komunikan, proses berikutnya komunikan mengerti, selanjutnya menerima. Bila proses ini dilalui maka terjadilah perubahan sikap pada diri komunikan (Effendy, 1993:225). Dengan demikian perhatian akan berlanjut pada partisipasi.

Dalam teori "*A-A-procedure*" ditunjukkan hubungan yang sangat jelas antara perhatian dan partisipasi. Dalam teori tersebut disebutkan, bahwa partisipasi (*action*) dimulai dari timbulnya perhatian (*attention*) terlebih dahulu, untuk kemudian tumbuh minat (*interest*), berikut hasrat (*desire*), dan akhirnya terjadi keputusan (*decision*) untuk melakukan kegiatan (*action*) (Dorwin Cartwright dalam Effendy, 1981:87).

Adapun bentuk-bentuk partisipasi menurut Sastropetro (1988:12), di antaranya: partisipasi pikiran (*psychological participation*), partisipasi tenaga (*physical participation*), partisipasi pikiran dan tenaga (*psychological and physical participation*), partisipasi keahlian (*participation with skill*), partisipasi barang (*material participation*), dan partisipasi uang (*money participation*).

2.5 Sintesis Kajian Teori

Dari teori-teori di atas dapat disintesis kajian teori sebagai berikut:

TABEL II.1
SINTESIS KAJIAN TEORI

A. ISTILAH-ISTILAH PENELITIAN

Sumber	Ringkasan Teori	Manfaat dlm. Penelitian
Schramm (Nasution, 2002:120) & Hancock (1978:2).	Untuk meningkatkan kehidupan perlu pembangunan. Pembangunan butuh partisipasi. Agar timbul partisipasi pembangunan diinformasikan melalui saluran dan teknik komunikasi.	-Menjelaskan posisi penelitian -Memuat komponen model komunikasi pembangunan
Rakhmat (1995:60), Mulyana (2005:121), Sereno & Mortensen (Cassata, 1979:63-64)	Model adalah gambaran dan hubungan antara variabel-variabel atau komponen-komponen komunikasi.	-Memberi batasan tentang model komunikasi pembangunan -Memberi arahan pengembangan model komunikasi
	• Komunikasi pembangunan dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat.	

Lasswell (Effendy, 2006:10)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Communications is who says what in which channel to whom with what effect?</i> • Komunikasi menghubungkan komunikator, pesan, media, komunikan dan efek. 	Menjadi dasar perlunya media/saluran & teknik komunikasi sebagai komponen model yang dapat menjamin proses penyebaran informasi dari sumber/komunikator kepada stakeholders pembangunan, sehingga timbul efek (partisipasi).
Sumarto (2004:18)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Stakeholders</i>, yaitu individu, kelompok/ organisasi yang berkepentingan, terlibat atau dipengaruhi program kegiatan pembangunan 	
Jayadinata (1999:31)	Prasarana menunjuk alat utama sedang sarana adalah alat pembantu prasarana.	Menjadi acuan batasan tentang prasarana perdesaan non keagamaan dan sarana prasarana keagamaan.
UU No. 4/1992	Prasarana yaitu kelengkapan dasar fisik lingkungan perumahan spt. jalan, saluran air minum, air limbah, air hujan, pembuangan sampah & jaringan listrik. Sarana yaitu fasilitas penunjang spt. fasilitas pendidikan, kesehatan, perbelanjaan, pemerintah dan pelayanan umum, peribadatan, dll.	
Dirjen Cipta Karya (Anggrahini, 2003:28)	Prasarana dasar permukiman meliputi: jalan lingkungan, jalan setapak, kran umum, sumur gali, drainase, MCK dan TPS.	

B.VARIABEL/KOMPONEN MODEL

Sumber	Ringkasan Teori	Variabel/Indikator/ Komponen Model	Model
Muhammad (2005:102)	Peranan individu dalam sistem komunikasi ditentukan oleh pola interaksi dengan arus informasi dalam suatu pola komunikasi.	Pola Komunikasi: <i>Proses interaksi dan penyebaran informasi dari sumber kepada sasaran melalui saluran tertentu sejak tahap perencanaan hingga pengawasan pembangunan</i> , meliputi:	Forum komunikasi , yaitu saluran bagi warga untuk berinteraksi dan berkomunikasi dalam urusan pembangunan dan pelayanan publik sejak tahap perencanaan hingga pengawasan dengan prinsip keikutsertaan, keterbukaan, rutinitas dan kohesivitas
Sastropoetro (1988:232)	Pola komunikasi diidentifikasi dari: penyebaran informasi, sumber informasi, pusat penyebaran informasi. dan saluran komunikasi.	Perencanaan: -Inisiasi -Pemrograman -Penggangan -Diseminasi	
Nasution (2002:106) dan Terry (Winardi, 1983:5)	Komunikasi pembangunan berlangsung sejak tahap perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan.	Pengorganisasian: -Panitia pembangunan -Pelaksana kegiatan -Jenis & cara partisipasi	
Allan (Siswanto, 2006:45-46)	Kegiatan perencanaan, meliputi: prakiraan, penetapan tujuan, pemrograman, penjadwalan, penganggaran, pengembangan prosedur, penetapan dan iterpretasi kebijakan.	Penggerakan: -Swadaya tenaga -Penggalaan dana -Penyediaan material	
Sumarto (2004:408)	Sosialisasi untuk menyampaikan informasi, membangun kesadaran publik, menampung aspirasi dan <i>feedback</i> , serta partisipasi		
Sumarto (2004:232)	Inisiasi dimaksudkan menghimpun fakta, menjaring inisiatif, berbagi peran atau bersifat konsultatif.	Pengawasan: -Laporan keuangan -Progres fisik -Evaluasi kegiatan	
Gibson (Siswanto, 2006:85)	Pengorganisasian: pembagian kerja, departementalisasi, rentang kendali dan delegasi.		

<p>Siagian (1984:175-181)</p> <p>Winardi (1983:297) dan Sastropoetro (1988:56)</p> <p>LAN & BPKP (2000: 28-29)</p>	<p>Pengorganisasian: pembentukan organisasi proyek, tata kerja dalam melaksanakan proyek, dan personalia proyek</p> <p><i>Actuating</i> merupakan usaha untuk menggerakkan partisipasi anggota kelompok (uang, pemikiran, material, tenaga, keahlian).</p> <p>Kegiatan pengawasan terkait akuntabilitas keuangan, akuntabilitas manfaat, dan akuntabilitas prosedural</p>		
<p>Lasswell (Effendy, 2006:10)</p> <p>Sumarto (2004:10)</p> <p>Eko (http://www.ireyogya.org/sutoro/voice_dan_akses_masyarakat.pdf)</p> <p>Sumarto (2004:42)</p> <p>Gerungan (1991:94-99) dan Pratikto (1987:58)</p>	<p>Komunikasi: penyebaran informasi dari komunikator kepada komunikan melalui saluran dengan efek tertentu.</p> <p>Forum komunikasi/forum warga adalah saluran aspirasi warga untuk urusan pembangunan dan pelayanan publik di tingkat lokal.</p> <p>Akses berarti ruang dan kapasitas masyarakat untuk masuk dalam arena <i>governance</i>, yakni mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta terlibat aktif mengelola barang-barang publik. Ada dua hal penting dalam akses: keterlibatan secara terbuka (<i>inclusion</i>) dan keikutsertaan (<i>involvement</i>).</p> <p>Forum warga harus memungkinkan rutinitas warga untuk dapat berkonsultasi, berinteraksi dan mencari solusi tentang berbagai masalah publik.</p> <p>Interaksi dalam kelompok mendorong solidaritas dan internalisasi norma-norma kelompok, sehingga timbul keterikatan anggota terhadap kelompok (kohesivitas)</p>	<p>Prinsip Forum:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Keikutsertaan -Keterbukaan -Rutinitas -Kohesivitas 	
<p>Nasution (2002:127)</p> <p>Lerner (Nasution, 2002:108)</p>	<p>Usaha pembangunan ditandai adanya sejumlah orang yang memelopori, menggerakkan dan menyebarluaskan proses perubahan. Teori <i>Propensity of Change</i>, indikator masyarakat ke arah perubahan:: urbanisasi, literasi, partisipasi media, partisipasi politik</p>	<p>Karakteristik Masyarakat:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Aspek pendidikan: <ul style="list-style-type: none"> a. Pendidikan formal b. Pendidikan informal -Aspek mobilitas: <ul style="list-style-type: none"> a. Tempat kerja b. Keseringan luar kota -Aspek akses media: <ul style="list-style-type: none"> a. Kepemilikan media b. Muatan media yang disukai c. Terpaan informasi -Aspek pendapatan 	

Havelock (1973:7) Susanto (1977:88) Effendy (2006:119)	Peran agen perubahan: penggerak perubahan, pemecahan persoalan, penyebaran inovasi, penghubung. Fungsi pemuka pendapat: penyaring, penyebar pembendung, pemercepat informasi. Peran agen perubahan: <i>monitor role, disseminator role, spokesman</i>	Peran agen perubahan: -Pemantau kondisi -Penyebarnya informasi -Jurubicara -Penggerak partisipasi	Teknik dua tahap
Kertapati (1980:34) Susanto (1977:11)	Teknik komunikasi persuasif dapat dilakukan dengan cara <i>acceptance device, rejection device, fear arousing</i>), <i>testimonial device, bandwagon device</i> . Pesan pembangunan dapat diterima oleh masyarakat apabila ada harapan akan memperoleh manfaat	Penggunaan pesan: -Pesan berisi manfaat -Pesan berisi akibat -Pesan berisi ganjaran -Pesan rasa khawatir -Dalil penguat	Teknik persuasif
Sastropoetro (1988:211) Sailer (Muhammad, 2005:13) Sumarto (2004:172)	Komunikasi pembangunan harus menimbulkan pengertian yang benar, jelas dan sama di antara komunikator dan komunikan (komunikasi dialogis, <i>two way traffic of communications</i>). Unsur utama terjadinya komunikasi dua arah, adalah tanggapan/balasan (<i>feedback</i>). Komunikasi dua arah dapat dilakukan dengan cara menjangkau aspirasi atau konsultasi publik	Umpan balik: -Kesempatan usul -Tanggapan masalah -Mangjukan keberatan -Tanggapan pertanyaan	Teknik dialogis
Diamond (1999) Sumarto (2004:14)	Di desa, karena ukurannya yang masih terjangkau, akan lebih baik mempraktikkan partikular/permusyawaratan. Deliberatif didefinisikan sebagai proses pengambilan keputusan yang didahului diskusi/musyawarah	Pengambilan keputusan: -Penetapan program -Penetapan jadwal -Penetapan anggaran -Cara & jenis partisipasi -Penggalangan dana -Penetapan panitia	Teknik deliberatif
Gerungan (1991:136) Hovland et.al (Effendy, 1993:225) Cartwright (Effendy, 1981:87). Sastropoetro (1988:12)	Perhatian terkait persepsi sosial, yaitu kecakapan melihat dan memahami perasaan, sikap, kebutuhan masyarakat sebagai keseluruhan. <i>Stimulus-Organisme-Response Theory</i> : komunikasi berlangsung jika ada perhatian, berikut mengerti, selanjutnya menerima (perubahan sikap dan perilaku). "A-A-procedure Theory": partisipasi (<i>action</i>) dimulai dari perhatian (<i>attention</i>), lalu tumbuh minat (<i>interest</i>), hasrat (<i>desire</i>), lalu terjadi keputusan (<i>decision</i>) untuk melakukan kegiatan (<i>action</i>). Jenis partisipasi: pikiran, tenaga, keahlian, material, uang.	Perhatian Masyarakat yaitu persepsi dan kesadaran masyarakat tentang sesuatu yang berlanjut pada perilaku nyata (<i>partisipasi</i>): -Bantuan uang -Bantuan pemikiran -Bantuan material -Bantuan tenaga	Partisipasi Masyarakat , yaitu: bentuk riil dari perhatian masyarakat

Sumber: Hasil sintesis teori, 2006

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

3.1 Kondisi Geografis

3.1.1 Posisi Geografis

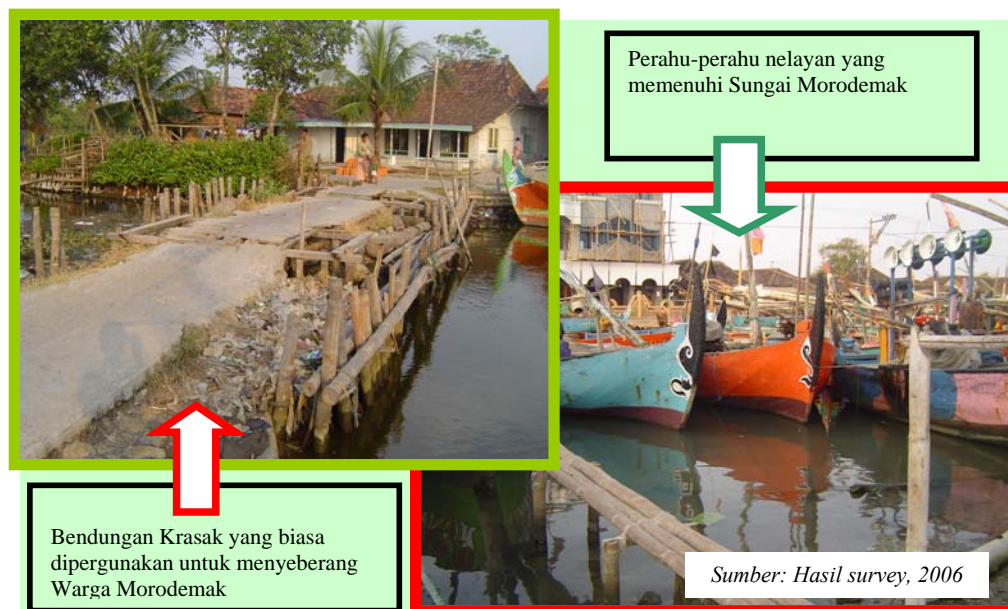
Ciri Desa Morodemak dan Purwosari sebagai kawasan pesisir dapat dilihat dari posisinya secara geografis. Desa Morodemak di sebelah Barat berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah Utara dengan Desa Purworejo, sebelah Timur dengan Desa Margolinduk dan sebelah Selatan dengan Kecamatan Karangtengah. Posisinya yang berhimpit langsung dengan Laut Jawa menyebabkan kawasan ini sangat rawan terhadap terjadinya banjir akibat air pasang.

Antara Desa Morodemak dan Purworejo terbelah oleh Sungai Morodemak yang berlanjut hingga muara laut. Sungai ini menjadi jalur utama lalu lintas kapal-kapal/perahu-perahu nelayan. Tidak adanya jembatan penghubung antara kedua desa mengakibatkan perjalanan yang memanfaatkan jasa transportasi ke kota melalui Jalan raya Purworejo harus didahului dengan penyeberangan sungai dengan “*perahu-perahu watang*” (perahu getek). Sebagian penduduk yang memiliki sepeda motor memilih melalui jalan setapak yang melewati Desa Margolinduk untuk menuju jalan raya (jarak sekitar 2,5 km). Di ujung Desa Margolinduk inilah terdapat bendungan Dukuh Krasak yang biasanya dimanfaatkan oleh warga untuk menyeberang jalan.

Kondisi geografis Desa Morodemak sebagai kawasan pesisir yang relatif terisolir memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap aktivitas ekonomi

masyarakat yang sebagian besar bekerja pada sektor primer, yaitu sebagai nelayan dan petani tambak.

Sedang Desa Purwosari sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sriwulan, sebelah Utara dengan Desa Bedono; sebelah Timur dengan Desa Sidogemah, dan sebelah Selatan dengan Desa Sayung. Desa Purwosari dilalui oleh Sungai Dombosayung yang bermuara di Laut Jawa, sehingga Desa Purwosari masih terkena pengaruh pasang surut. Tidak jauh berbeda dengan Desa Morodemak, pada saat air pasang sangat tinggi, beberapa ruas jalan kampung dan rumah penduduk juga terkena banjir akibat air pasang tersebut.

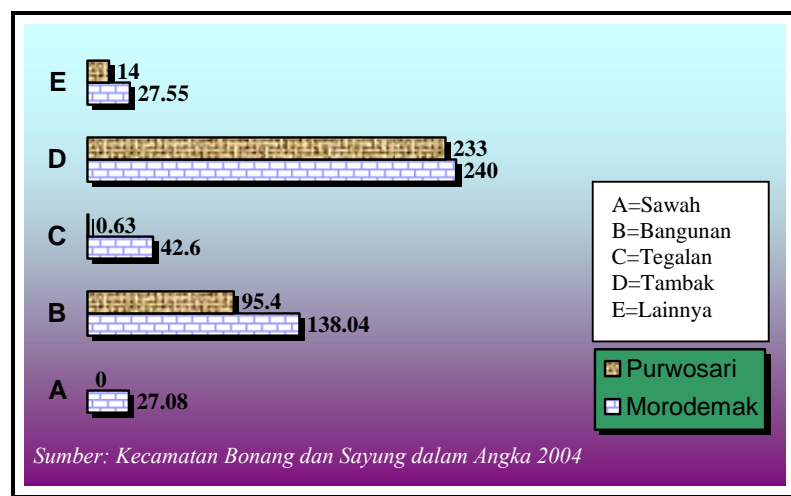


GAMBAR 3.1
JALUR PENYEBERANGAN WARGA MORODEMAK

Adanya akses langsung ke jalan raya, ke arah Barat menuju Kota Semarang dan ke arah Timur menuju Kota Demak, mengakibatkan penduduk Desa Purwosari lebih memiliki alternatif untuk melakukan berbagai aktivitas sosial ekonomi. Lokasinya yang sangat dekat dengan pengaruh Kota Semarang

memberi dampak pada minat penduduk untuk menggeluti sektor-sektor kota, di antaranya sebagai buruh industri, buruh bangunan, sopir angkot, pedagang dan sebagainya.

3.1.2 Tata Guna Lahan



GAMBAR 3.2
TATA GUNA LAHAN TAHUN 2004

Wilayah Desa Morodemak lebih luas dibanding wilayah Desa Purwosari, masing-masing 426,3 Ha dan 393 Ha. Ciri sebagai kawasan pesisir terlihat dari tata guna lahannya, di mana kedua desa tersebut sebagian besar lahannya merupakan area pertambakan. Desa Morodemak memiliki area tambak seluas 233 Ha (54,66%), sedang Desa Purwosari 240 Ha (56,3%).

Lahan pekarangan/bangunan di Desa Morodemak seluas 138,04 Ha (32,38%) sedang di Desa Purwosari seluas 96,40 Ha (22,61%), keduanya sebagian besar berupa kawasan permukiman. Letak Desa Purwosari yang cukup dekat dari Kota Semarang, menjadi sangat strategis sebagai daerah penyangga perkembangan dan pertumbuhan Kota Semarang.

Di Desa Morodemak terdapat lahan persawahan seluas 27,08 Ha (6,35%), namun kondisi eksisting saat ini telah banyak berubah menjadi lahan tambak dan sebagian menjadi lahan bangunan permukiman. Pengaruh pasang surut air laut, mengakibatkan lahan persawahan di Desa Morodemak tidak produktif lagi, sehingga banyak petani yang mengalihfungsikan lahan sawah mereka menjadi lahan tambak karena secara ekonomis lebih menguntungkan.

Sedang pertumbuhan Desa Purwosari sebagai kawasan yang mendapat pengaruh kota telah banyak merubah fungsi lahan persawahan menjadi lahan-lahan bangunan, akibatnya tidak ada lahan persawahan di kawasan ini. Berdirinya beberapa pabrik industri memperjelas karakter Desa Purwosari sebagai kawasan pesisir yang bercirikan desa kota.

TABEL III.1
DAFTAR PABRIK INDUSTRI DI DESA PURWOSARI TAHUN 2005

No.	Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Jml.Tenaga
1.	PT. Multi Prima Mahkota	Cat	20 Orang
2.	PT. Surya Karya Utama	Karoseri	45 Orang
3.	PT. Sayung Adi Mukti	Lamnating Leather	120 Orang
4.	PT. Fushen Sea Food Ind.	Pembekuan ikan	79 Orang
5.	PT. Exporindo Terus Maju Jaya	Garment	890 Orang
6.	PT. Emba Mega Farma	Farmasi	105 Orang
7.	PT. Indowood	Furniture	50 Orang
8.	PT. Karuna Pringadhi Santoso	Supit bambu	105 Orang
9.	PT. Puspita Abadi	Penyamaan Kulit	165 Orang
10.	PT. Sinar Amaril	Amplas besi	79 Orang

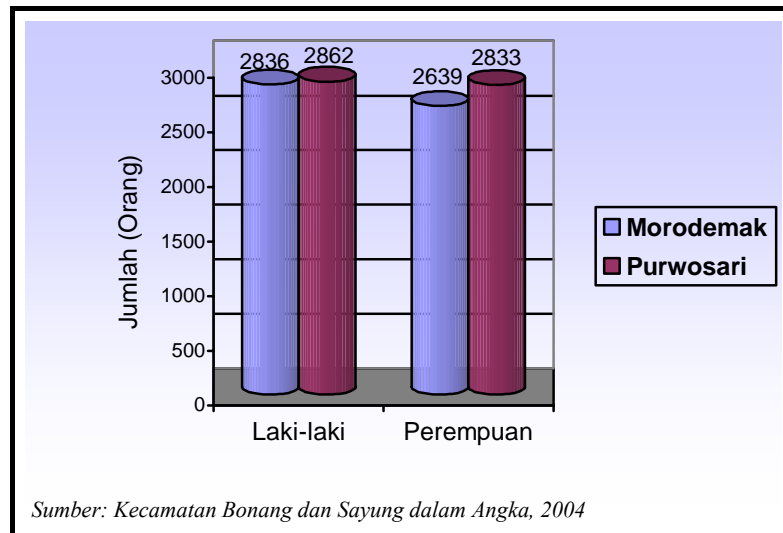
Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan & Penanaman Modal Kabupaten Demak, 2005

3.2 Kondisi Demografis

3.2.1 Kepadatan Penduduk

Pada tahun 2004, jumlah penduduk Desa Morodemak mencapai 5.698 jiwa, terdiri dari 2.836 (49,77%) laki-laki dan 2.862 (50,23%) perempuan dengan

kepadatan penduduk mencapai 1.337 jiwa/km². Pada tahun yang sama jumlah penduduk Desa Purwosari mencapai 5.472 jiwa, terdiri dari 2.639 (49,91%) laki-laki dan 2.833 (50,09%) perempuan dengan kepadatan penduduk mencapai 1.392 jiwa/km².



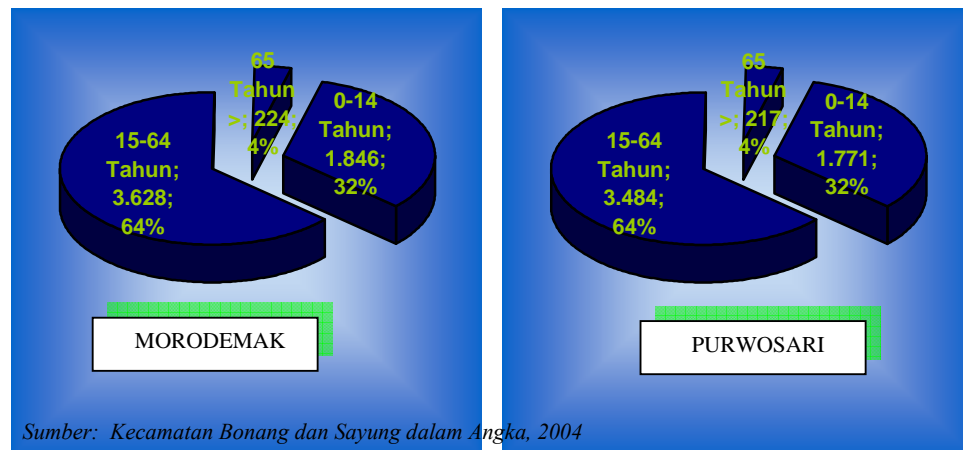
GAMBAR 3.3
JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2004

Angka kepadatan penduduk tersebut melebihi kepadatan penduduk rata-rata Kabupaten Demak tahun 2004, yaitu 1.142 jiwa/km². Dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, berarti kebutuhan akan prasarana perdesaan juga tinggi. Sehingga tatkala penyediaan prasarana perdesaan tidak atau kurang memadai, maka memiliki dampak yang sangat besar terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Lingkungan yang kumuh dan tingkat kemiskinan yang relatif masih tinggi sangat identik dengan keterbatasan prasarana tersebut.

Berdasarkan Rekapitulasi Usulan RMT/KK Miskin Kabupaten Demak Tahun 2005, tercatat jumlah KK miskin di Desa Morodemak 1.320 KK atau 86,11% dari 1.533 KK yang ada, dan jumlah KK miskin di Desa Purwosari 1.121

KK atau 89,75% dari 1.249 KK yang ada (BPS Kabupaten Demak, 2006). Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap rendahnya kemampuan masyarakat dalam menyediakan prasarana perdesaan di lingkungannya.

3.2.2 Mata Pencarian



GAMBAR 3.4
KOMPOSISI USIA KERJA TAHUN 2004

Apabila dilihat komposisi penduduk berdasarkan usianya, maka jumlah usia kerja di kedua desa tersebut sama persentasenya, yaitu 3.628 jiwa (63,67%) di Desa Morodemak dan 3.484 jiwa (63,67%) di Desa Purwosari, dengan angka ketergantungan (*dependency ratio*) juga relatif sama, masing-masing 570,56 dan 570,85. Besarnya angkatan kerja, selain harus diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja juga penyediaan sarana-prasarana yang dapat menunjang aktivitas sosial ekonomi mereka.

Sebagai desa dengan karakteristik pesisir, sebagian besar penduduk Morodemak bekerja di sektor perikanan. Ketergantungan penduduk Morodemak

terhadap sektor ini sangat besar, tercatat jumlah nelayan di Desa Morodemak mencapai 37,18%, petani tambak 5% dan buruh tambak 4,22%.

TABEL III.2
MATA PENCAHARIAN PENDUDUK TAHUN 2004

No.	Mata Pencaharian	Morodemak		Sayung	
		Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
1	Petani sendiri	204	5,00	1.105	33,24
2	Buruh tani	172	4,22	543	16,34
3	Nelayan	1.516	37,18	-	-
4	Pengusaha	22	0,54	-	-
5	Buruh industri	26	0,64	791	23,80
6	Buruh bangunan	113	2,77	312	9,39
7	Pedagang	59	1,45	325	9,78
8	Angkuatan	44	1,08	82	2,47
9	Pegawai Negeri / ABRI	10	0,25	35	1,05
10	Pensiunan	13	0,32	39	1,17
11	Lainnya	1.899	46,57	92	2,77
	Jumlah	4.078	100,00	3.324	100,00

Sumber: Kecamatan Bonang dan Sayung dalam Angka 2004

Pengembangan sektor perikanan di Desa Morodemak ditunjang dengan dibangunnya Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Morodemak yang terletak di desa sebelah, Purworejo. Sebagai PPI terbesar di Kabupaten Demak, PPI Morodemak melayani transaksi hasil perikanan, baik dari nelayan dan petani tambak lokal maupun daerah tetangga.

Nilai produksi ikan yang dijual melalui PPI Morodemak cukup tinggi, yaitu Rp 3.679.220.000,00 pada tahun 2004 (BPS, 2004), angka tersebut tentu sangat kontras bila dibandingkan dengan jumlah KK miskin di atas (86,11%).

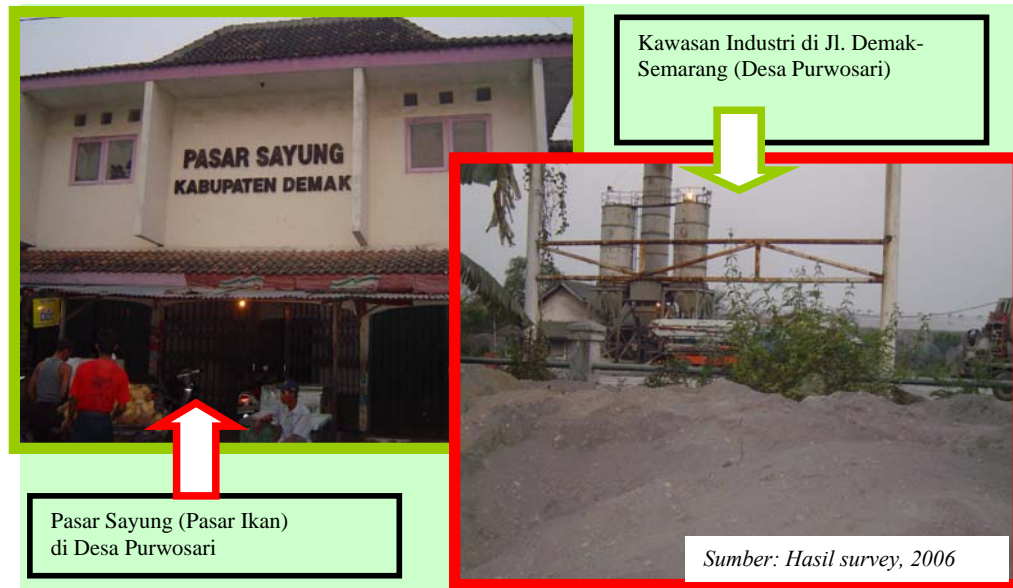
Sebagai ilustrasi, sebagian besar nelayan di Desa Morodemak adalah “*pandega*” atau nelayan yang menjalankan perahu atau kapal-kapal orang lain (*juragan*). Meskipun bukan aturan resmi, namun sistem pembagian hasil antara

juragan dan pandega selalu menempatkan juragan pada posisi yang paling diuntungkan. Untuk perahu kapal juragan memperoleh separoh dari hasil bersih penjualan ikan dan separohnya lagi dibagi oleh seluruh ABK (Anak Buah Kapal) yang berjumlah antara 40 hingga 50 orang; sedang untuk kapal mini, juragan memperoleh 6 kali bagian seorang ABK, di mana sebuah kapal mini biasanya dijalankan oleh sekitar 15 ABK (*Sumber: Ketua Himpunan Tani dan Nelayan Desa Morodemak, 2006*). Fenomena inilah yang memunculkan kelompok-kelompok mampu (*aghniyak*) di Desa Morodemak dari kalangan pemilik perahu kapal ataupun kapal mini.

Kebanyakan pendapatan nelayan belum dapat menutup kebutuhan keluarga, sehingga sebagian istri-istri nelayan berperan membantu suami dengan mencari alternatif kegiatan lain sebagai *bakul* atau tengkulak ikan di PPI, ada juga yang melakukan aktivitas pembuatan ikan asin, ikan panggang, kerupuk udang, terasi, bandeng presto dan sebagainya. Adanya jumlah tenaga kerja riil (4.078 orang) yang lebih besar daripada usia kerja di Morodemak (3.628 orang) juga memberi bukti, bahwa di desa ini banyak anak usia sekolah yang terpaksa harus bekerja sebagai nelayan untuk menopang ekonomi keluarganya.

Sedang Desa Purwosari, meskipun termasuk kawasan pesisir namun tidak seorngpun yang bermata pencaharian nelayan. Akan tetapi aktivitas perikanan dan kelautan masih nampak dengan adanya Pasar Ikan Sayung yang berlokasi di Desa Purwosari, dan banyaknya penduduk yang berprofesi sebagai petani tambak (33,24%) dan sebagai buruh tani tambak (16,34%). Adanya pabrik-pabrik industri

di kawasan ini, mendorong sebagian penduduknya berprofesi sebagai buruh pabrik (23,8%).



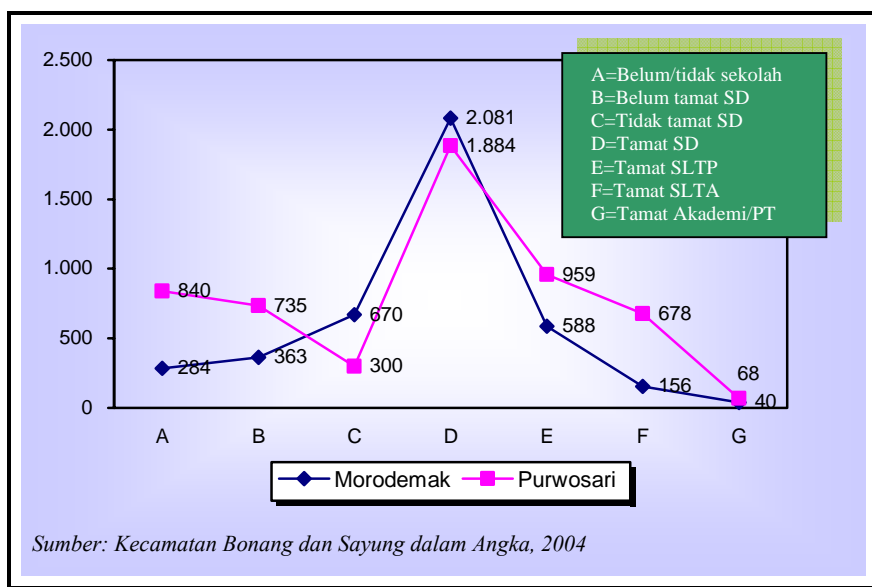
GAMBAR 3.5
PASAR IKAN DAN KAWASAN INDUSTRI
MENANDAI DESA PURWOSARI SEBAGAI DESA KOTA

Besarnya jumlah tenaga kerja pada sektor industri sangat ditunjang dengan adanya beberapa pabrik industri yang berlokasi di Desa Purwosari (tabel III.1) yang banyak menyerap tenaga kerja lokal. Akan tetapi dengan kondisi pendidikan yang sebagian besar hanya tamat SD/ sederajat (gambar 3.4), maka umumnya mereka hanya menjadi tenaga kasar (buruh industri) dengan upah yang rendah, bahkan sebagian besar mereka bekerja dengan sistem kontrak sehingga masa kerja sangat terbatas, tergantung pada kontrak kerja yang ditandatangani dengan pihak perusahaan. Tenaga kerja dengan sistem kontrak ini juga sangat rentan terhadap dampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

3.2.3 Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu unsur yang berpengaruh terhadap perubahan masyarakat. Tingkat pendidikan yang tinggi akan memiliki akses informasi yang tinggi pula. Akses informasi ini selain dapat meningkatkan pengetahuan dan keahlian seseorang, juga mendorong orang untuk lebih mengerti tentang kondisi masyarakatnya (kepekaan sosial).

Umumnya orang dengan pendidikan yang lebih tinggi akan lebih *mobile*, baik secara fisik maupun psikis. Secara fisik mereka akan melakukan aktivitas yang berhubungan dengan wilayah urban, sehingga menerpa menjadi pribadi yang kosmopolit, timbul sikap refleksif terhadap kehidupan yang dialami oleh diri, keluarga dan masyarakat lingkungannya dengan bercermin pada kemajuan yang telah dicapai oleh kelompok masyarakat lain (kota), sehingga secara psikis juga timbul empati untuk melakukan perubahan terhadap lingkungan internalnya.



GAMBAR 3.6
TINGKAT PENDIDIKAN PENDUDUK TAHUN 2004

Namun demikian, sebagaimana terlihat pada gambar 3.4, sebagian besar penduduk di Desa Morodemak maupun Purwosari hanya tamat SD/ sederajat. Kondisi ini kurang menguntungkan bagi kecenderungan ke arah perubahan. Jumlah tamatan akademi/ perguruan tinggi sangat rendah, padahal dari kelompok pendidikan inilah yang paling potensial melakukan langkah-langkah inovatif bagi kemajuan lingkungannya, termasuk di dalamnya yang berhubungan dengan pembangunan sarana prasarana perdesaan.

3.2.4 Pemeluk Agama

Sebagaimana tabel III.3, dari sejumlah 5.698 jiwa penduduk di Desa Morodemak seluruhnya beragama Islam; sedang di Desa Purwosari pemeluk agama Islam mencapai 5.450 (99,6%). Penduduk yang beragama non Islam umumnya para pendatang yang bekerja di wilayah Kecamatan Sayung.

TABEL III.3
JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA TAHUN 2004

No.	Uraian	Morodemak		Purwosari	
		Jml (Jiwa)	(%)	Jml (Jiwa)	(%)
1	Islam	5.698	100,00	5.450	99,60
2	Katolik / Kristen	-	-	22	0,40
3	Hindu	-	-	-	-
4	Budha	-	-	-	-
				-	-
	Jumlah	5.698	100,00	5.472	100,00

Sumber: Kecamatan Bonang dan Sayung dalam Angka 2004

Kenyataan di atas mendorong banyaknya fasilitas-fasilitas dan aktivitas-aktivitas keagamaan dan memperkuat karakteristik kedua desa tersebut sebagai kelompok masyarakat yang sangat agamis.

3.3 Kondisi Sarana dan Prasarana

3.3.1 Prasarana Perdesaan

Di Desa Morodemak, jalan merupakan prasarana yang paling mendapat perhatian pemerintah setempat. Hal ini tercermin dari komposisi proyek-proyek prasarana perdesaan yang sebagian besar teralokasikan untuk kegiatan yang berhubungan dengan jalan. Selain karena jalan merupakan *enablers* yang memungkinkan terjadinya berbagai kegiatan sosial ekonomi, kondisi perkampungan di Desa Morodemak yang acapkali mengalami banjir akibat air pasang naik mendorong perencanaan pembangunan lebih diprioritaskan pada penyediaan prasarana jalan.

TABEL III.4
PROYEK PRASARANA PERDESAAN DI DESA MORODEMAK
TAHUN 1999-2006

No.	Kegiatan	Tahun	Anggaran (Rp)	Sumber	Pelaksana	Swadaya (Rp)
1.	Pembangunan jalan desa	1999/2000	100 juta	PPK	LKMD	-
2.	Pengerasan jalan desa	2001/2002	50 juta	APBD I	Rekanan	-
3.	Pavingisasi jalan desa	2002/2003	50 juta	APBD II	Rekanan	-
4.	Betonisasi jalan desa	2004	300 juta	DAU	Rekanan	-
5.	Betonisasi jalan desa	2006	22 juta	DPD/K	LKMD	-

Sumber: Lurah Desa Morodemak, 2006

Pembangunan jalan di Desa Morodemak seringkali tidak *integrated* dengan penyediaan drainase, sehingga meskipun sebagian besar jalan kampung telah dibetonisasi, namun problem genangan air masih sering dijumpai. Hal ini terjadi karena air hujan/air pasang sulit melimpas ke sungai akibat tidak adanya saluran pembuangan. Beberapa keluarga memang sudah mengupayakan selokan-selokan air di sekitar rumahnya, namun umumnya kurang representatif, selain ukurannya kecil kondisinya juga tidak terawat.

Berdasarkan pengamatan kondisi eksisting, banyak dijumpai ruas-ruas jalan yang mengalami kerusakan, padahal usia pengerjaan baru beberapa tahun. Umumnya jalan-jalan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah melalui kontraktor memiliki kualitas yang relatif lebih rendah dibanding dengan jalan yang dikerjakan oleh LKMD.



GAMBAR 3.7
KONDISI PRASARANA JALAN DI DESA MORODEMAK

Di Desa Morodemak juga belum ada Tempat Pembuangan Sampah (TPS), warga biasanya membuang sampah ke saluran-saluran air. Foto 4 memperlihatkan saluran irigasi pertambakan di Dukuh Tambak Layur Desa Morodemak yang mengalami pendangkalan dan penyempitan akibat pembuangan sampah oleh warga setempat. Kondisi seperti ini juga dapat disaksikan pada dukuh-dukuh yang lain, di mana masyarakatnya memiliki kebiasaan yang sama, membuang sampah pada saluran-saluran irigasi dan bantaran tambak belakang rumah.

Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, beberapa keluarga telah membuat sumur artesis. Selain untuk keperluan MCK keluarga, mereka umumnya juga menjadikannya sebagai sumber pendapatan, yaitu dengan menyalurkannya kepada tetangga sekitar dengan imbalan antara Rp 2.000,00 hingga Rp 2.500,00 per jam. Sedang untuk kebutuhan air minum sebagian besar masyarakat Desa Morodemak membeli air mineral dengan harga antara Rp 2.500,00 hingga Rp 3.000,00 perdirigennya. Dengan demikian, biaya yang harus dikeluarkan oleh penduduk untuk kebutuhan air bersih setiap harinya cukup besar. Hal ini merupakan beban tersendiri bagi keluarga yang tergolong miskin.

TABEL III.5
PROYEK PRASARANA PERDESAAN DI DESA PURWOSARI
TAHUN 1999-2006

No.	Kegiatan	Tahun	Anggaran (Rp)	Sumber	Pelaksana	Swadaya (Rp)
1.	Darinase/pondasi talud	2003	50 juta	APBD II	Rekanan	-
2.	Betonisasi	2004	50 juta	APBD II	Rekanan	-
3.	Pelebaran sungai (<i>flood way</i>)	2004	-	APBN	Rekanan	-
4.	Pengaspalan jalan	2003-2006	-	APBD II	Rekanan	-
5.	Pondasi pagar makam Dk. Purwosari Tengah	2005	7 juta	APBDes	Pemdes	-
6.	Tangga makam Dk. Deles	2005	1,5 juta	APBDes	LKMD	-
7.	Pondasi makam Dk. Purworejo	2005	4 juta	APBDes	LKMD	-
8.	Drainase Dk. Setro Kidul	2005	13 juta	APBDes	LKMD	-
9.	Tanggul DAM (Sungai Kaum)	2005	3 juta	APBDes	Pemdes	-
10.	Pengerukan saluran	2005	2 juta	APBDes	Pemdes & LKMD	-

Sumber: Lurah Desa Purwosari, 2006

Dibanding Desa Morodemak, prasarana perdesaan di Desa Purwosari relatif lebih variatif, meskipun kondisinya juga belum memadai. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kegiatan proyek prasarana perdesaan pada tabel III.5, di

mana selain pengaspalan jalan, dijumpai pula alokasi anggaran untuk drainase, talud, peninggian tanggul dan pengerukan saluran. Sebagai kawasan yang juga mengalami rembasan air rob, proyek-proyek dengan anggaran yang relatif kecil melalui APBDes tersebut hanya bersifat penanggulangan.

Beberapa ruas jalan mengalami kerusakan. Foto 6 memperlihatkan kondisi jalan aspal menuju Dukuh Tambaksari yang dibangun oleh Pemerintah Daerah melalui kontraktor dengan dana APBD Kabupaten Tahun 2005.

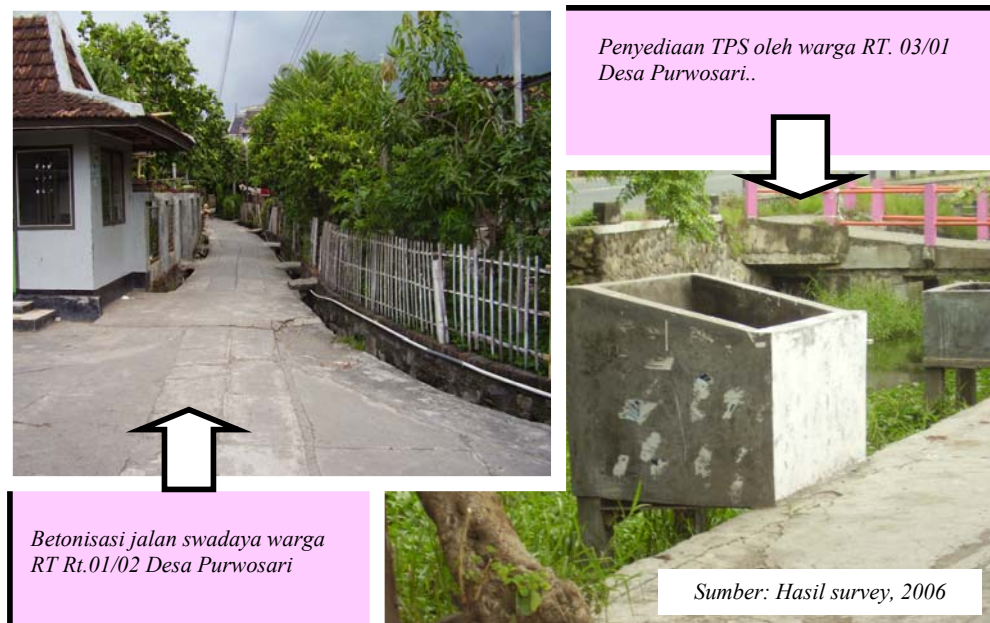


GAMBAR 3.8
KONDISI PRASARANA JALAN DAN IRIGASI
DI DESA PURWOSARI

Sungai di sepanjang jalan depan Kantor Kecamatan Sayung juga mengalami pendangkalan akibat tanaman liar yang tidak ada penanganan, ditambah berdirinya beberapa PKL dan bengkel-bengkel kendaraan bermotor yang masuk ke bantaran sungai menyebabkan terjadinya penyempitan sungai tersebut. Apabila

hal ini dibiarkan, maka lambat laun dapat mengakibatkan meluapnya air hujan ke lahan-lahan perkampungan.

Pada beberapa RT, pembangunan jalan kampung dan penyediaan TPS dilakukan dengan swadaya masyarakat. Penggalangan swadaya dilakukan oleh Pengurus RT setempat tanpa melalui perencanaan dan koordinasi Pemerintahan Desa. Dari foto 8 terlihat bahwa pembangunan jalan yang dilakukan dengan swadaya masyarakat ini sekaligus terpadu dengan pembuatan selokan air dan limbah. Namun sayang tidak semua perkampungan di Desa Purwosari kondisi fisik bangunannya seperti ini.



GAMBAR 3.9
PEMBANGUNAN PRASARANA OLEH MASYARAKAT
DI DESA PURWOSARI

3.3.2 Sarana Prasarana Keagamaan

Jika pada tabel III.4 dan III.5, tidak terlihat adanya swadaya masyarakat guna menunjang program-program pemerintah, maka hal yang sebaliknya terjadi

pada penyediaan sarana prasarana keagamaan. Penyediaan sarana prasarana keagamaan ini sangat mengandalkan swadaya masyarakat. Banyaknya sarana prasarana keagamaan yang dibangun di kawasan ini membuktikan bahwa masyarakat Desa Morodemak maupun Desa Purwosari sangat menaruh perhatian terhadap sarana prasarana keagamaan.

3.3.2.1 Fasilitas Ibadah

Fasilitas peribadatan yang ada di Desa Morodemak dan Desa Purwosari meliputi Masjid dan Musholla/Langgar/Surau. Selain menjadi tempat untuk menjalankan ibadah sholat. Keberadaan masjid dan musholla seringkali dijadikan sebagai media interaksi antar sesama warga. Berbagai persoalan yang berhubungan dengan kepentingan umat seringkali dibahas di tempat-tempat ibadah ini. Para pemuka agama, biasanya memanfaatkan forum jamaah sebagai media untuk menyampaikan berbagai informasi yang dianggap penting untuk diketahui dan dimintakan pendapat dan dimusyawarahkan dengan warga masyarakat, termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan sarana prasarana keagamaan.

TABEL III.6
JUMLAH FASILITAS IBADAH TAHUN 2004

No	Fasilitas	Morodemak	Purwosari	Keterangan
1.	Masjid	2 buah	4 buah	
2.	Musholla	9 buah	11 buah	

Sumber: Kecamatan Bonang dan Sayung dalam Angka 2004

Kegiatan belajar Al-Quran selain dilakukan di rumah-rumah Ustadz/ustadzah dan pondok pesantren, sebagian juga dilakukan di masjid-masjid atau musholla-musholla. Begitu pula kegiatan majlis taklim dan jamiyah-jamiyah

keagamaan seperti jamiyah yasinan, jamiyah surat ikhlas, jamiyah tahlil, dan sebagainya selain dilakukan secara bergilir ke rumah-rumah penduduk juga dilakukan di masjid-masjid dan musholla-musholla ini. Dengan demikian masjid dan musholla benar-benar melekat dengan aktivitas keseharian penduduk (*community friendly*).



Keterangan A: Musholla Baitul Mujahidin di Desa Morodemak, B: Masjid Baitul Attiq di Desa Morodemak
C: Majid Al-Muttaqin di Desa Purwosari, dan D: Masjid At-Taqwa di Desa Purwosari

GAMBAR 3.9 **FASILITAS IBADAH DI DESA MORODEMAK DAN PURWOSARI**

Beberapa Masjid dan Musholla di kedua Desa tersebut dibangun cukup megah. Hal ini tentu sangat menyerap dana yang cukup besar dari warga masyarakat. Dengan konsep shodaqoh, infaq, zakat, jariyah, dan amal saleh, para pemuka agama melakukan himbauan dan ajakan kepada warga msayarakat agar

turut menyumbangkan sebagian dari harta benda mereka, tenaga dan pikiran mereka bagi pembangunan fasilitas ibadah tersebut.

3.3.2.2 Fasilitas Pendidikan Agama

Selain fasilitas ibadah berupa masjid dan musholla, untuk menunjang kegiatan keagamaan di Desa Morodemak dan Desa Purwosari juga banyak dibangun madrasah dan pesantren. Kedua lembaga tersebut diperuntukkan bagi pendalaman ilmu agama. Di Madrasah Aliyah (MA), Madrasah Tsanawiyah (MTs, Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Roudlatul Athfal (RA), kurikulum agama diajarkan terpadu dengan kurikulum pendidikan umum. Sedang di Tempat Pendidikan Al-Quran (TPQ) dan Madrasah Diniyah khusus mengkaji tentang ilmu-ilmu agama.

TABEL III.7
JUMLAH FASILITAS PENDIDIKAN AGAMA TAHUN 2004

No	Fasilitas	Morodemak	Purwosari	Keterangan
1.	Madrasah	5 buah	12 buah	
2.	Pondok Pesantren	3 buah	3 buah	

Sumber: Kecamatan Bonang dan Sayung dalam Angka 2004

Jika di TPQ siswa dididik untuk dapat membaca dan memahami kandungan Al-Quran, maka di Madrasah Diniyah, selain ilmu tentang Al-Quran juga diajarkan kepada siswa tentang ilmu-ilmu tentang: aqidah akhlaq, fiqih, shorof, lughot, kholashoh dan sebagainya. Sedang di pesantren pengkajian ilmu agama lebih dalam lagi, yaitu yang sering disebut sebagai pendalaman kitab-kitab kuning.

BAB VI
MODEL KOMUNIKASI PEMBANGUNAN
DALAM PENYEDIAAN PRASARANA PERDESAAN
DI KAWASAN PESISIR UTARA JAWA TENGAH

4.1 Identifikasi Karakteristik Masyarakat, Peran Agen Perubahan, Efektivitas Penyuluhan, dan Perhatian Masyarakat

Penerapan model komunikasi pembangunan apapun tidak akan efektif apabila tidak disesuaikan dengan berbagai ragam karakteristik masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan komunikasi. Masyarakat pesisir tentu memiliki karakteristik tersendiri yang membedakan dengan kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Identifikasi karakteristik masyarakat pelaku komunikasi akan sangat bermanfaat dalam merumuskan suatu pengembangan model yang sesuai dengan kondisi masyarakat, terutama dalam menemukan kelompok-kelompok potensial dalam melakukan langkah-langkah perubahan.

Tokoh-tokoh masyarakat baik formal maupun informal umumnya adalah kelompok potensial dalam melakukan berbagai prakarsa dan langkah perubahan melalui suatu kegiatan komunikasi yang dapat mengarahkan komunitas di lingkungannya untuk bersama-sama mengatasi berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan bersama (*public interest*) dengan suatu kegiatan pembangunan. Sebagai agen perubahan (*change agents*) di desa, peran mereka bukan semata-mata ditentukan oleh kemampuan individualnya, melainkan juga dipengaruhi oleh legitimasi dan sikap pandang masyarakat terhadap pemimpin-pemimpin mereka, serta ada tidaknya peluang dan ruang partisipasi (*public sphere*) bagi mereka untuk mengekspresikan dan mengartikulasikan peran tersebut dalam proses pembangunan. Karena itulah dalam pengembangan model

komunikasi penyediaan prasarana perdesaan, perlu diidentifikasi pula sejauhmana peran agen perubahan di lokasi penelitian.

Identifikasi efektivitas penyuluhan diperlukan untuk mengetahui apakah teknik-teknik komunikasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah selama ini sudah sesuai dan efektif mendorong partisipasi masyarakat. Ada beberapa teknik komunikasi pembangunan yang perlu diidentifikasi, di antaranya teknik komunikasi dua tahap (*two step flow communications*), teknik komunikasi persuasif, teknik komunikasi dua arah/dialogis dan teknik komunikasi deliberatif. Teknik-teknik tersebut secara konseptual sangat sesuai dengan kondisi dan karakteristik masyarakat perdesaan.

Selanjutnya identifikasi perhatian masyarakat dimaksudkan untuk mengetahui pola kecenderungan bentuk-bentuk partisipasi yang menjadi perhatian dan dilakukan oleh masyarakat dalam kegiatan penyediaan prasarana di lingkungannya. Dengan mengetahui pola kecenderungan bentuk-bentuk partisipasi yang menjadi perhatian masyarakat akan bermanfaat dalam mengambil langkah-langkah operasional berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam penyediaan prasarana perdesaan.

4.1.1 Karakteristik Masyarakat Pelaku Komunikasi

Penyediaan prasarana perdesaan merupakan bagian dari ikhtiar pembangunan untuk memperoleh terjadinya perubahan-perubahan dalam masyarakat, yaitu peningkatan kesejahteraan melalui pemenuhan kebutuhan prasarana dasar yang dapat menunjang aktivitas sosial ekonomi. Dalam proses penyediaan prasarana perdesaan senantiasa dibutuhkan adanya partisipasi

masyarakat; sedang partisipasi hanya dapat terjadi apabila masyarakat memiliki sikap mental yang mendukung terhadap upaya perubahan tersebut.

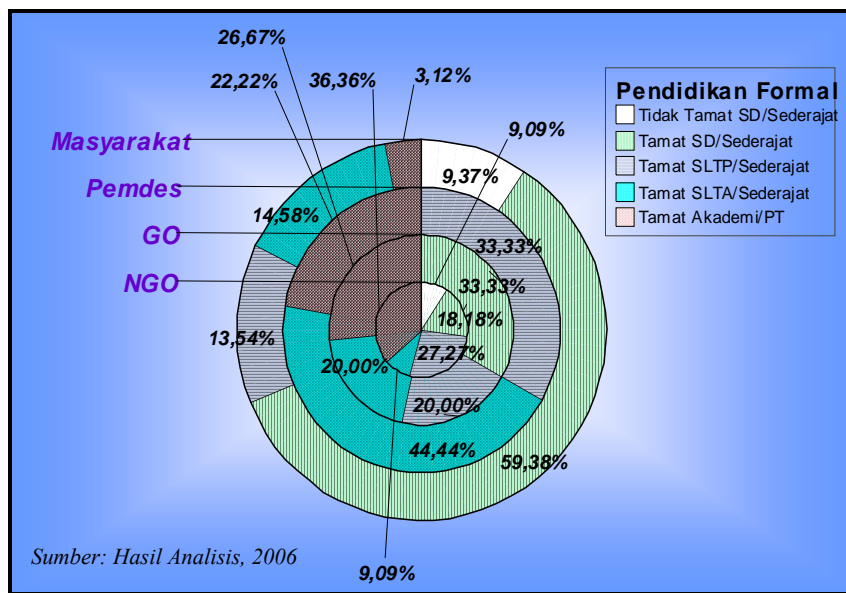
Dengan mengidentifikasi aspek-aspek yang menjadi indikator kecenderungan ke arah perubahan, maka dapat dilakukan pemetaan agen-agen perubahan yang berpengaruh dalam mendorong partisipasi masyarakat. Merujuk teori *Propensity of Change* Lerner (Nasution, 2002:108), ada beberapa indikator kecenderungan ke arah perubahan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengidentifikasi karakteristik pelaku komunikasi, yaitu: 1) aspek pendidikan, meliputi indikator tingkat pendidikan formal dan informal; 2) aspek mobilitas, meliputi indikator tempat kerja dan tingkat keseringan ke luar kota; 3) aspek akses media, meliputi indikator kepemilikan media massa, jenis muatan media yang disukai, minat terhadap informasi pembangunan; 4) aspek keorganisasian, dilihat dari indikator keikutsertaan dalam organisasi masyarakat; dan 5) aspek pendapatan yang dilihat dari indikator pendapatan rata-rata tiap bulan.

Analisis karakteristik masyarakat pelaku komunikasi didasarkan pada hasil rangkuman jawaban keseluruhan responden di kedua lokasi penelitian, yaitu sejumlah 142 responden terdiri dari 96 responden unsur masyarakat, 9 responden unsur pemerintahan desa, 15 responden unsur organisasi pemerintah dan 22 responden unsur organisasi non pemerintah.

1. Aspek Pendidikan

Aspek pendidikan yang menjadi dasar analisis karakteristik masyarakat meliputi pendidikan formal dan informal. Gambar 4.1 menyajikan komposisi responden berdasarkan tingkat pendidikan formalnya. Dapat dilihat, bahwa rata-

rata para pemimpin di lokasi penelitian memiliki pendidikan lebih tinggi dibanding masyarakatnya. Jumlah tamatan akademi/ perguruan tinggi unsur masyarakat hanya 3,12%, sedang unsur pemerintahan desa, tokoh organisasi pemerintah dan tokoh organisasi non pemerintah masing-masing 22,22%, 26,67% dan 36,36%. Pada sisi yang lain, responden unsur masyarakat yang hanya tamat SD/ sederajat cukup tinggi yaitu 59,38%, sedang unsur pemerintahan desa, tokoh organisasi pemerintah dan tokoh organisasi non pemerintah masing-masing 0%, 33,33% dan 18,18%.



GAMBAR 4.1
PENDIDIKAN FORMAL PELAKU KOMUNIKASI

Dapat diidentifikasi pula adanya responden unsur organisasi non pemerintah yang tidak tamat SD/ sederajat (9,09%). Data ini memberi petunjuk karakteristik masyarakat pesisir dalam menilai pemimpin mereka, di mana ketokohan seseorang dalam organisasi non pemerintah (tokoh informal) tidak selalu dilihat dari aspek pendidikan formalnya; sedang untuk tugas-tugas

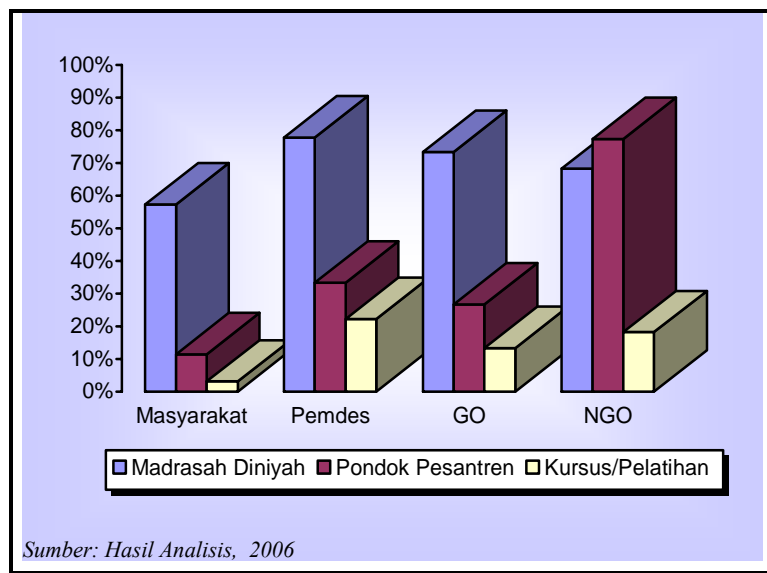
pemerintahan desa dan organisasi pemerintah, masyarakat masih mempertimbangkan pendidikan formal seseorang.

Selanjutnya, diketahui bahwa responden unsur organisasi non pemerintah yang tidak tamat SD/ sederajat adalah berasal dari Desa Morodemak. Hal ini memberi petunjuk, bahwa dependensi masyarakat terhadap tokoh informal di desa ini terkadang menghilangkan daya kritisnya, karena penokohan terhadap pemimpin informal tidak terlalu memperhatikan pengetahuan umum seseorang. Sedang di Desa Purwosari penokohan masyarakat terhadap pemimpin informal masih memperhatikan kapasitas pengetahuan seseorang, sehingga dependensi terhadap para pemimpin informal tidak mengurangi daya kritis mereka.

Meskipun pendidikan formal tidak menjadi ukuran bagi ketokohan informal seseorang, tetapi ada kecenderungan legitimasi masyarakat terhadap seorang tokoh di kedua desa lokasi penelitian masih sangat disandarkan pada kredibilitas keagamaannya. Kriteria demikian terlihat dari sosok para ulama yang memimpin organisasi keagamaan, baik sebagai ketua jamiyah, majlis taklim ataupun imam masjid/musholla di lingkungannya.

Data pada gambar 4.2 memperkuat asumsi di atas. Terlihat sebagian besar tokoh-tokoh organisasi non pemerintah pernah menempuh atau menyelesaikan pendidikan informalnya di madrasah diniyah (68,18%). Sebagian besar juga telah menempuh pendalaman ilmu agama di pondok pesantren (77,27%). Persentase kedua ini bahkan melebihi rata-rata pendidikan informal unsur masyarakat, pemerintahan desa, dan tokoh organisasi pemerintah di pondok pesantren, yaitu masing-masing 11,46%, 33,33% dan 26,67%.

Sekalipun tidak seketat kriteria untuk tokoh-tokoh ulama, namun kebiasaan seseorang dalam bidang agama masih menjadi pertimbangan masyarakat untuk memilih pemimpin-pemimpin mereka pada jabatan-jabatan formal di pemerintahan desa dan organisasi pemerintah. Hal ini ditunjukkan bahwa sebagian besar responden dari unsur pemerintahan desa pernah menempuh atau menamatkan pendidikan dasar keagamaan di Madrasah Diniyah (77,78%), dan sebagian dari mereka pernah menempuh pendidikan agama di pesantren (33,33%).



GAMBAR 4.2
PENDIDIKAN INFORMAL PELAKU KOMUNIKASI

Demikian pula, banyaknya masyarakat yang pernah menempuh pendidikan di Madrasah Diniyah (72,92%) dan sebagian mendalami ilmu agama di pesantren (11,46%) semakin memperkuat karakteristik mereka sebagai masyarakat yang agamis. Kondisi demikian ditunjang oleh banyaknya lembaga-lembaga pendidikan agama di lokasi penelitian yang membuka kesempatan bagi masyarakat setempat bahkan para pelajar dan santri dari luar daerah untuk

memperoleh bimbingan dan pengajaran ilmu agama dari para kyai/ulama dan ustadz/ustadzah di lembaga-lembaga tersebut.

Sebagai ilustrasi, anak-anak di kedua desa lokasi penelitian sudah terbiasa mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah pada sore hari, setelah pada pagi harinya mengikuti pendidikan formal di SD/MI atau SLTP/MTs. Kemudian pada malam harinya – setelah sholat Mahgrib - mereka belajar Al-Qur'an kepada ustadz/ustadzah di musholla/masjid, pesantren dan sebagainya dilakukan di rumah-rumah ustadz/ustadzah bersangkutan. Sebagian dari mereka masih melanjutkan kegiatan pendalaman agama (*kitab kuning*) di pesantren-pesantren, dengan jadwal pengajaran yang beragam. Ada yang dilakukan setelah sholat subuh, sholat isya, atau menjelang maghrib.

2. Aspek Mobilitas

Mobilitas dalam Teori Lerner dianggap sebagai faktor utama terjadinya urbanisasi. Urbanisasi dalam konteks ini lebih dipahami sebagai sikap mental seseorang terhadap orientasi kota, yaitu menjadikan kondisi perkotaan sebagai referensi untuk melakukan perubahan dan pembangunan di desanya.

Mobilitas masyarakat dapat dilihat dari indikator tempat kerja dan tingkat keseringan bepergian ke luar daerah. Untuk memperoleh gambaran tentang tingkat mobilitas pelaku komunikasi dapat dilihat pada tabel IV.1. Berdasarkan tabel tersebut, sebagian besar responden bekerja di lingkungan desanya sendiri, sehingga mereka lebih memiliki waktu untuk dapat berpartisipasi di lingkungannya. Namun demikian, tingkat keseringan ke luar daerah yang rendah, baik dari unsur masyarakat, pemerintahan desa, tokoh organisasi pemerintah

maupun tokoh organisasi non pemerintah kurang memberi kontribusi bagi terjadinya mobilitas psikis yang sangat diperlukan bagi langkah perubahan.

TABEL IV.1
MOBILITAS PELAKU KOMUNIKASI

Aspek	Jenis	Pelaku Komunikasi			
		Masyarakat	Pemdes	GO	NGO
Tempat Kerja	Lingkup desa	77,08%	66,67%	66,67%	72,73%
	Lingkup kecamatan	5,21%	22,22%	20,00%	18,18%
	Lingkup kabupaten	4,17%	0,00%	13,33%	9,09%
	Luar kabupaten	13,54%	11,11%	0,00%	0,00%
Tingkat keseringan ke luar daerah	Sangat sering	13,54%	11,11%	0,00%	0,00%
	Sering	2,08%	11,11%	6,67%	9,09%
	Cukup sering	5,21%	22,22%	20,00%	18,18%
	Kadang-kadang	79,17%	55,56%	73,33%	72,73%
	Tidak pernah	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

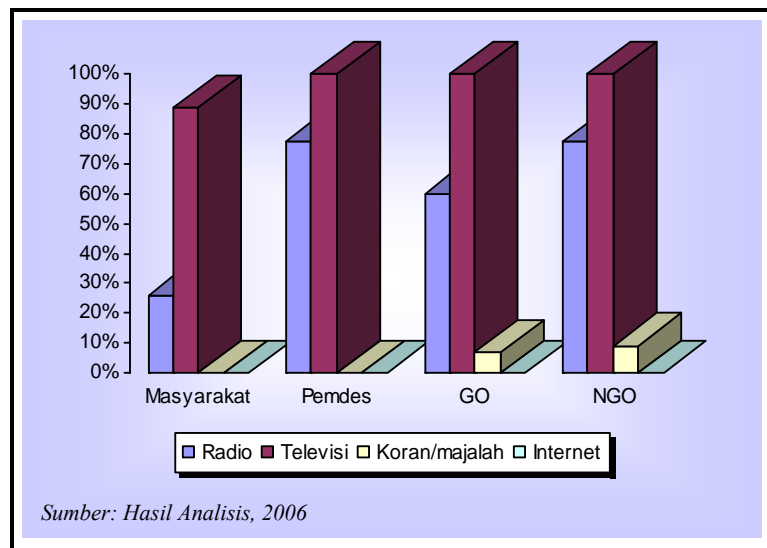
Sumber: Hasil Analisis, 2006

Sebagaimana pendapat Lerner, bahwa untuk bisa menjadi modern, anggota masyarakat harus memiliki mobilitas dalam arti fisik maupun psikis (Nasution, 2002:108). Mobilitas fisik berarti kebergerakan anggota masyarakat termasuk dalam arti perpindahan dari desa ke kota. Sedang mobilitas psikis berarti bergerakaknya seseorang dalam arti kejiwaan, yaitu timbulnya rasa empati untuk membangun lingkungannya setelah mengamati kondisi daerah lain. Seringnya orang mengamati kondisi prasarana di daerah lain dapat mendorong timbulnya empati untuk membangun prasarana yang lebih baik di daerahnya sendiri.

Meskipun mobilitas penduduk di kedua lokasi penelitian tergolong rendah, namun penduduk Desa Purwosari relatif lebih *mobile* dibanding penduduk Desa Morodemak. Hal ini disebabkan karena cukup banyaknya penduduk Purwosari yang bekerja pada sektor kota (buruh industri, angkutan, dll.), sebagaimana terlihat pada tabel III.2.

3. Aspek Akses Media

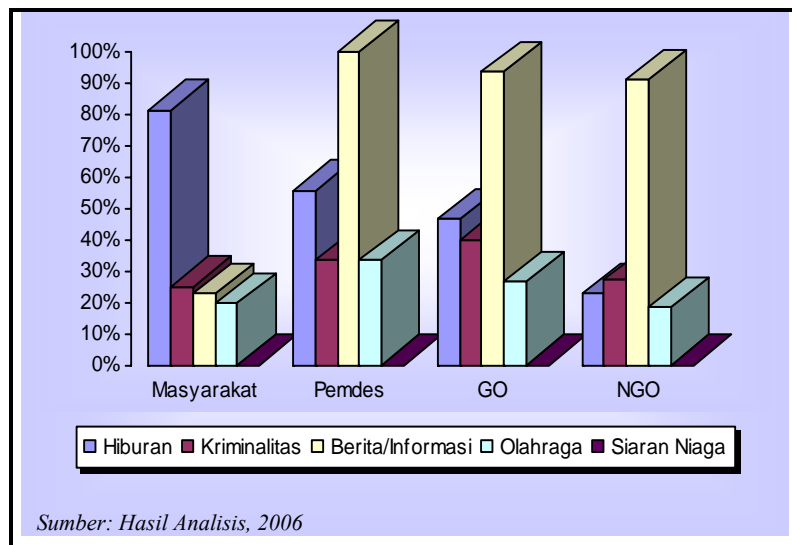
Berdasarkan gambar 4.3, sebagian besar pelaku komunikasi di lokasi penelitian telah memiliki media massa sebagai saluran informasi. Televisi adalah jenis media massa yang paling banyak dimiliki oleh pelaku komunikasi, baik dari unsur pemerintahan desa, tokoh organisasi pemerintah (GO) maupun tokoh organisasi non pemerintah (NGO), disusul kemudian radio. Koran/majalah hanya dikonsumsi oleh sebagian kecil pelaku komunikasi dari unsur tokoh organisasi pemerintah dan organisasi non pemerintah. Sedang media internet merupakan media yang belum terakses sama sekali oleh pelaku komunikasi.



GAMBAR 4.3
KEPEMILIKAN MEDIA MASSA

Terdapat perbedaan jenis muatan media massa yang disukai oleh masing-masing pelaku komunikasi (gambar 4.4). Masyarakat lebih menjadikan media massa terutama televisi sebagai sarana untuk memperoleh hiburan daripada informasi/pengetahuan. Sedang para pemimpin masyarakat, baik dari unsur

pemerintahan desa, tokoh organisasi pemerintah maupun tokoh organisasi non pemerintah telah menjadikan media massa sebagai sarana utama untuk memperoleh berita/informasi, selain sebagai sarana hiburan atau informasi seputar kriminalitas dan olahraga. Siaran niaga bukan termasuk muatan media massa yang disukai oleh pelaku komunikasi.

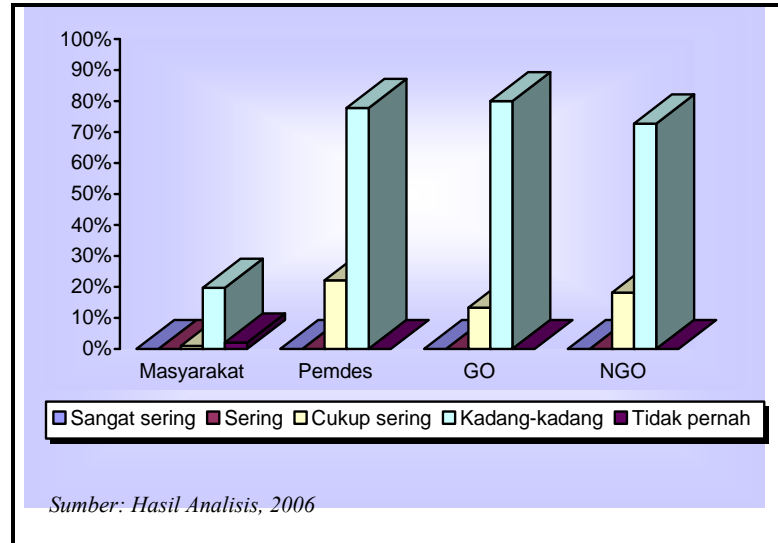


GAMBAR 4.4
MUATAN MEDIA MASSA YANG DISUKAI

Data tersebut membuktikan, bahwa penyebaran pesan pembangunan melalui media massa tanpa diimbangi dengan kegiatan komunikasi secara interpersonal (*face to face*) tidak akan efektif. Hasil penelitian Rogers menunjukkan, bahwa media massa hanya efektif untuk mengubah pengetahuan sasaran, sedang saluran interpersonal sangat efektif untuk mengubah sikap sasaran, terutama untuk masyarakat perdesaan (Rogers, 1969:125). Media massa memang memungkinkan penyebaran pesan mencapai *audience* dalam jumlah

besar, namun menurut Coleman, Katz, Menzel, dan Arndt, saluran impersonal (media massa) kurang efektif dibanding saluran interpersonal (Brown, 1977:2-4).

Di antara mereka yang menyukai berita/informasi mendalam, mengaku kadang-kadang saja menonton atau membaca informasi yang berhubungan dengan pembangunan perdesaan (gambar 4.5). Ada beberapa kemungkinan, mengapa informasi pembangunan perdesaan jarang mereka konsumsi: 1) Porsi tayangan atau muatan berita tentang pembangunan perdesaan dalam media massa sedikit; 2) mereka lebih banyak memperoleh informasi tentang pembangunan perdesaan dari saluran interpersonal yaitu dari forum-forum komunikasi; 3) mereka lebih menyukai berita/laporan mendalam tentang masalah lain. Tetapi dalam posisinya sebagai pemimpin masyarakat, asumsi ketiga sangat kecil kemungkinannya.



GAMBAR 4.5
TERPAAN INFORMASI PEMBANGUNAN PERDESAAN

Sesuai dengan Teori Lerner, maka dari aspek partisipasi media sebenarnya para pemimpin masyarakat lebih cenderung dapat melakukan perubahan di

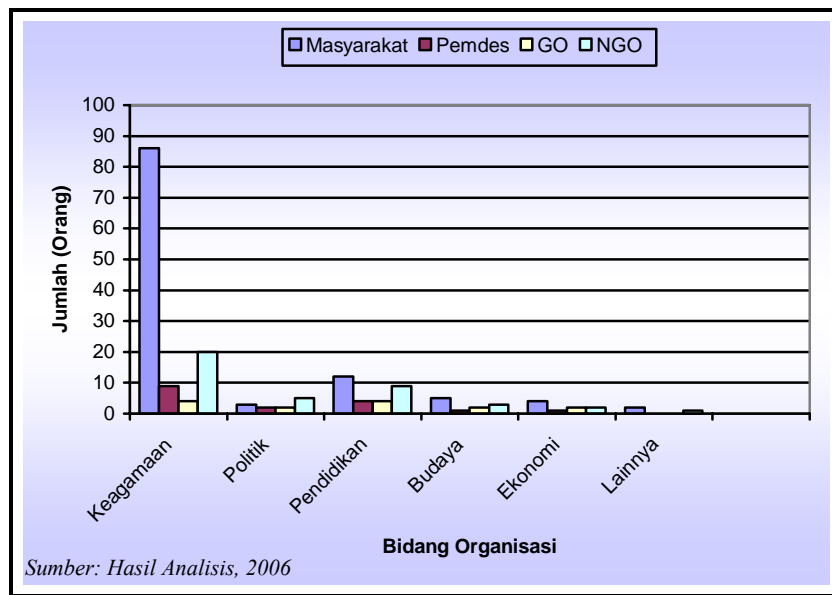
banding rata-rata masyarakatnya, sehingga dalam proses komunikasi pembangunan sudah sepatutnya mereka ditempatkan sebagai agen-agen perubahan di lingkungannya. Akan tetapi sangat disayangkan, terpaan informasi tentang pembangunan perdesaan yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam melakukan langkah-langkah inovatif bagi pembangunan di desanya sangat sedikit mereka terima. Dengan demikian saluran-saluran komunikasi yang bersifat interpersonal (*face to face*) seperti forum komunikasi/forum warga sangat menjadi tumpuan dalam rangka memperoleh informasi tentang pembangunan perdesaan.

4. Aspek Keorganisasian

Lembaga kemasyarakatan (*civil society*) merupakan media interaksi dan komunikasi tentang ide-ide inovatif dalam rangka melakukan berbagai langkah perubahan bagi lingkungannya, sehingga keterlibatan seseorang dalam lembaga atau organisasi kemasyarakatan menjadi salah satu indikator kecenderungan ke arah perubahan. Lembaga-lembaga kemasyarakatan tersebut dapat berbentuk lembaga keagamaan, ekonomi, politik, pendidikan, sosial budaya, dan sebagainya.

Berdasarkan gambar 4.6, dapat dilihat bahwa organisasi kemasyarakatan yang diikuti oleh responden sebagian besar adalah organisasi di bidang keagamaan, disusul kemudian organisasi pendidikan. Dari kelompok pimpinan, tokoh organisasi non pemerintah merupakan tokoh yang relatif lebih aktif di bidang politik dibanding tokoh masyarakat dari unsur pemerintahan desa maupun organisasi pemerintah. Keaktifan tokoh-tokoh informal pada kegiatan politik di satu sisi dapat dijadikan sebagai saluran untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat; namun pada sisi yang lain ikatan paternalistik yang sangat kental

pada masyarakat pedesaan selain efektif untuk memobilisasi masyarakat bagi kegiatan pembangunan juga sensitif terhadap kerawanan-kerawanan politis.



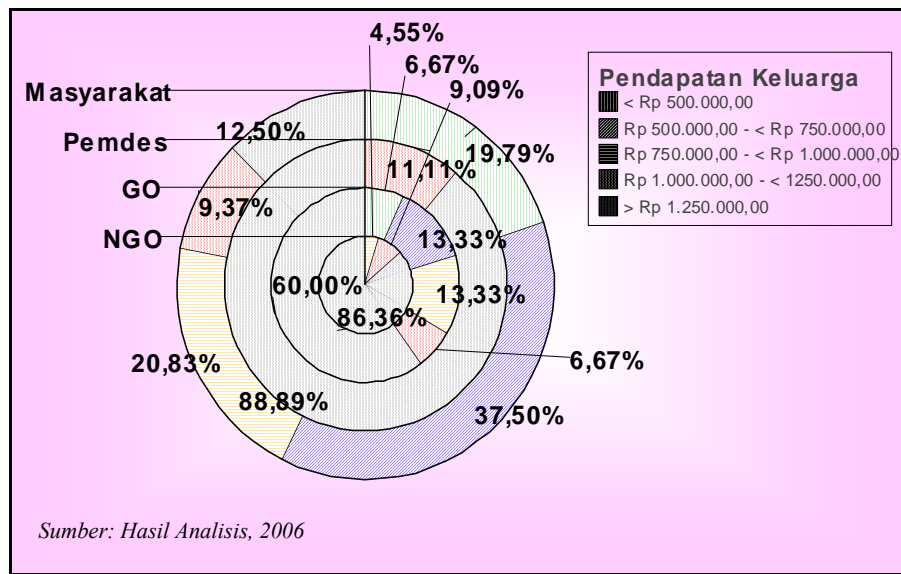
GAMBAR 4.6
AKTIVITAS KEORGANISASIAN

5. Aspek Pendapatan

Pendapatan juga merupakan aspek penting untuk menggambarkan karakteristik masyarakat, karena pendapatan sangat berpengaruh terhadap aspek-aspek yang lain. Dengan pendapatan yang memadai seseorang akan lebih memiliki peluang untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi, memilih media massa yang diinginkan, dan melakukan aktivitas-aktivitas yang lain.

Berdasarkan gambar 4.7, para pemimpin di lokasi penelitian cenderung memiliki pendapatan yang lebih tinggi dibanding pendapatan rata-rata masyarakat. Sebagian besar masyarakat berpendapatan rata-rata antara Rp 500.000,00 hingga Rp 750.000,00 perbulannya (37,5%); sementara para

pemimpin mereka baik dari unsur pemerintahan desa, organisasi pemerintah maupun organisasi non pemerintah berpendapatan rata-rata di atas Rp 1.250.000,00, masing-masing 88,89%, 60%, dan 86,36%.



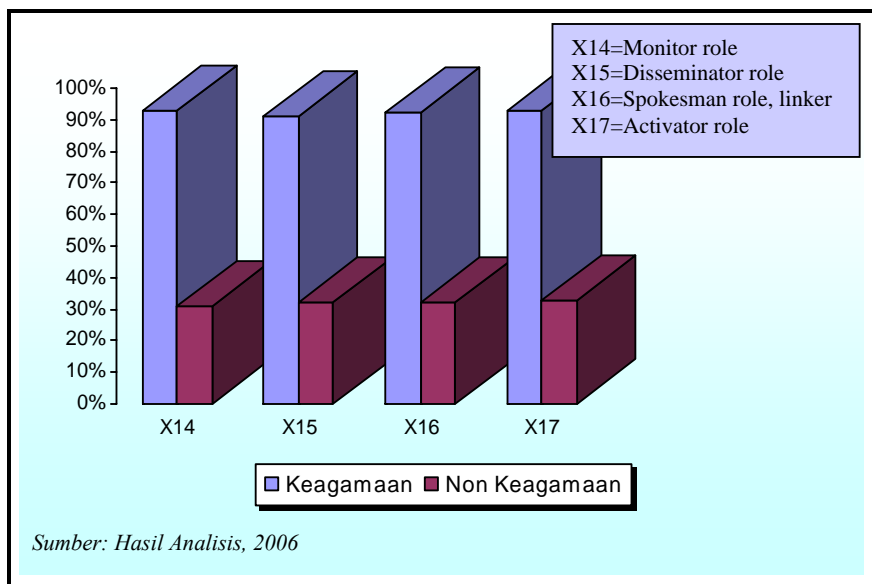
GAMBAR 4.7
PENDAPATAN RATA-RATA PELAKU KOMUNIKASI

Mengacu pada Teori Lerner, maka dengan pendapatan yang relatif lebih tinggi dibanding pendapatan rata-rata masyarakatnya, tokoh-tokoh masyarakat lebih berpotensi untuk dapat melakukan perubahan bagi kemajuan lingkungannya.

4.1.2 Identifikasi Peran Agen Perubahan

Memperhatikan indikator kecenderungan ke arah perubahan pada analisis sebelumnya yang lebih mewarnai para pemimpin daripada masyarakatnya, maka sudah sepatutnya para pemimpin di desa, baik pejabat formal, tokoh organisasi pemerintah maupun tokoh organisasi non pemerintah diberi peran yang lebih besar sebagai komunikator lokal untuk mempengaruhi masyarakat di lingkungannya.

Tokoh-tokoh masyarakat, baik formal maupun informal merupakan agen-agen perubahan di desa. Mereka sebenarnya adalah pemuka pendapat (*opinion leaders*) yang sangat besar perannya dalam menginterpretasikan dan mewarnai penerimaan pesan (Mulyana, 2005:105), terutama pada masyarakat tradisional atau perdesaan (Susanto, 1977a:11). Melalui kegiatan komunikasi pembangunan mereka dapat mempengaruhi masyarakat menuju ke arah perubahan yang diharapkan dengan bahasa dan cara yang dapat dimengerti oleh komunikannya.



GAMBAR 4.8
PERAN AGEN PERUBAHAN

Berdasarkan gambar 4.8 dapat dijelaskan, bahwa dalam pandangan masyarakat peran tokoh-tokoh yang mereka segani dalam proses kegiatan komunikasi penyediaan prasarana perdesaan non keagamaan relatif lebih rendah dibanding peran mereka dalam proses komunikasi penyediaan sarana prasarana keagamaan, baik dalam peran sebagai pihak yang senantiasa aktif menanyakan keinginan, harapan, dan permasalahan masyarakat (*monitor role*), peran untuk

menyebarkan berbagai informasi pembangunan yang diperlukan oleh masyarakat (*disseminator role*), peran sebagai pihak yang mewakili masyarakat dalam menyampaikan dan menghubungkan aspirasi (*spokesman role, linker*), maupun peran sebagai penggerak partisipasi masyarakat (*activator role*).

Pemerintah selama ini belum dapat memanfaatkan/menempatkan peran tokoh-tokoh informal lokal dalam porsi yang wajar, yaitu menjadikan mereka sebagai komunikator dan mediator penyebaran ide-ide pembangunan dan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat, sebagaimana teknik komunikasi dua tahap (*two step flow communication*) yang sangat sesuai dengan kondisi perdesaan. Penyuluhan seringkali dilakukan sendiri oleh petugas-petugas dari luar komunitas (*outsider*), baik oleh pegawai pemerintah ataupun konsultan yang ditunjuk oleh pemerintah. Mereka terkadang kurang memiliki referensi tentang karakteristik masyarakat setempat, atau tidak memiliki kemampuan interpretatif terhadap penyajian materi penyuluhan dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh *audiencenya*. Sedangkan sesuai tabel IV.2, lembaga-lembaga representasi desa seperti Pemerintah Desa, BPD, dan LKMD (*insider*) yang sebenarnya diharapkan dapat menjadi penghubung (*linker*) kepentingan masyarakat karena lebih memiliki akses komunikasi dan informasi pembangunan melalui saluran-saluran formal, belum secara optimal melakukan inisiasi (*public hearing*) atau komunikasi lanjutan terhadap konstituennya, sehingga difusi informasi pembangunan oleh pemerintah melalui saluran-saluran formal tidak memiliki efek beruntun hingga masyarakat *grass roots* yang menjadi sasaran partisipasi.

TABEL IV.2
DAFTAR PENYULUH DAN FORUM KOMUNIKASI
(Berdasar Pendapat Masyarakat, 96 responden)

Penyuluh	Forum Yang Dipergunakan															
	Musrenbang kecamatan		Musrenbang Desa		Musrenbang Dusun		Rapat Desa		Pertemuan RT/RW		Musholla/ Masjid		Pengajian Umum		Jamiyah/ Maj.Taklim	
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
Petugas Dinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lurah Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21%	3%	-	-
BPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LKMD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RT/RW	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	5%	-	-	-	-	36%	-
Takmir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85%	-	-	-	31%
Panitia Pembangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21%	-	-	-	28%
Ulama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75%	-	59%	-	82%
Katua Jamiyah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25%
Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3%	-

Sumber: Hasil Analisis, 2006

Mereka cenderung lebih menjadikan informasi pembangunan sebagai konsumsi pribadi daripada meneruskannya kepada masyarakat. Aspirasi yang mereka bawa dalam forum-forum resmi lebih merupakan interpretasi pribadi atas kondisi masyarakat (*inferensial feedback*) daripada kondisi masyarakat yang sesungguhnya (*external feedback*). Ada kecenderungan pula, tokoh-tokoh formal tidak melakukan langkah-langkah nyata dalam menggerakkan partisipasi masyarakat bagi pembangunan prasarana perdesaan non keagamaan.

Pemanfaatan forum pengajian umum, jamiyah/majlis taklim oleh Lurah Desa maupun Ketua RT/RW tidak mengubah preferensi masyarakat terhadap rendahnya peran tokoh-tokoh masyarakat dalam komunikasi penyediaan prasarana perdesaan non keagamaan. Hal ini disebabkan komunikasi yang dilakukan oleh Lurah Desa maupun Ketua RT/RW bersifat searah (*one way traffic of communication*), yaitu sekadar memberitahukan adanya kegiatan proyek-proyek dan tidak melakukan dengar pendapat (*public hearing*) yang memungkinkan terjadinya umpan balik (*feedback*) dari masyarakat.

Sementara itu, sebagaimana gambar 4.8, peran agen perubahan dalam penyediaan sarana prasarana keagamaan sangat tinggi. Data di atas membuktikan telah terjadi komunikasi yang intensif antara tokoh-tokoh lokal dengan masyarakat dalam proses penyediaan sarana prasarana keagamaan.

Dalam pandangan masyarakat, para pemuka agama sangat sering melakukan konsultasi publik (*public hearing*) untuk menanyakan berbagai pendapat, harapan, keinginan, dan permasalahan yang berhubungan dengan sarana prasarana keagamaan; sehingga peran mereka sebagai *monitor role* sangat tinggi.

Melalui forum jumatan, forum jamaah, forum jamiyah/majlis taklim, para pemuka agama sering menyampaikan berbagai informasi tentang sarana prasarana keagamaan (*disseminator role*). Masyarakat juga meyakini, bahwa para pemuka agama mampu memperjuangkan aspirasi mereka dengan baik, ditandai dengan tingginya skor peran juru bicara '*spokesman role*'. Selanjutnya, para pemuka agama juga senantiasa menggerakkan partisipasi masyarakat agar proses penyediaan sarana prasarana keagamaan dapat tercapai sebagaimana harapan.

Data-data di atas membuktikan tingginya legitimasi masyarakat terhadap kepemimpinan tokoh-tokoh agama di lingkungan mereka. Dengan demikian komunikasi pembangunan akan sangat efektif apabila memberi peran yang wajar bagi tokoh-tokoh informal, terutama pemuka agama.

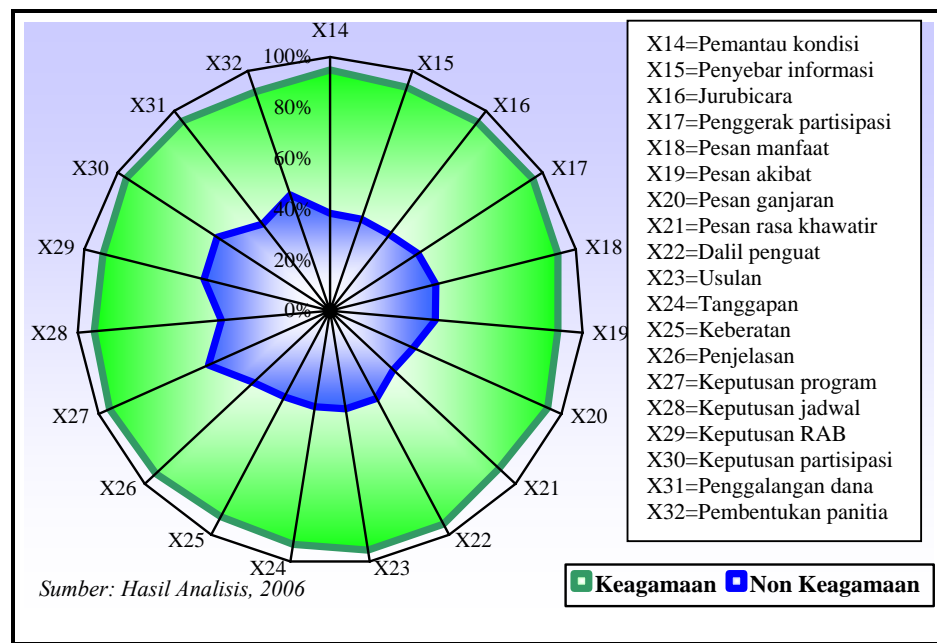
Sebagaimana tabel IV.2, telah terjadi kerjasama antara panitia pembangunan, takmir masjid/musholla, ketua lembaga-lembaga keagamaan (jamiyah/majlis taklim) dan ketua RT/RW dalam menyebarkan pesan-pesan pembangunan sarana prasarana keagamaan. Mereka pada umumnya memanfaatkan forum-forum yang biasa dihadiri masyarakat sebagai media untuk berkomunikasi, di antaranya masjid/musholla, pengajian umum, jamiyah/majlis taklim, bahkan pertemuan RT/RW.

4.1.3 Identifikasi Efektivitas Penyuluhan

Komunikasi pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan memiliki target utama mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap proses kegiatan pembangunan. Melalui kegiatan penyuluhan tersebut diharapkan terjadi perubahan sikap dan perilaku masyarakat

dari yang masa bodoh (*zero feedback*), kurang mendukung, tidak mendukung atau mungkin menentang program-program pembangunan (*negative feedback*), menjadi masyarakat yang mendukung program-program pembangunan (*positive feedback*). Dalam hal ini dukungan yang diinginkan tidak saja bersifat insidental pada saat pelaksanaan program, tetapi diharapkan adanya sikap mental yang laten terhadap langkah perubahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

Kegagalan kegiatan komunikasi atau penyuluhan pembangunan seringkali terjadi akibat teknik yang dilakukan oleh pemerintah seragam untuk kondisi dan karakteristik masyarakat yang berbeda. Sehingga identifikasi efektivitas penyuluhan diperlukan dalam rangka mencari teknik-teknik komunikasi yang dianggap paling tepat dan sesuai dengan kondisi masyarakat tersebut.



GAMBAR 4.9
PENERAPAN TEKNIK KOMUNIKASI

Efektivitas penyuluhan didiskripsikan berdasarkan preferensi responden tentang peran tokoh-tokoh masyarakat dalam kegiatan komunikasi, pola penggunaan pesan dalam mempengaruhi/memberi anjuran, umpan balik (*feedback*), serta pola penyuluhan yang terkait dengan pengambilan keputusan. Berdasarkan gambar 4.9, dapat dilihat adanya perbedaan efektivitas penyuluhan yang cukup kontras antara komunikasi penyediaan prasarana perdesaan non keagamaan dengan komunikasi penyediaan sarana prasarana keagamaan.

1. Keterlibatan Tokoh Masyarakat dalam Penyuluhan

Sebagian besar responden menilai bahwa kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah dalam penyediaan prasarana perdesaan non keagamaan selama ini belum banyak melibatkan tokoh-tokoh yang mereka segani di lingkungannya. Hal ini terlihat bahwa peran pemuka pendapat sebagai pemantau kondisi, penyebar pesan, penyampai aspirasi/juru bicara bagi masyarakat dan penggerak partisipasi masyarakat relatif rendah. Pada sisi yang lain peran tokoh-tokoh lokal dalam penyuluhan sarana prasarana keagamaan sangat tinggi; sebagaimana analisis peran agen perubahan sebelumnya.

Hanya perlu ditambahkan, adanya suatu kenyataan bahwa dalam penyediaan sarana prasarana keagamaan, panitia pembangunan ataupun *takmir* sebagai sumber informasi tidak sendirian dalam melakukan penyebaran informasi. Mereka menerapkan pola penyuluhan dengan model komunikasi dua tahap (*two step flow communications*) dengan menempatkan tokoh-tokoh lokal sebagai mediator dan komunikator di tingkat lokal, yaitu dengan cara meminta

bantuan tokoh-tokoh lokal tersebut untuk menyebarkan informasi (*disseminator role*) dan menggerakkan partisipasi masyarakat (*activator role*). Tokoh-tokoh lokal tersebut bahkan dilibatkan secara aktif dalam setiap pembahasan sarana prasarana keagamaan, sehingga mereka dapat menyampaikan dan menghubungkan berbagai keinginan dan inisiatif warga (*spokesman role, linker*). Tatkala peran-peran tersebut diberikan, maka dengan sendirinya tokoh-tokoh lokal akan secara aktif mengamati kondisi lingkungannya (*monitor role*). Sehingga terjadi efek beruntun dalam penyebaran pesan pembangunan.

Model penyuluhan seperti ini sangat efektif dalam memberi keyakinan dan mendorong partisipasi masyarakat, karena beberapa kelebihan: 1) Tokoh-tokoh lokal memiliki sandaran-sandaran kemasyarakatan (*social basic*) yang lebih kuat (Soekanto, 1990:322). Interaksi pergaulan yang hampir terjadi setiap hari dalam suasana yang akrab antara tokoh-tokoh informal lokal dengan masyarakat di lingkungannya adalah faktor-faktor situasional yang menjadikan tingginya tingkat kedekatan (*proximity*) baik secara fisik maupun psikis antara keduanya; 2) Arus komunikasi horisontal yang terjalin antara tokoh-tokoh lokal dengan masyarakatnya kurang menimbulkan distorsi karena sifat hubungan yang *homophilous* (adanya persamaan karakter), di mana mereka memiliki kerangka referensi (*frame of reference*) dan lingkup pengalaman (*field of experience*) yang relatif sama (Susanto, 1977:62). Persamaan inilah yang seringkali menempatkan pemimpin informal di perdesaan lebih efektif dalam melakukan komunikasi dengan masyarakat di lingkungannya.

Dengan demikian, cara penyuluhan pemerintah yang kurang atau tidak melibatkan tokoh-tokoh lokal sebagai komunikator pembangunan dapat mengurangi efektivitas penyuluhan itu sendiri.

2. Penggunaan Pesan Pembangunan

Preferensi responden tentang penggunaan pesan dengan cara menunjukkan manfaat, akibat, ganjaran (*rewards*), rasa khawatir, dan dasar-dasar/dalil-dalil penguat dalam kegiatan penyuluhan prasarana perdesaan non keagamaan relatif rendah. Hal ini sejalan minimnya intensitas kegiatan komunikasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, sedemikian hingga teknik-teknik komunikasi persuasif hampir tidak mewarnai kegiatan komunikasi pembangunan prasarana perdesaan non keagamaan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut.

Teknik-teknik komunikasi dengan menunjukkan manfaat pembangunan prasarana adalah salah satu teknik komunikasi persuasif. Teknik ini seharusnya menjadi bagian cara berkomunikasi pemerintah dalam mendorong partisipasi masyarakat, karena dalam kegiatan komunikasi pembangunan masyarakat cenderung menerima pesan pembangunan yang menunjukkan adanya manfaat. Sebagaimana pendapat Susanto, bahwa pesan pembangunan dapat diterima oleh masyarakat apabila ada harapan akan memperoleh manfaat (*expectation of reward*) (Susanto, 1977a:11). Sejalan dengan teknik tersebut adalah cara penyuluhan dengan mengungkapkan '*reward*', yaitu kondisi yang lebih baik bila prasarana dipenuhi (teknik *acceptance device*).

Teknik persuasif lain yang seharusnya dapat dilakukan oleh pemerintah adalah menunjukkan akibat apabila pembangunan prasarana perdesaan tidak

dilaksanakan. Teknik ini dilakukan dengan cara mengajak masyarakat untuk berpikir logis tentang kerugian yang ditimbulkan jika prasarana perdesaan yang menjadi kebutuhan mereka tidak dipenuhi, sehingga timbul kekhawatiran jika mereka tidak berpartisipasi. Kertapati menyebut teknik ini sebagai teknik *fear arousing* atau teknik menimbulkan kekhawatiran (1980:34).

Sebagai komunitas masyarakat yang agamis, maka penyuluhan dan anjuran-anjuran pembangunan yang disampaikan menukil dalil-dalil agama (*testimonial device*) sangat efektif mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat. Penggunaan dalil-dalil agama, baik yang bersumber dari Al-Qur'an maupun Hadits dapat menggiring interpretasi komunikasi ke arah kesamaan norma-norma yang dipatuhinya (norma agama). Sebagaimana '*Dissonance Reduction Theory*', bahwa manusia tidak menyukai adanya perbedaan/pertentangan antara norma-norma dalam dirinya dan ia akan menerima pendapat yang dapat mengurangi ketegangan atau pertentangan norma dalam dirinya (Susanto, 1977b:151).

3. Umpan Balik (*Feedback*)

Umpan balik (*feedback*) adalah faktor yang sangat penting agar kegiatan penyuluhan dapat berlangsung efektif. *Feedback* menandai adanya suatu komunikasi yang dialogis, bahkan menandai pola pembangunan yang *bottom up*. Adanya tanggapan yang bersifat langsung dalam komunikasi dialogis ini dapat menumbuhkan pengertian yang benar dan jelas, sekaligus pengertian yang sama di antara penyuluh/komunikator dan komunikan. Komunikator juga dapat segera menyesuaikan proses komunikasi berikutnya setelah memperoleh tanggapan dari

komunikasikan, sehingga hubungan interaktif dalam proses komunikasi dapat terjalin dengan baik.

Preferensi responden tentang penerapan teknik komunikasi dialogis dalam komunikasi penyediaan prasarana perdesaan non keagamaan relatif lebih rendah dibanding komunikasi penyediaan sarana prasarana keagamaan, baik berkenaan dengan kesempatan untuk menyampaikan usul/pendapat/gagasan, menanggapi masalah yang dibicarakan oleh penyuluh, menyampaikan keberatan-keberatan terhadap materi yang dibicarakan, maupun sekadar untuk memperoleh penjelasan.

Bila dihubungkan dengan tabel IV.2, maka sebenarnya rendahnya skor penerapan umpan balik dalam kegiatan penyuluhan prasarana perdesaan non keagamaan lebih disebabkan karena memang tidak adanya kegiatan penyuluhan yang bersifat dialogis dalam penyebaran pesan-pesan pembangunan prasarana perdesaan non keagamaan tersebut. Sekalipun teknik-teknik dialogis sudah dilakukan oleh pemerintah dalam kegiatan penyuluhan, namun hanya menjangkau komunikasi sasaran yang sangat terbatas, yaitu pada forum Musrenbang Kecamatan yang dihadiri oleh Lurah Desa dan Ketua BPD.

4. Pengambilan Keputusan

Dalam kegiatan penyuluhan yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan prasarana perdesaan non keagamaan, pemerintah juga cenderung kurang mengedepankan prinsip-prinsip permusyawaratan (deliberasi). Hal ini terlihat dari rendahnya skor penerapan teknik komunikasi deliberatif dalam penetapan program, jadwal kegiatan, rencana anggaran dan biaya, jenis dan besar partisipasi, cara penggalangan dana dan pembentukan panitia

pembangunan. Padahal masalah-masalah yang menyangkut kepentingan dan berdampak kepada masyarakat luas, keputusan selayaknya diambil berdasarkan kesepakatan warga. Informasi harus mengalir sepanjang saluran tertentu (*gate areas*) sehingga keputusan dibuat di bawah pengaruh sejumlah kekuatan, baik yang mendukung atau tidak (Kurt Lewin dalam McQuail, 1994:213).

Hal senada juga dikemukakan oleh Sumarto (2004:206), bahwa pengambilan keputusan-keputusan yang mendasar dan berdampak luas bagi masyarakat, sebaiknya dilakukan pada forum warga yang merupakan perangkat tertinggi dalam struktur lembaga kemasyarakatan; dan yang diundang adalah semua elemen masyarakat.

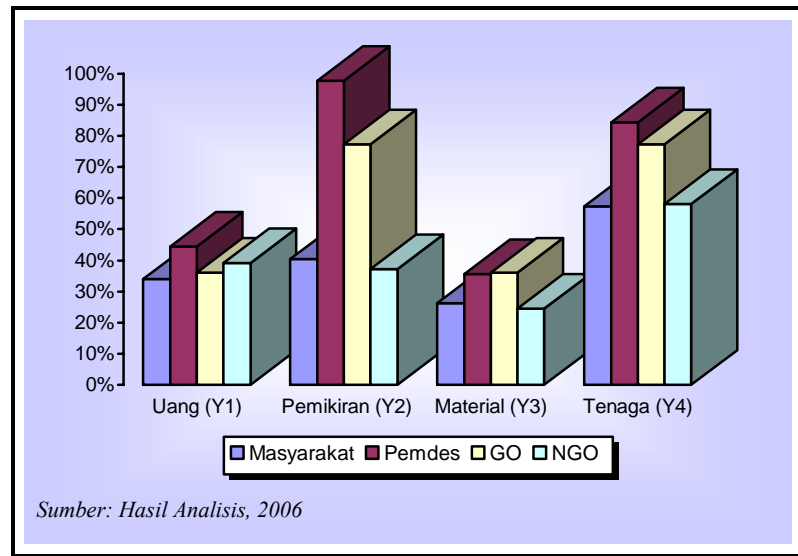
Dalam komunikasi penyediaan sarana prasarana keagamaan, *takmir* ataupun panitia pembangunan senantiasa menempatkan forum jumatatan sebagai lembaga tertinggi yang menentukan keputusan program, jadwal kegiatan, rencana anggaran dan biaya, jenis dan besar partisipasi, cara penggalangan dana dan pembentukan panitia pembangunan, meskipun sebelumnya mereka telah melakukan pembahasan dahulu bersama tokoh-tokoh masyarakat yang lain.

4.1.4 Identifikasi Perhatian Masyarakat

Perhatian masyarakat terhadap prasarana perdesaan non keagamaan maupun sarana prasarana keagamaan dapat dilihat dari bantuan mereka dalam pembangunan kedua prasarana tersebut, meliputi: bantuan uang, pemikiran, bantuan material dan bantuan tenaga.

Pada gambar 4.10 terlihat bantuan pemikiran *stakeholders* unsur tokoh organisasi non pemerintah dan masyarakat sangat rendah, sedang unsur

Pemerintahan Desa dan tokoh organisasi pemerintah sangat tinggi. Hal ini membuktikan, bahwa pola komunikasi penyediaan prasarana perdesaan non keagamaan yang dilakukan pemerintah selama ini kurang memberi ruang partisipasi (*public sphere*) bagi masyarakat dan tokoh-tokoh informal lokal. Akses hanya diberikan kepada sebagian elite desa dari unsur pemerintahan desa (pemerintah desa, BPD) dan tokoh-tokoh masyarakat dari organisasi pemerintah seperti LKMD dan RT/RW. Padahal menurut Jurgen Habermas *public sphere*, harus memungkinkan terjadinya akses informasi oleh seluruh anggota masyarakat (McNair, 1998:22). *Public sphere* hanya terjadi ketika warga menikmati hak untuk berkumpul dan bekerjasama sebagai tubuh publik untuk membicarakan isu-isu sehari-hari (McQuail, 2002:195).



GAMBAR 4.10
BENTUK PERHATIAN/PARTISIPASI MASYARAKAT
TERHADAP PRASARANA PERDESAAN NON KEAGAMAAN

Tatkala warga tidak memiliki akses terhadap informasi pembangunan dan saluran komunikasi yang ada juga kurang atau bahkan tidak memberi ruang bagi

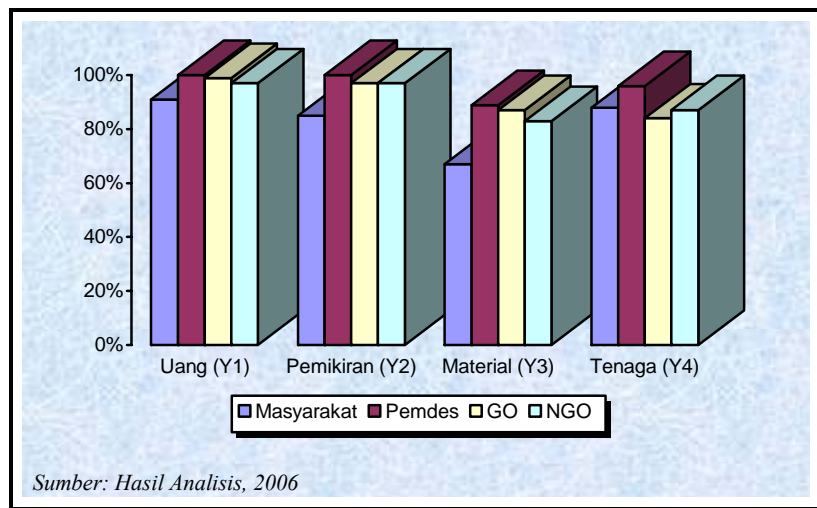
warga untuk menyampaikan gagasan, usulan atau pendapat, maka dapat dipahami bila akibat berikutnya adalah partisipasi mereka dalam bentuk uang dan material juga cenderung rendah. Sebagaimana tabel III.4 dan III.5, pemerintah belum berhasil menyerap dana swadaya dari masyarakat untuk menunjang proyek-proyek pemerintah (APBD, APBDes).

Pada sisi yang lain, pemerintah masih mengartikan partisipasi sebagai dukungan tenaga - karena bantuan berupa tenaga relatif tinggi – dan bukan keterlibatan *stakeholders* dalam keseluruhan proses pembangunan, sehingga yang terjadi adalah mobilisasi bukan partisipasi dalam arti yang sesungguhnya. Untuk proyek-proyek tertentu terutama APBDes, pemerintah desa biasanya meminta masyarakat yang menjadi lokasi kegiatan berpartisipasi dalam bentuk tenaga.

Akses informasi dan keterlibatan *stakeholders* dalam saluran-saluran komunikasi adalah dalam rangka menumbuhkan perhatian, minat dan hasrat, sehingga mereka akan terdorong untuk melakukan partisipasi lebih lanjut. Sebagaimana teori "*A-A-procedure*" (AIDDA) Dorwin Cartwright (Effendy, 1981:87), bahwa partisipasi (*action*) akan terjadi bila dimulai dari timbulnya perhatian (*attention*), kemudian minat (*interest*), hasrat (*desire*), berikut terjadi keputusan (*decision*) untuk melakukan kegiatan (*action*). Pada kasus komunikasi penyediaan prasarana perdesaan non keagamaan ini, pemerintah menginginkan partisipasi tetapi tidak merintis perhatian, minat dan hasrat terlebih dahulu, sehingga gagal memperoleh partisipasi masyarakat.

Dalam kegiatan komunikasi penyediaan sarana prasarana keagamaan langkah-langkah di atas telah dipenuhi, di mana sejak tahap perencanaan,

pengorganisasian, penggerakan hingga pengawasan segenap elemen masyarakat dilibatkan secara aktif.



GAMBAR 4.11
BENTUK PERHATIAN/PARTISIPASI MASYARAKAT
TERHADAP SARANA PRASARANA KEAGAMAAN

Keterlibatan semua elemen stakeholders tersebut mendorong timbulnya perhatian mereka terhadap pembangunan sarana prasarana keagamaan sehingga berlanjut pada tumbuhnya minat dan hasrat untuk membangun; dan akhirnya melalui musyawarah warga mereka memutuskan untuk melaksanakan pembangunan sarana prasarana keagamaan; berikut timbul partisipasi nyata dalam bentuk bantuan dana, pikiran, material dan tenaga dalam kegiatan pembangunan sarana prasarana keagamaan tersebut (gambar 4.11).

Selain itu pola penggalangan partisipasi pembangunan sarana prasarana keagamaan sangat memperhatikan keragaman kemampuan dan kesempatan *stakeholders*. Banyaknya jenis partisipasi memperlihatkan pola penggalangan partisipasi yang dapat mengakomodir kearifan lokal (Tabel IV.3). Masyarakat

memiliki alternatif untuk dapat memilih jenis dan besar partisipasi yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Cara demikian memungkinkan orang dalam kondisi selemah apapun dapat berpartisipasi dalam penyediaan sarana prasarana keagamaan (misalnya sistem *simbatan*, *sambatan*, *tompo mider*, dll).

TABEL IV.3
JENIS-JENIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA KEAGAMAAN

Bentuk	Jenis Partisipasi	
	Morodemak	Purwosari
Tenaga	-Pengecoran -Langsiran material -Serabutan -Pengatapan -Penarikan jariyah -Sambatan	-Pengecoran -Langsiran material -Serabutan -Pengatapan -Penarikan jariyah -Sambatan
Uang	-Simbatan nelayan: 1. Tiga bulan sekali (kapal mini, potik, galaxy): Setelah dikurangi biaya operasional, semua hasil disetor ke Panitia 2. Simbatan rutin: 2% hasil bersih -Simbatan tambak (3 bulan sekali) -Jariyah keliling " <i>tompo mider</i> " -Donatur tetap & sukarela -Jariyah melalui jamiyah/majlis taklim -Kotak amal saat Sholat Jumat	-Donatur tetap/sukarela -Jariyah keliling tiap RT, seminggu sekali -Kotak infaq keliling bagi pedagang di Pasar Sayung, setiap hari Ahad -Pengedaran amplop kosong berstempel Panitia (untuk diisi jariyah) dan dibawa saat sholat Ied. -Penitipan kota infaq di warung/toko -Kotak amal saat sholat jumat/ kotak amal permanen
Material	-Pelelangan kebutuhan material -Bantuan material secara sukarela	-Pelelangan kebutuhan material -Bantuan material secara sukarela
Pemikiran	-Keterlibatan dalam setiap pembahasan sarana-prasarana keagamaan	-Keterlibatan dalam setiap pembahasan sarana-prasarana keagamaan

Sumber: Panitia Pembangunan Masjid Baitul Attiq Morodemak dan Masjid Al-Muttaqin Purwosari, 2006

4.2 Analisis Perbedaan Pola Komunikasi Pembangunan

Analisis perbedaan pola komunikasi pembangunan penyediaan prasarana perdesaan non keagamaan dan sarana prasarana keagamaan dilakukan secara diskriptif komparatif, dengan cara membandingkan pola interaksi pelaku komunikasi dan penyebaran informasi melalui saluran-saluran komunikasi (forum komunikasi) sejak tahap perencanaan, pengorganisasian, penggerakan hingga

pengawasan yang terjadi dalam kegiatan komunikasi pembangunan kedua jenis prasarana tersebut.

Pola komunikasi pembangunan penyediaan prasarana perdesaan non keagamaan didiskripsikan berdasarkan beberapa aturan yang melatarbelakangi dan mempengaruhi proses kegiatan komunikasi pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Demak, disintesis dengan kondisi riil pelaksanaan komunikasi pembangunan tersebut berdasarkan cheking data yang dilakukan terhadap Lurah Desa sebagai pihak yang mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan komunikasi pembangunan di tingkat desa.

Sedang pola komunikasi pembangunan penyediaan sarana prasarana keagamaan disarikan berdasarkan hasil wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten, di antaranya Ta'mir Masjid dan Panitia Pembangunan Masjid. Kegiatan komunikasi pembangunan masjid dipilih untuk mendiskripsikan pola komunikasi penyediaan sarana prasarana keagamaan karena pola komunikasi pembangunan masjid dianggap paling lengkap menggambarkan pola interaksi *stakeholders* dan penyebaran informasi pembangunan yang ada, dibanding pembangunan sarana prasarana keagamaan yang lain.

4.2.1 Analisis Pola Komunikasi Penyediaan Prasarana Perdesaan Non Keagamaan

Pola komunikasi penyediaan prasarana perdesaan non keagamaan yang dilakukan oleh pemerintah sangat dipengaruhi oleh berbagai aturan yang berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan pembangunan di perdesaan. Beberapa peraturan yang mendasari kegiatan komunikasi pembangunan penyediaan prasarana perdesaan non keagamaan di Kabupaten Demak tertera dalam tabel IV.4.

Namun demikian implementasi kegiatan komunikasi pembangunan dapat juga mengalami pergeseran dari aturan yang ada, karena berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi, sehingga pola komunikasi pembangunan yang terjadi tidak selalu sinergis dengan aturan yang melandasi.

TABEL IV.4
PERATURAN YANG MENDASARI KOMUNIKASI
PENYEDIAAN PRASARANA PERDESAAN NON KEAGAMAAN

No.	Peraturan	Perihal
1.	SEB Kepala Bappenas & Mendagri No.1354/M.PPN/ 03/2004-050/744/SJ, tgl. 24 Maret 2004	Pedoman Pelaksanaan Forum Musrenbang dan Perencanaan Partisipatif Daerah
2.	Surat Mendagri No. 140/1824/PMD, tgl. 12 Desember 2000	Tindak Lanjut Program Dana Pembangunan Desa/Kelurahan
3.	Surat Dirjen PMD No. 412.4/305/PMD, tanggal 4 Maret 2004	Program/Proyek/Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4.	Keputusan Bupati Demak No. 412.6/292/2005	Petunjuk Pelaksanaan Dana Pembangunan Desa/Kelurahan (DPD/K) Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2005
5.	Perda Kabupaten Demak No.7 Tahun 2001, tgl. 9 Juli 2001	Pembentukan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan
6.	Perda Kabupaten Demak No. 14 Tahun 2000, tgl. 1 Juli 2000	Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa

Sumber: Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Demak, 2006

Pada gambar 4.4 sebelumnya dapat menjadi ukuran, bahwa media massa bukanlah saluran yang utama dalam memperoleh informasi tentang pembangunan. Bahkan masyarakat cenderung menjadikan media elektronik sebagai sarana untuk memperoleh hiburan daripada informasi. Sehingga saluran yang paling utama dalam penyebaran ide-ide pembangunan adalah saluran interpersonal. Namun demikian, sesuai tabel IV.2, tidak semua forum komunikasi pembangunan dapat

diikuti oleh stakeholders pembangunan. Masyarakat tidak pernah memperoleh informasi tentang prasarana perdesaan non keagamaan dari forum perencanaan seperti Musrenbangdus, Musrenbangdes dan Musrenbang Kecamatan. Mereka hanya memperoleh pemberitahuan kegiatan proyek dari Lurah Desa melalui forum pengajian umum dan dari Ketua RT/RW melalui pertemuan RT/RW.

TABEL IV.5
MUATAN INFORMASI STANDAR
KEGIATAN KOMUNIKASI PENYEDIAAN PRASARANA PERDESAAN

No.	Muatan Informasi	Morodemak	Purwosari
1.	Daftar prioritas masalah	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Peta potensi dan permasalahan desa	Tidak Ada	Tidak Ada
3.	Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)	Tidak Ada	Tidak Ada
4.	Informasi jumlah dana yang dialokasikan ke desa	Ada (DPD/K)	Ada (DPD/K)
5.	Informasi isu-isu strategis daerah	Tidak Tahu	Tidak Tahu
6.	Informasi usulan yang telah terealisasi dalam APBD	Tidak Ada	Tidak Ada
7.	Evaluasi pelaksanaan pembangunan desa tahun sebelumnya	Tidak Ada	Tidak Ada
8.	Jadwal dan agenda Musrenbang desa	Tidak Ada	Tidak Ada
9.	Materi Musrenbang desa	Tidak Ada	Tidak Ada
10.	Jadwal dan agenda Musrenbang dusun	Tidak Ada	Tidak Ada

Sumber: Lurah Desa Morodemak dan Purwosari, 2006

Forum-forum penyuluhan di luar Musrenbang juga tidak pernah dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat di lokasi penelitian. Pemerintah Daerah tidak pernah berkomunikasi langsung dengan masyarakat tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan prasarana perdesaan non keagamaan. Komunikasi pembangunan yang dilakukan pemerintah adalah melalui lembaga-lembaga representasi, yaitu pemerintah desa dan BPD. LKMD yang menurut Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan dan Peraturan Daerah

Kabupaten Demak Nomor 14 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah pelaksana pembangunan di tingkat desa, bahkan bukan termasuk organisasi pemerintah yang dilibatkan dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. Keterlibatannya adalah melalui Rapat Desa bersama-sama dengan organisasi pemerintah yang lain (RT/RW).

Sesuai Surat Edaran Bersama Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1354/M.PPN/03/2004-050/ 744/SJ, tanggal. 24 Maret 2004, ada beberapa informasi standar yang seharusnya melengkapi penyebaran pesan pembangunan dan atau menjadi output dari suatu proses kegiatan komunikasi pembangunan prasarana perdesaan non keagamaan (tabel IV.5).

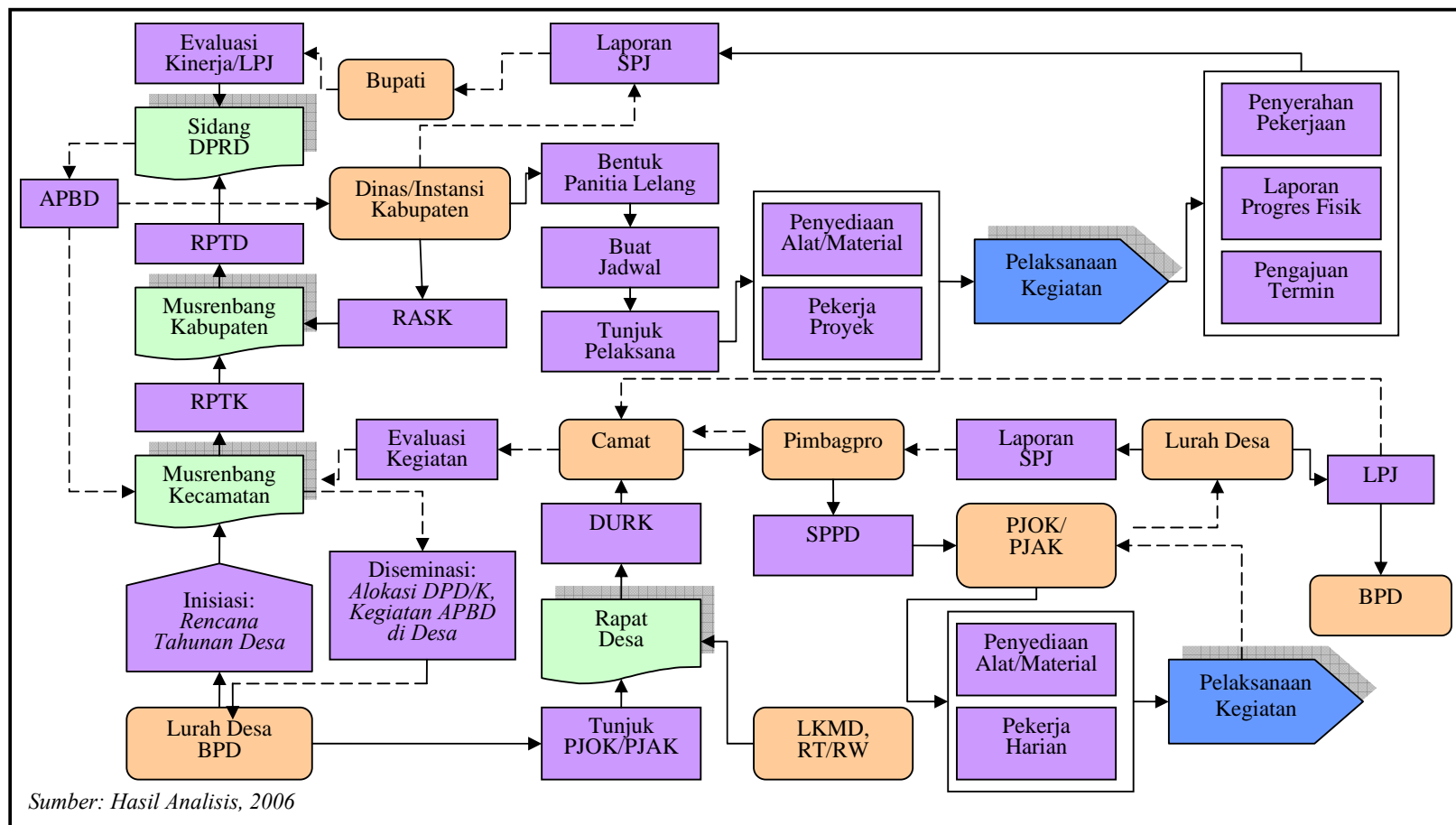
Berdasarkan tabel di atas dapat diilustrasikan, bahwa dokumen-dokumen perencanaan yang merupakan muatan informasi terpenting dalam kegiatan komunikasi pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah tidak dapat diakses secara terbuka oleh stakeholders pembangunan, bahkan oleh pejabat pemerintah sendiri di level desa. Hal ini dapat dilihat dari tidak dimengertinya informasi tentang isu-isu strategis daerah. Informasi tentang alokasi dana pembangunan yang ada di desa juga sangat terbatas pada DPD/K (Dana Pembangunan Desa/Kelurahan), sehingga mereka juga tidak mengerti tentang proses berikutnya usulan-usulan yang pernah mereka ajukan pada tahun-tahun sebelumnya.

Dokumen-dokumen perencanaan yang seharusnya merupakan informasi pembangunan yang harus disebarkan kepada masyarakat luas melalui forum Musrenbangdes atau Musrenbangdus juga tidak ada. Hal ini memberi bukti bahwa selain forum-forum tersebut tidak pernah diselenggarakan di tingkat desa,

dokumen-dokumen perencanaan pembangunan juga masih sangat sulit diperoleh oleh masyarakat. Dengan demikian terjadi keterputusan (*missing link*) penyebaran informasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penyediaan prasarana perdesaan non keagamaan di lokasi penelitian.

Berdasarkan data-data di atas dan hasil wawancara dengan Lurah Desa Morodemak maupun Lurah Desa Purwosari, maka pola komunikasi pembangunan dalam penyediaan prasarana perdesaan non keagamaan yang terjadi di lokasi penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut (gambar 4.12):

- Kegiatan inisiasi atau penjaringan inisiatif dari masyarakat dilakukan melalui Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan Tahap I dengan cara menghimpun usulan dari Lurah Desa dan BPD yang tertuang dalam Rencana Tahunan Desa. Usulan-usulan tersebut merupakan informasi bagi forum untuk melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan (RPTK). RPTK adalah himpunan usulan desa se-Kecamatan yang telah terseleksi melalui Musrenbang Kecamatan.
- RPTK selanjutnya dibahas dalam forum Musrenbang Tingkat Kabupaten. Hasil Musrenbang Kabupaten dituangkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (RPTD). Selain menerima usulan-usulan dari Tingkat Kecamatan, Musrenbang Kabupaten juga menerima usulan-usulan dari Dinas/Instansi Kabupaten. Pada tahap inilah persimpangan pengaruh terjadi antara proses komunikasi yang dijalankan secara *bottom up* (usulan dari bawah) yang lebih aspiratif dengan proses komunikasi *top down* (usulan dari dinas/instansi kabupaten) yang biasanya lebih memiliki argumen teknis.



GAMBAR 4.12
POLA KOMUNIKASI PENYEDIAAN PRASARANA PERDESAAN NON KEAGAMAAN

- Setelah melalui pembahasan sidang DPRD, maka ditetapkan APBD. Muatan APBD inilah yang menjadi ukuran apakah inisiasi arus bawah melalui lembaga representasi desa (Pemerintahan Desa) diperhatikan atau tidak oleh Pemerintah Daerah.
- Berdasarkan penetapan APBD, selanjutnya dilakukan diseminasi/sosialisasi APBD oleh Tim Sosialisasi Kabupaten melalui Forum Musrenbang Kecamatan Tahap II. Pada forum ini Lurah Desa dan BPD memperoleh informasi tentang Alokasi dana DPD/K dari unsur Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Demak sebagai salah satu anggota Tim, juga memperoleh informasi tentang daftar proyek-proyek APBD Kabupaten Demak yang berada di desa-desa bersangkutan dari unsur Bappeda atau Bagian Pengendalian Pembangunan Setda Kabupaten Demak.
- Untuk menindaklanjuti hasil pertemuan Musrenbang Kecamatan Tahap II ini, Lurah Desa selanjutnya mengkoordinasikan terselenggaranya Musrenbang Tingkat Desa - namun yang terjadi adalah rapat desa - dengan mengumpulkan LKMD, RT/RW. Sebagai kelengkapan organisasi proyek, sebelumnya Lurah Desa - sebagaimana Keputusan Bupati Demak Nomor 412.6/292/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Pembangunan Desa/Kelurahan (DPD/K) Kabupaten Demak – menunjuk salah satu unsur LKMD sebagai Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) dan salah satu perangkat desa sebagai Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK).
- Rapat Desa tersebut menyepakati Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang akan dimintakan pengesahan pada Camat. Namun melihat tidak adanya

daftar prioritas masalah, peta potensi dan permasalahan desa memberi bukti, bahwa penyusunan DURK seringkali insidental dan kurang terencana dengan baik, dan dibuat hanya pada saat menerima dana DPD/K. Hal ini dapat dipahami karena desa sampai sejauh ini tidak memiliki sumber lain selain dana dari DPD/K. Keterbatasan ini juga yang mengakibatkan forum-forum komunikasi yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat pada umumnya tidak diselenggarakan.

- Setelah DURK diajukan kepada Camat, selanjutnya melalui Pemimpin Bagian Proyek yang ditunjuk oleh Camat diterbitkan Surat Perjanjian Pemberian Dana (SPPD). Setelah menerima SPPD, maka kegiatan pembangunan dilaksanakan oleh LKMD. Penyediaan alat/material dan penunjukan pekerja harian dilakukan sendiri oleh LKMD tanpa meminta persetujuan masyarakat.
- Sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan, maka PJAK mengetahui Lurah Desa mengirim Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kepada Camat melalui Pimbagpro. Selain itu pada akhir tahun, Lurah Desa membuat laporan penyelenggaraan pemerintahan kepada Bupati melalui Camat, dan menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD. Dengan demikian tidak ada akses langsung masyarakat untuk turut mengawasi pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan prasarana perdesaan non keagamaan. Pengawasan hanya dilakukan oleh BPD.
- Pada saat yang bersamaan setelah penetapan APBD, Dinas/Instansi melaksanakan proyek-proyek di bawah kewenangan masing-masing (termasuk proyek-proyek prasarana perdesaan non keagamaan) dengan

membentuk panitia lelang. Panitia Lelang inilah yang membuat jadwal kegiatan (*schedule*) dan melakukan proses pemilihan pelaksana proyek.

- Setelah ditentukan pemenangnya, maka Kepala Dinas/Instansi atau pejabat yang ditunjuk mengeluarkan SK penunjukan pelaksana kegiatan. Dengan demikian tidak ada ruang intervensi bagi publik untuk turut mempengaruhi proses penunjukan.

4.2.2 Analisis Pola Komunikasi Penyediaan Sarana Prasarana Keagamaan

Dalam penyediaan sarana prasarana keagamaan terjadi pola interaksi dan pola penyebaran informasi yang dilakukan oleh panitia pembangunan dalam keseluruhan proses kegiatan komunikasi melalui forum-forum lokal yang biasanya dipergunakan sebagai saluran dan pusat-pusat informasi bagi seluruh komponen masyarakat.

Pola komunikasi penyediaan sarana prasarana keagamaan ada yang berlangsung sederhana dan ada juga yang sangat kompleks tergantung besar kecilnya kegiatan yang dilakukan dan luasan *stakeholders* yang terkait. Pola komunikasi pembangunan musholla tentu tidak serumit pola komunikasi pada pembangunan masjid, begitu pula pola komunikasi pemeliharaan sarana prasarana keagamaan tentu tidak sedetail pembangunan sarana prasarana keagamaan.

Gambar 4.13 adalah hasil analisis berdasarkan informasi yang dihimpun dari Takmir Masjid atau Panitia Pembangunan yang berkompeten. Berdasarkan gambar tersebut dapat dijelaskan, bahwa kegiatan komunikasi dimulai dengan kegiatan identifikasi masalah-masalah prasarana kemasjidan yang dihimpun berdasarkan hasil pengamatan, masukan dan usulan dari berbagai pihak.

Dari berbagai permasalahan yang ada selanjutnya Takmir mengkoordinasikan terselenggaranya rapat terbatas untuk membahas masalah tersebut. Rapat terbatas diikuti oleh berbagai elemen tokoh masyarakat, yang mencerminkan keterwakilan kaum (musholla-musholla, RT/RW) dan berbagai pegiat masyarakat yang lain, ditambah orang-orang yang secara ekonomi termasuk kelompok mampu (*agniyak*). Rapat terbatas ini dimaksudkan untuk menjajagi kemungkinan dilaksanakannya pembangunan/pemeliharaan prasarana masjid (*forecasting*).

Hasil pertemuan dijadikan sebagai dasar penyusunan draft program yang nantinya dimintakan pendapat masyarakat (*public hearing*) melalui forum jumatan. Setelah masyarakat menyepakati program yang direncanakan, dilanjutkan dengan penjarangan potensi masyarakat untuk ditempatkan sebagai Panitia Pembangunan.

Setelah terpilih, Panitia memulai tugasnya dengan cara mengundang orang yang dipandang memiliki keahlian teknik (konsultan) untuk menghitung dan membuat desain gambar bangunan yang akan dilaksanakan. Desain beserta rencana anggaran dan belanja, selanjutnya dimintakan pendapat masyarakat melalui forum jumatan. Apabila masyarakat setuju, maka ditetapkanlah Rencana Anggaran sebagai dasar langkah kerja Panitia Pembangunan berikutnya.

Oleh karena pembangunan masjid bertumpu pada kemampuan dan kekuatan swadaya masyarakat, maka panitia meminta pendapat dan persetujuan masyarakat melalui forum jumatan tentang jenis, besar dan cara penggalangan partisipasi yang akan dilakukan.

Selanjutnya melalui tokoh-tokoh lokal dan berbagai kelompok-kelompok masyarakat, Panitia melaksanakan sosialisasi/diseminasi program, pengarahan (penggerakan) dana maupun swadaya gotong-royong. Kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi pembangunan sarana prasarana keagamaan di antaranya forum-forum jamaah, jamiyah, majlis taklim, kelompok profesi (misalnya kelompok nelayan di Morodemak, kelompok pedagang di Purwosari), forum pertemuan RT/RW juga dari kalangan pemuda.

Pada tahap pelaksanaan, Panitia menghimpun dana dari masyarakat melalui tokoh-tokoh lokal, melaksanakan juga penyediaan alat/material, dan mencari tenaga harian selain tenaga swadaya gotong-royong dari masyarakat.

Selain menempel laporan keuangan baik yang masuk maupun yang keluar, Panitia melaporkan kondisi keuangan dan perkembangan pekerjaan secara ringkas menjelang khutbah jumat, atau seusai sholat jumat. Pada akhir pekerjaan Panitia Pembangunan biasanya mempertanggungjawabkan tugasnya dalam rapat Takmir plus (tokoh masyarakat, agniyak).

4.2.3 Sintesis Pola Komunikasi Penyediaan Prasarana Perdesaan

Berdasarkan perbedaan pola komunikasi di atas maka dapat dilihat berbagai kelemahan yang ada dalam pola komunikasi penyediaan prasarana perdesaan non keagamaan. Sehingga dalam rangka pengembangan model, maka pola komunikasi penyediaan prasarana perdesaan non keagamaan tersebut perlu disintesis dengan pola komunikasi penyediaan sarana prasarana keagamaan sebagai model yang menjadi referensi (*model kontrol*), sehingga diperoleh suatu konsep pola komunikasi yang lebih efektif dalam mendorong partisipasi

masyarakat. Setelah disintesis dengan pola komunikasi penyediaan sarana prasarana keagamaan, maka dihasilkan pola komunikasi penyediaan prasarana perdesaan yang baru, yaitu pola komunikasi penyediaan prasarana perdesaan yang bertumpu pada sumberdaya lokal (gambar 4.14).

TABEL IV.6
ARAH PENGEMBANGAN POLA KOMUNIKASI
PENYEDIAAN PRASARANA PERDESAAN

No.	Non keagamaan	Non Keagamaan	Pengembangan
1.	Forum komunikasi bersifat elitis, hanya dapat diikuti lembaga representasi	Keterlibatan masyarakat, tokoh masyarakat, Pemdes secara integratif	Perlu forum yang lebih memberi ruang partisipasi bagi <i>stakeholders</i>
2.	Kegiatan mengikuti agenda pemerintah, belum tentu sesuai kesempatan <i>stakeholders</i>	Memanfaatkan forum yang bersifat <i>community friendly</i> (jumatan/jamaah, jamiyah)	Perlu memanfaatkan forum-forum lokal yang sudah ada.
3.	Pemdes hanya mengawal usulan hingga Musrenbangkec, seringkali terjadi eliminasi usulan desa akibat ego sektoral	Stakeholders dapat mengikuti keseluruhan kegiatan perencanaan (<i>public oriented</i>)	Diperlukan adanya forum yang mempertemukan antara Pemda dengan <i>stakeholders</i> desa
4.	Tidak adanya interaksi langsung antara pengambil keputusan dengan penerima manfaat, sehingga dapat terjadi distorsi informasi.	Pengambil keputusan & penerima manfaat berada dalam satu forum yang memungkinkan interaksi dan <i>feedback</i> antar mereka.	Diperlukan forum yang memungkinkan terjadinya komunikasi dialogis maupun deliberatif
5.	Inisiasi (<i>public hearing</i>) hanya dilakukan terhadap elite desa dan tidak berlanjut hingga tingkat <i>grass roots</i> yang menjadi basis partisipasi	-Adanya keterlibatan tokoh & <i>aghiyak</i> untuk menjajagi potensi/kendala (<i>forecasting</i>) -Meminta pendapat warga melalui forum jumatan, dll.	Perlunya kegiatan inisiasi dan desiminasi yang melibatkan kelompok-kelompok masyarakat.
6.	Dokumen perencanaan relatif tertutup, dan penyebarannya hanya melalui saluran formal.	Informasi pembangunan melalui forum jumatan/papan pengumuman	Penyebaran informasi hendaknya melalui media yang terakses oleh publik
7.	Tidak adanya keterlibatan tokoh-tokoh informal lokal dalam penyebaran informasi pembangunan	Ada peran tokoh informal lokal; teknik komunikasi sesuai kondisi sosiologis & psikologis warga	Perlunya keterlibatan tokoh-tokoh informal sebagai komunikator dan mediator di tingkat lokal
8.	Panitia ditunjuk oleh pejabat pemerintah, bukan pilihan penerima manfaat/warga.	Panitia berasal dan dipilih oleh warga, sehingga sangat <i>legitimate</i>	Perlu penjaringan potensi lokal sebagai panitia; panitia dipilih oleh warga.
9.	Pelaksanaan proyek skala desa oleh rekanan, berakibat tidak ada penggerakan partisipasi oleh tokoh-tokoh lokal.	Adanya distribusi peran dalam menggerakkan partisipasi masyarakat	Perlunya penyerahan proyek skala desa kepada masyarakat & peran tokoh lokal.
10.	Pertanggungjawaban dilakukan kepada pejabat pemberi tugas	Pertanggungjawaban kepada publik melalui forum jumatan/papan tempel	Perlu adanya mekanisme akuntabilitas yang dapat diakses oleh publik

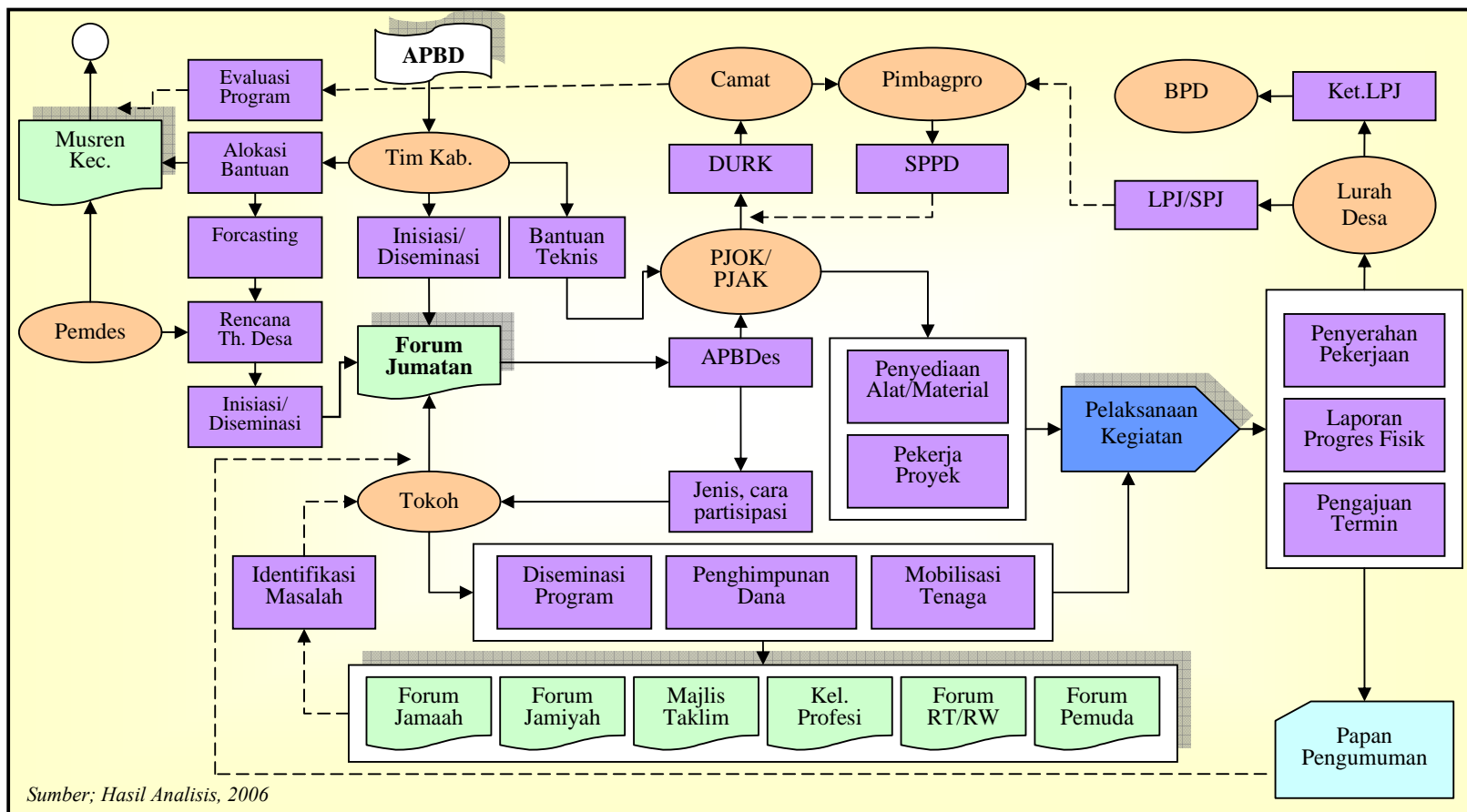
Sumber: Hasil Analisis, 2006

Apabila dicermati, maka langkah-langkah pengembangan pola komunikasi di atas sangat menekankan keterlibatan seluruh pihak yang berkepentingan atau pemegang peran pembangunan (*stakeholders*) dalam suatu komunitas, dan menaruh perhatian terhadap keberadaan institusi-institusi lokal, kelompok-kelompok lokal, inisiatif lokal, potensi lokal, sebagaimana pendekatan manajemen sumberdaya lokal (*community-based resource manajement*).

Berdasarkan gambar 4.14 dapat dijelaskan bahwa dalam pola komunikasi penyediaan prasarana perdesaan yang bertumpu pada sumberdaya lokal, segala putusan yang berhubungan dengan kepentingan dan memiliki dampak terhadap masyarakat umum selalu diputuskan berdasarkan kesepakatan warga melalui forum tertinggi, yaitu forum jumatan. Forum jumatan yang dimaksudkan di sini adalah forum komunikasi yang memanfaatkan *event* jumatan yang pelaksanaannya setelah selesai kegiatan ritual jumatan, sehingga tidak mengganggu kegiatan ibadah warga. Pemilihan forum jumatan sebagai forum komunikasi penyediaan prasarana perdesaan atas dasar asumsi: 1) Forum jumatan merupakan forum lokal yang didatangi oleh lebih banyak warga dan warga juga memang memiliki waktu untuk itu; 2) Forum jumatan memiliki jadwal yang pasti; 3) Meskipun forum jumatan memiliki kelemahan, yaitu kurang mengakomodir kelompok perempuan dan warga masyarakat yang non muslim, namun kelemahan ini tidak terlalu menjadi masalah karena kegiatan komunikasi berlanjut hingga kelompok-kelompok masyarakat yang lebih kecil yang masih memberi ruang partisipasi (*public sphere*) bagi mereka, yaitu melalui jamaah musholla, forum jamiyah/majlis taklim, pertemuan RT/RW, kelompok profesi,

forum pemuda, dll.; 4) Forum jumatun lebih egaliter dan dapat menimbulkan *image* yang positif bagi pemerintah, karena memperlihatkan adanya "kebersamaan antara ulama, umaro, dan ummat"; 5) Mekanisme komunikasi dalam forum jumatun sangat elastis, artinya kegiatan komunikasi pembangunan dapat dilakukan dengan melibatkan semua jamaah, atau karena alasan tertentu komunikasi hanya dilakukan terhadap tokoh-tokoh masyarakat (agen-agen perubahan).

Melalui forum jumatun ini, pemerintah desa maupun dinas/instansi kabupaten dapat melakukan inisiasi (*public hearing*) dalam rangka penyusunan rencana program serta diseminasi program-program kegiatan yang telah ditetapkan. Adanya kegiatan komunikasi yang berorientasi kepada publik (*public oriented*) ini dapat diperoleh beberapa manfaat: 1) dapat memperkuat dukungan masyarakat terhadap program-program pemerintah, 2) dapat mengurangi resistensi pelaksanaan program, 3) perencanaan pembangunan akan sesuai dengan keinginan masyarakat, 4) adanya keterpaduan antara perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan pemerintah kabupaten, 5) menciptakan siklus pengawasan yang melibatkan warga masyarakat, karena terpaan informasi pembangunan juga menjangkau khalayak luas, 6) menghindari terjadinya distorsi informasi, karena pemerintah kabupaten sebagai sumber informasi melakukan interaksi dan komunikasi secara langsung dengan masyarakat; 7) Masyarakat dapat melakukan komunikasi ke atas/kepada pemerintah (*upward communication*) tanpa terbebani aturan birokrasi yang rumit.



GAMBAR 4.14
POLA KOMUNIKASI PENYEDIAAN PRASARANA PERDESAAN
YANG BERTUMPU PADA SUMBER DAYA LOKAL

Bagi Pemerintahan Desa, hasil penjangkaran inisiatif dan pendapat warga melalui forum jumatan dapat dijadikan sebagai bahan penyusunan Rencana Anggaran Belanja Desa (RAPBDes) dan Rencana Tahunan Desa yang akan diusulkan pada forum Musrenbang Tingkat Kecamatan. Penetapan APBDes, kelengkapan struktur proyek (PJOK/PJAK) dan keputusan tentang jenis, besar dan cara partisipasi dilakukan setelah mendengarkan pendapat warga dalam forum jumatan ini, sehingga lebih *legitimate*.

Melalui forum jumatan ini pula para pemuka masyarakat (agen perubahan) dapat mengekspresikan perannya sebagai penghubung (*linker*) dan penyampai/juru bicara (*spokesman*) keinginan masyarakat. Melalui forum ini para pemuka masyarakat dapat menyampaikan berbagai permasalahan yang berhubungan dengan prasarana perdesaan dan permasalahan publik lainnya. Begitu sebaliknya, pemerintah dapat meminta bantuan mereka untuk menyebarluaskan informasi-informasi yang telah disampaikan dalam forum jumatan kepada konstituennya melalui berbagai kelembagaan yang ada (jamaah sholat, jamiyah, majlis taklim, kelompok profesi, pertemuan RT/RW, forum pemuda, dll.), terutama yang berhubungan dengan informasi program, penggerakan dan penghimpunan dana, penggerakan swadaya gotong-royong.

Satu hal yang perlu ditekankan dalam pola komunikasi penyediaan prasarana perdesaan yang bertumpu pada sumber daya lokal ini yaitu proyek-proyek skala desa dari dana APBD yang biasa dikerjakan oleh kontraktor dan sering menjadi penyebab stagnasi difusi informasi dan interaksi antara pemerintah dan masyarakat, seyogyanya pelaksanaannya diserahkan kepada desa. Hal ini

didasarkan pada beberapa asumsi: 1) partisipasi masyarakat akan efektif apabila masyarakat sebagai penerima manfaat dan basis partisipasi sekaligus berperan sebagai pelaku kegiatan pembangunan; 2) penyerahan proyek-proyek tersebut akan memberikan akses pembelajaran bagi masyarakat (*social learning*) dan memungkinkan pemberdayaan institusi lokal, baik lembaga pemerintahan maupun lembaga kemasyarakatan (*civil society*); 3) masyarakat dapat mengontrol kegiatan pembangunan secara terbuka, sehingga transparansi dan akuntabilitas publik lebih terjaga; 4) selain dapat menopang pendapatan asli desa yang rendah, penyerahan proyek-proyek APBD tersebut juga dapat menjadi stimulus partisipasi warga, sebagaimana peran *aghiyak* yang mengawali dan memelopori pemberian bantuan dalam pembangunan sarana prasarana keagamaan; 5) pada umumnya kualitas bangunan yang dikerjakan oleh masyarakat lebih baik daripada oleh pihak ketiga sebab tidak adanya orientasi mencari keuntungan.

Selain melalui forum Musrenbang Tingkat Kecamatan, Pemerintah daerah dapat memanfaatkan forum jumatatan sebagai media untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakyat, yaitu dengan mengadakan inisiasi dan diseminasi program-program pembangunan. Kegiatan ini dapat dikemas dalam bentuk program '*Jumat Keliling*'.

Forum jumatatan dapat menjadi substitusi forum Musrenbangdes yang selama ini sulit terselenggara. Begitu pula komunikasi pembangunan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh lokal kepada warga masyarakat melalui forum-forum jamaah, forum jamiyah, majlis taklim, kelompok profesi, dan forum pemuda dapat dijadikan sebagai substitusi forum Murenbangdus.

Selanjutnya dalam rangka pengawasan kegiatan pembangunan prasarana perdesaan, maka selain dilakukan pelaporan keuangan, progres fisik dan evaluasi kegiatan sebagaimana mekanisme yang sudah ada, pelaporan juga dilakukan kepada warga masyarakat, baik melalui media papan pengumuman, maupun pengumuman secara langsung melalui forum jumatatan.

4.3 Model Komunikasi

4.3.1 Model Forum Komunikasi

Pola komunikasi secara faktual terlihat dalam keseluruhan tahapan kegiatan komunikasi yang dilaksanakan pada forum-forum komunikasi. Keikutsertaan warga, keterbukaan forum, rutinitas kegiatan dan kohesivitas forum adalah parameter-parameter untuk mengukur akses *stakeholders* dalam forum-forum komunikasi. Oleh karena itu, analisis model forum komunikasi akan mencerminkan tahapan-tahapan komunikasi dan penerapan prinsip-prinsip keikutsertaan, keterbukaan, rutinitas dan kohesivitas sebagai komponen penyusun model forum komunikasi.

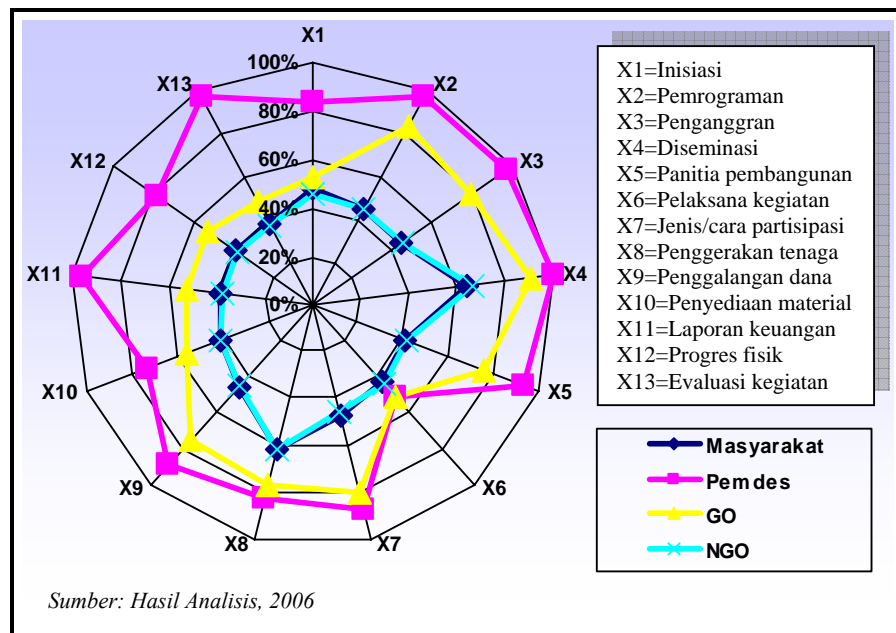
4.3.1.1 Analisis Diskriptif Model Forum Komunikasi

Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran secara diskriptif tentang: 1) penerapan prinsip-prinsip keikutsertaan, keterbukaan, rutinitas dan kohesivitas dalam setiap tahapan kegiatan komunikasi pembangunan; dan 2) perbedaan akses unsur-unsur stakeholders di level desa terhadap forum-forum komunikasi penyediaan prasarana perdesaan non keagamaan maupun keagamaan. Karena itu analisis didasarkan pada jawaban masing-masing unsur stakeholder pembangunan di kedua desa lokasi penelitian, yaitu sejumlah 142 responden

terdiri dari: 96 unsur masyarakat, 9 unsur pemerintahan desa, 15 unsur tokoh organisasi pemerintah dan 22 tokoh organisasi non pemerintah.

1. Prasarana Perdesaan Non Keagamaan

Keikutsertaan *stakeholders* dalam forum komunikasi penyediaan prasarana perdesaan non keagamaan dapat dilihat pada gambar 4.15, di mana X1-X13 menunjukkan kegiatan komunikasi sejak tahap perencanaan hingga tahap pengawasan.



GAMBAR 4.15
KEIKUTSERTAAN WARGA DALAM FORUM KOMUNIKASI
PENYEDIAAN PRASARANA PERDESAAN NON KEAGAMAAN

Tahap perencanaan (*planning*) meliputi: inisiasi perencanaan, penetapan program dan jadwal kegiatan, penetapan anggaran dan belanja kegiatan, dan diseminasi program. Tahap pengorganisasian (*organizing*) meliputi: pembentukan panitia pembangunan, penunjukan pelaksana kegiatan, serta pembahasan bentuk,

besar dan cara penggalangan partisipasi. Tahap penggerakan (*actuating*) meliputi: penggerakan swadaya gotong-royong, penggerakan dana pembangunan, dan penyediaan alat/material. Tahap pengawasan (*controlling*) meliputi: laporan keuangan, laporan progres fisik, dan evaluasi kegiatan.

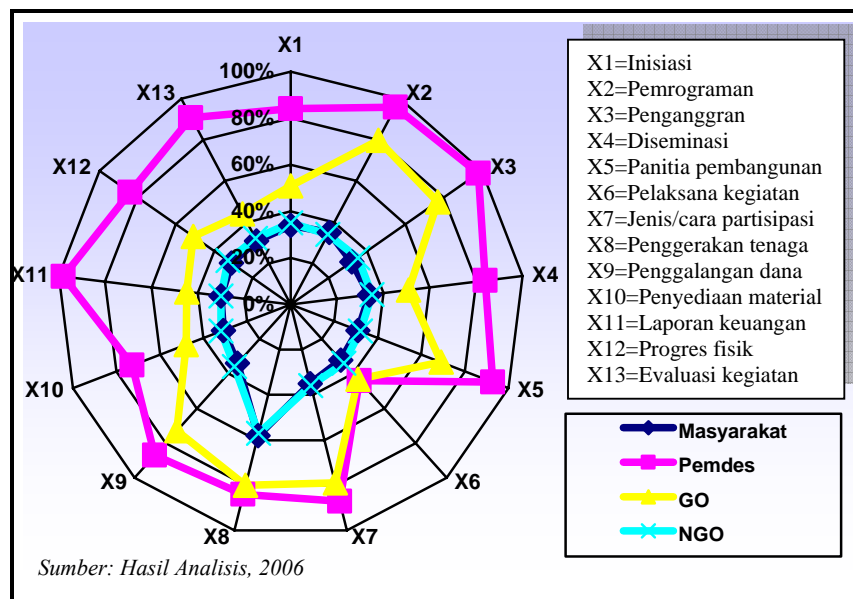
Berdasarkan gambar tersebut dapat diilustrasikan, bahwa secara umum pemerintahan desa merupakan *stakeholders* yang paling dominan keikutsertaannya dalam forum-forum komunikasi penyediaan prasarana perdesaan non keagamaan, disusul kemudian tokoh-tokoh dari organisasi pemerintah. Keterlibatan masyarakat dan tokoh-tokoh informal dari organisasi non pemerintah dalam forum-forum tersebut relatif rendah. Keikutsertaan mereka sedikit terlihat pada kegiatan diseminasi program dan penggerakan swadaya gotong-royong.

Penunjukan pelaksana kegiatan bukan termasuk kegiatan komunikasi yang utama, disebabkan: 1) LKMD secara otomatis menjadi pelaksana pembangunan (Perda 14 Tahun 2004), 2) Proyek-proyek lain yang berlokasi di desa (APBD, APBN) pelaksanaannya tidak melibatkan *stakeholders* di tingkat desa, tetapi dilakukan oleh instansi terkait melalui pihak ketiga.

Sekalipun tokoh-tokoh dari organisasi pemerintah relatif lebih tinggi keterlibatannya dalam kegiatan komunikasi dibanding unsur tokoh-tokoh informal, tetapi tidak semua aktivitas komunikasi dapat diikutinya. Pada kegiatan inisiasi mereka tidak banyak terlibat, sehingga tidak dapat secara leluasa memperjuangkan aspirasi warganya. Peran mereka masih terkesan menjadi alat pemerintah dalam melakukan mobilisasi dukungan warga, yaitu pembahasan cara

penggalangan partisipasi, swadaya gotong-royong, dan penggalan dana pembangunan.

Kondisi ini sangat berhubungan dengan pola komunikasi yang dijalankan oleh pemerintah selama ini yang kurang memberi ruang partisipasi (*public sphere*) bagi masyarakat dan tokoh-tokoh lembaga kemasyarakatan (*civil society*), terutama tokoh-tokoh informal lokal. Pemerintah belum dapat memanfaatkan saluran-saluran atau forum-forum lain sebagai alternatif untuk melakukan penyebaran pesan-pesan pembangunan, selain forum Musrenbang. Sedang forum Musrenbang sendiri masih merupakan forum komunikasi yang hanya tersentuh oleh elite birokrasi.



GAMBAR 4.16
KETERBUKAAN FORUM KOMUNIKASI
PENYEDIAAN PRASARANA PERDESAAN NON KEAGAMAAN

Selain lebih berpeluang untuk dapat mengikuti forum-forum komunikasi penyediaan prasarana perdesaan non keagamaan, dalam kapasitasnya sebagai

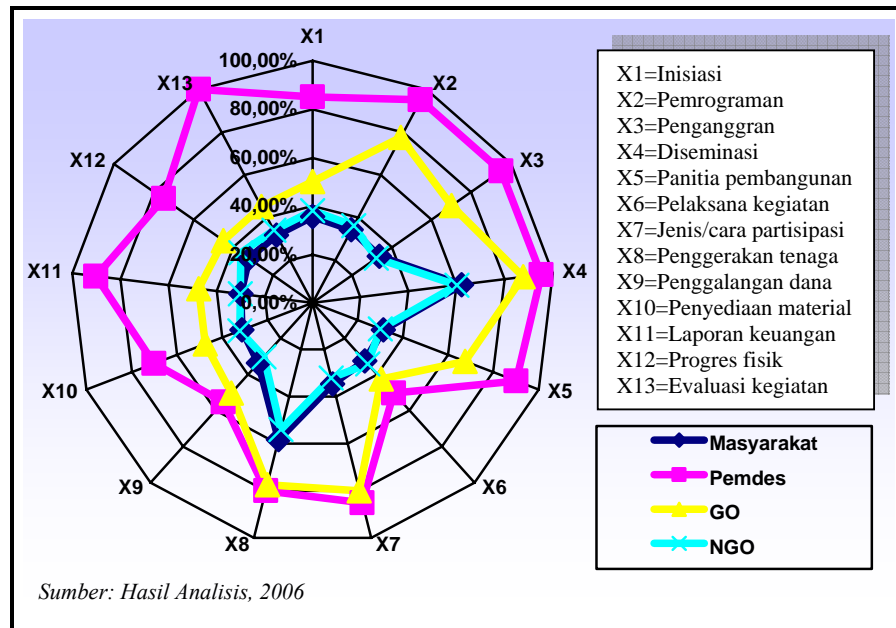
koordinator penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal, pemerintahan desa juga sangat dominan memperoleh informasi pembangunan secara terbuka, sebagaimana gambar 4.16.

Namun demikian, informasi yang dapat diakses oleh pemerintahan desa hanyalah sebatas dokumen-dokumen pembangunan yang berada dalam lingkup kewenangannya (DPD/K, APBDes), sebab mereka juga mengaku kesulitan memperoleh dokumen-dokumen perencanaan daerah sebagai acuan dalam menyusun perencanaan pembangunan di tingkat desa (tabel IV.5).

Desiminasi/sosialisasi yang pada gambar 4.15 sudah sedikit menjangkau unsur masyarakat dan tokoh-tokoh informal, namun pada gambar 4.16 dianggap sebagai forum yang kurang terbuka dalam menyampaikan informasi-informasi pembangunan. Hal ini membuktikan bahwa kegiatan desiminasi masih bersifat informatif, yaitu sekadar menyampaikan informasi tentang adanya kegiatan proyek dan belum mengutamakan *feedback* (umpan balik) yang dilakukan secara dialogis ataupun deliberatif.

Akibat keterlibatan unsur masyarakat dan tokoh-tokoh informal dalam forum-forum komunikasi penyediaan prasarana perdesaan non keagamaan rendah, maka secara otomatis rutinitas kegiatan forum dalam pandangan kedua unsur stakeholders tersebut juga rendah. Adanya kejegan skor kegiatan pembahasan swadaya gotong-royong pada indikator rutinitas kegiatan (gambar 4.17) membuktikan, bahwa pemerintah masih memposisikan masyarakat sebagai sumber tenaga bagi kelancaran proyek-proyek pemerintah (obyek pembangunan) dan tidak sebagai pelaku pembangunan yang harus diberdayakan, dengan

melibatkan mereka secara rutin dalam keseluruhan tahapan komunikasi pembangunan.

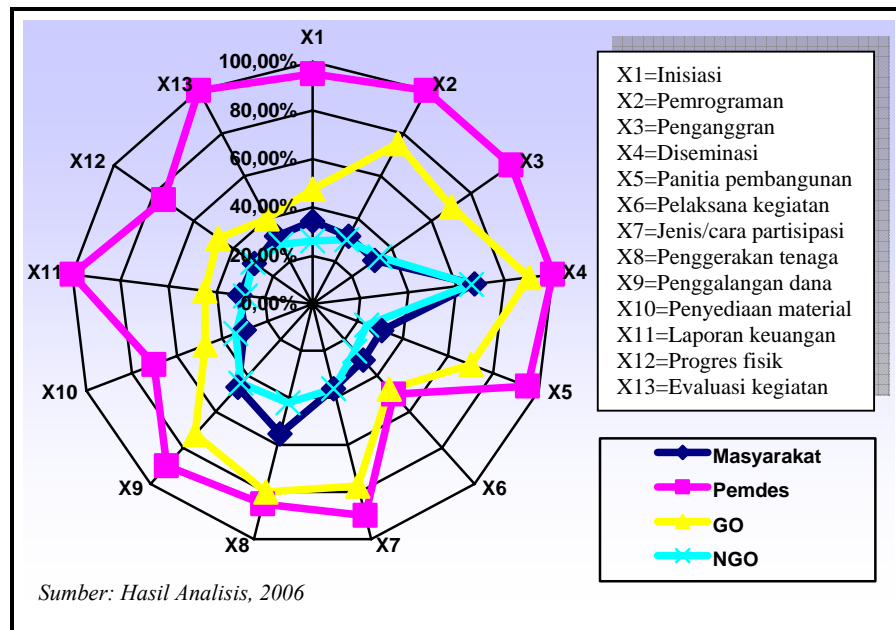


GAMBAR 4.17
RUTINITAS KEGIATAN FORUM KOMUNIKASI
PENYEDIAAN PRASARANA PERDESAAN NON KEAGAMAAN

Selanjutnya pada gambar 4.18 menguatkan adanya suatu kecenderungan, bahwa keterikatan orang terhadap suatu forum (kohesivitas forum) sangat bergantung pada ada tidaknya peluang atau kesempatan baginya untuk dapat mengikuti forum tersebut.

Unsur pemerintahan desa merasa lebih terikat dengan forum-forum komunikasi karena selain penyediaan prasarana perdesaan sangat terkait dengan bidang tugasnya, pola komunikasi yang ada telah memposisikan mereka sebagai pihak yang paling dominan dibanding *stakeholders* yang lain. Sedang unsur masyarakat dan tokoh-tokoh organisasi non pemerintah merasa dirinya tidak terikat dengan forum karena mereka selama ini menjadi pihak yang selalu

teraleniassi dalam proses pembangunan, dan forum-forum komunikasi yang dipergunakan sebagai media komunikasi pembangunan seperti Musrenbang hanya mengakomodir kalangan birokrasi.

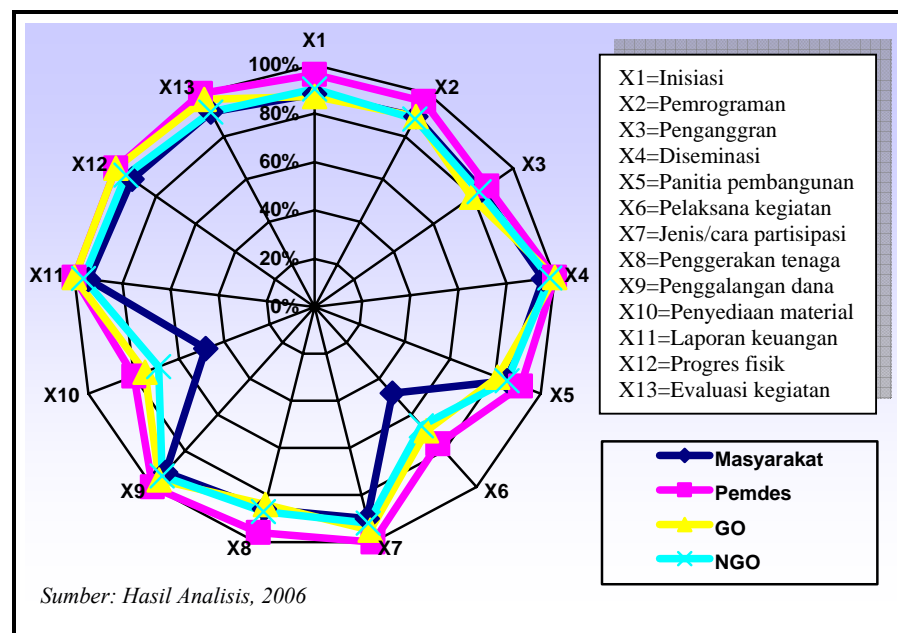


GAMBAR 4.18
KOHESIVITAS FORUM KOMUNIKASI
PENYEDIAAN PRASARANA PERDESAAN NON KEAGAMAAN

2. Sarana Prasarana Keagamaan

Sebagai pembanding patut dilihat bagaimana gambaran tentang forum komunikasi dalam penyediaan sarana prasarana keagamaan. Gambar 4.19 memperlihatkan adanya peran dan proses pemberdayaan yang berkesinambungan dalam keseluruhan tahapan komunikasi penyediaan sarana prasarana keagamaan. Dalam tahap perencanaan semua *stakeholders* memiliki kesempatan yang sama untuk dapat ikutserta mengekspresikan peran mereka dalam forum-forum perencanaan sarana prasarana keagamaan. Penggunaan forum jamaah dan jamiyah

sebagai media pembahasan masalah-masalah pembangunan sarana prasarana keagamaan dapat menjaring partisipasi semua pihak dalam proses perencanaan (tabel IV.2).

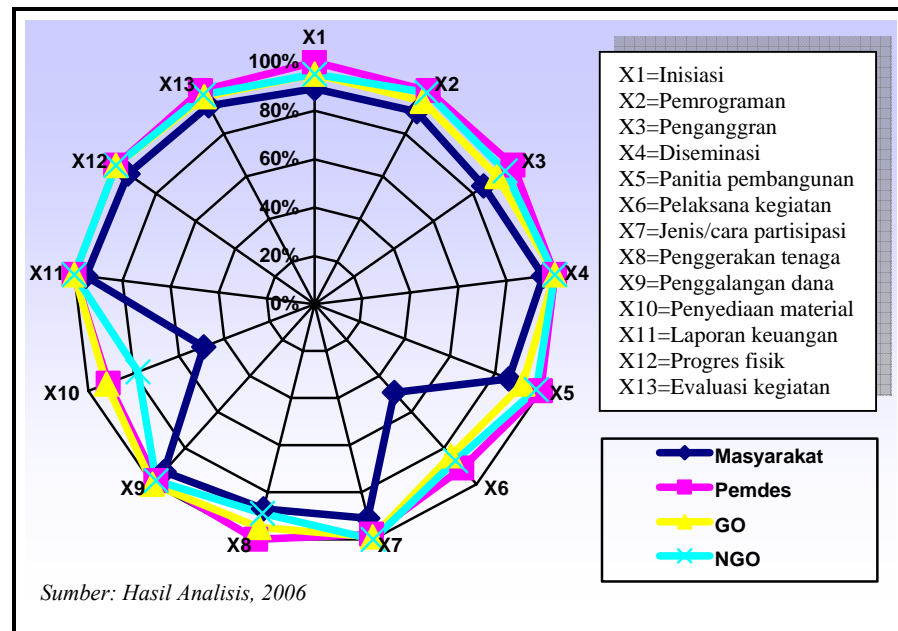


GAMBAR 4.19
KEIKUTSERTAAN WARGA DALAM FORUM KOMUNIKASI
PENYEDIAAN SARANA PRASARANA KEAGAMAAN

Pada kegiatan pembahasan pelaksana kegiatan dan penyediaan alat/material terlihat berkurangnya keikutsertaan masyarakat, disebabkan: 1) pembangunan sarana prasarana keagamaan tidak dilakukan secara kontraktual tetapi lebih mengandalkan peranserta masyarakat, 2) pelaksana kegiatan dalam arti tenaga harian dan penyediaan alat/material cukup dibahas pada rapat panitia. Hal ini tidak terlalu menjadi masalah karena: a) Masyarakat terlibat dalam pembentukan panitia, sehingga legitimasi panitia untuk melakukan langkah-langkah strategis lebih kuat, termasuk perkiraan kebutuhan tenaga dan alat/material; b) Masyarakat tetap memperoleh informasi tentang kegiatan tersebut

melalui laporan pertanggungjawaban panitia sebagaimana tercermin dalam laporan keuangan, progres fisik, dan evaluasi kegiatan, baik melalui pengumuman langsung dalam forum jama'ah maupun melalui papan pengumuman yang dapat dibaca oleh warga masyarakat.

Namun demikian pada hal-hal tertentu, Panitia Pembangunan merasa perlu berkonsultasi dengan tokoh-tokoh masyarakat, terbukti persentase keikutsertaan unsur pemerintahan desa, tokoh organisasi pemerintah dan tokoh organisasi non pemerintah melebihi persentase keikutsertaan unsur masyarakat.

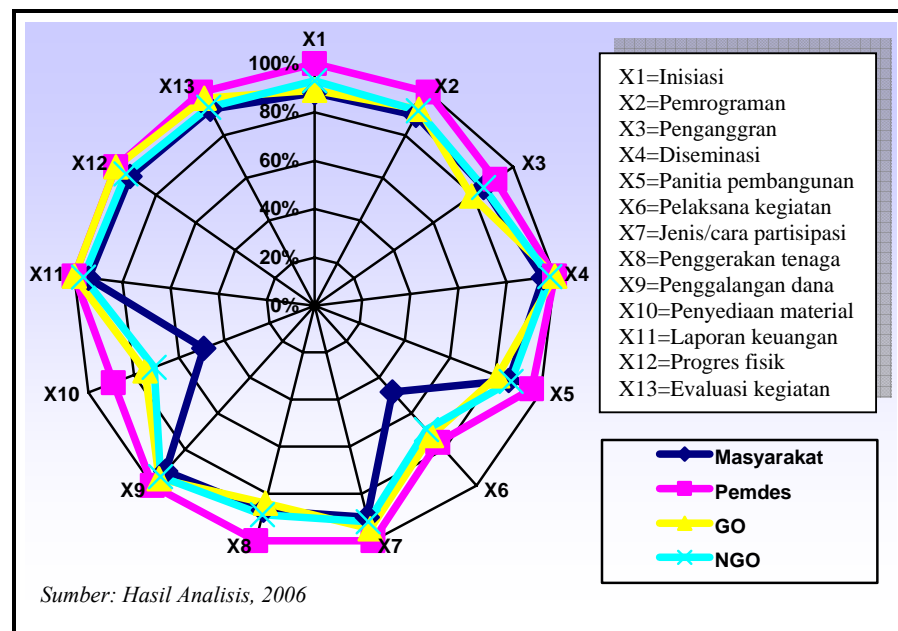


GAMBAR 4.20
KETERBUKAAN FORUM KOMUNIKASI
PENYEDIAAN SARANA PRASARANA KEAGAMAAN

Pada gambar 4.20, memberi informasi tentang keterbukaan forum. Selain kegiatan komunikasi yang berhubungan dengan penentuan pekerja harian dan penyediaan material yang biasanya cukup dilakukan oleh Panitia Pembangunan,

maka keterbukaan kegiatan komunikasi pembangunan penyediaan sarana prasarana keagamaan yang lain relatif sangat tinggi.

Grafik radar rutinitas forum komunikasi penyediaan sarana prasarana keagamaan pada gambar 4.21 tidak jauh berbeda dengan garik keikutsertaan maupun grafik keterbukaan (gambar 4.20). Semua unsur stakeholders pembangunan menilai, cenderung mengakui bahwa dirinya secara rutin mengikuti setiap kegiatan komunikasi penyediaan sarana prasarana keagamaan yang ada. Yang membedakan hanyalah rutinitas keikutsertaan unsur masyarakat pada tahapan pembahasan tenaga harian dan penyediaan alat atau material yang diperlukan bagi pembangunan sarana prasarana keagamaan.

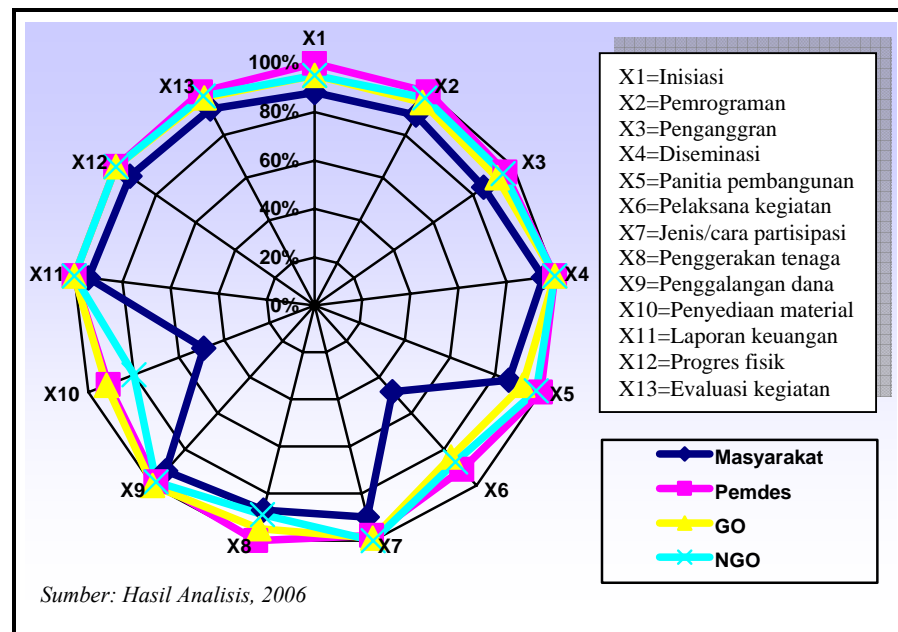


GAMBAR 4.21
RUTINITAS FORUM KOMUNIKASI
PENYEDIAAN SARANA PRASARANA KEAGAMAAN

Melihat perhatian masyarakat yang tinggi terhadap pembangunan sarana prasarana keagamaan (gambar 4.11), maka rendahnya rutinitas masyarakat dalam

mengikuti proses pembahasan kebutuhan tenaga dan alat/material sebagai sesuatu yang dapat dimaklumi, karena mereka telah memberi mandat kepada Panitia.

Dalam komunikasi penyediaan sarana prasarana keagamaan keterikatan warga terhadap forum juga sangat tinggi. Sebagaimana ditunjukkan oleh gambar 4.21 bahwa rata-rata kohesivitas forum sangat tinggi, hal ini dikarenakan kegiatan komunikasi penyediaan sarana prasarana keagamaan memanfaatkan forum-forum yang memang secara rutin dihadiri oleh warga, yaitu lembaga-lembaga keagamaan (masjid/musholla, jamiyah/majlis taklim, pengajian umum, dll) sebagaimana tabel IV.2.



GAMBAR 4.22
KOHESIVITAS FORUM KOMUNIKASI
PENYEDIAAN SARANA PRASARANA KEAGAMAAN

Lembaga-lembaga keagamaan tersebut sangat akrab dengan aktivitas keseharian warga (*community friendly*). Kegiatan sholat berjamaah sehari lima waktu, kegiatan jamiyah/majlis taklim yang biasa dilakukan secara mingguan,

bulanan atau selapanan adalah moment-moment di mana masyarakat dapat berkumpul. Selain dalam rangka menjalankan kewajiban agamanya, seringkali forum-forum tersebut dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh agama untuk menyampaikan berbagai informasi yang berhubungan dengan sarana prasarana keagamaan.

Pada gambar 4.22, hanya terlihat dua kegiatan komunikasi yang warga merasa tidak harus ikut, yaitu pembahasan pelaksana kegiatan/pekerja harian dan penyediaan alat/material bagi pembangunan prasarana. Umumnya dua kegiatan ini cukup dibahas dalam rapat panitia.

4.3.1.2 Analisis Ujiterap Model Forum Komunikasi

Analisis ujiterap model forum komunikasi adalah analisis yang dilakukan untuk membuktikan dapat tidaknya komponen dan struktur model hipotetik forum komunikasi diterapkan sebagai model forum komunikasi penyediaan prasarana perdesaan non keagamaan (*model eksperimen*) dan model forum komunikasi penyediaan sarana prasarana keagamaan (*model kontrol*).

Oleh karena partisipasi masyarakat merupakan tujuan dari penggunaan model, maka teknik yang dilakukan, yaitu dengan cara menguji signifikansi hubungan antara masing-masing variabel yang menjadi komponen penyusun model forum komunikasi (X) dengan tingkat partisipasi masyarakat (Y). Uji signifikansi model forum komunikasi dilakukan dengan teknik analisis korelasi *bivariate 'Pearson Product Moment'*. Analisis ujiterap model forum komunikasi dilakukan dari dua sisi, yaitu didasarkan pada perbedaan lokasi dan perbedaan jenis prasarana, sehingga ujiterap dilakukan dalam empat tahap.

TABEL IV.7
HASIL UJITERAP MODEL HIPOTETIK
FORUM KOMUNIKASI

No	Tahap Komunikasi	Kode	rh	Non Keagamaan		Keagamaan		Ket
			p	Morodemak	Purwosari	Morodemak	Purwosari	
A.	Perencanaan	FA	rh	0,911	0,946	0,896	0,9595	Sig
			p	0,000	0,000	0,000	0,000	
1	Inisiasi rencana	X1	rh	0,800	0,793	0,840	0,895	Sig
			p	0,000	0,000	0,000	0,000	
2	Pembahasan Program & Jadwal	X2	rh	0,802	0,878	0,840	0,900	Sig
			p	0,000	0,000	0,000	0,000	
3	Pembahasan RAB	X3	rh	0,837	0,904	0,850	0,915	Sig
			p	0,000	0,000	0,000	0,000	
4	Diseminasi program	X4	rh	0,781	0,782	0,780	0,782	Sig
			p	0,000	0,000	0,000	0,000	
B	Pengorganisasian	FB	rh	0,883	0,931	0,902	0,942	Sig
			p	0,000	0,000	0,000	0,000	
5	Pembentukan Panitia	X5	rh	0,822	0,893	0,860	0,925	Sig
			p	0,000	0,000	0,000	0,000	
6	Penunjukan pelaksana	X6	rh	0,780	0,681	0,802	0,764	Sig
			p	0,000	0,000	0,000	0,000	
7	Pembahasan jenis & cara partisipasi	X7	rh	0,797	0,860	0,781	0,906	Sig
			p	0,000	0,000	0,000	0,000	
C	Penggerakan	FC	rh	0,908	0,933	0,910	0,9590	Sig
			p	0,000	0,000	0,000	0,000	
8	Penggerakan gotong-royong	X8	rh	0,689	0,659	0,833	0,906	Sig
			p	0,000	0,000	0,000	0,000	
9	Penghimpunan dana	X9	rh	0,823	0,893	0,742	0,914	Sig
			p	0,000	0,000	0,000	0,000	
10	Penyediaan alat/material	X10	rh	0,755	0,732	0,810	0,797	Sig
			p	0,000	0,000	0,000	0,000	
D	Pengawasan	FD	rh	0,824	0,825	0,778	0,849	Sig
			p	0,000	0,000	0,000	0,000	
11	Laporan keuangan	X11	rh	0,769	0,797	0,747	0,811	Sig
			p	0,000	0,000	0,000	0,000	
12	Laporan progres fisik	X12	rh	0,848	0,795	0,756	0,818	Sig
			p	0,000	0,000	0,000	0,000	
13	Laporan evaluasi kerja	X13	rh	0,765	0,791	0,758	0,833	Sig
			p	0,000	0,000	0,000	0,000	
	TOTAL FORUM	F	rh	0,936	0,956	0,924	0,983	Sig
			p	0,000	0,000	0,000	0,000	
1	Keikutsertaan	F1	rh	0,866	0,8817	0,881	0,953	Sig
			p	0,000	0,000	0,000	0,000	
2	Keterbukaan	F2	rh	0,883	0,8825	0,9179	0,947	Sig
			p	0,000	0,000	0,000	0,000	
3	Rutinitas	F3	rh	0,884	0,924	0,898	0,974	Sig
			p	0,000	0,000	0,000	0,000	
4	Kohesivitas	F4	rh	0,875	0,914	0,9181	0,951	Sig
			p	0,000	0,000	0,000	0,000	
No	Tahap Komunikasi	Kode	rh	Morodemak	Purwosari	Morodemak	Purwosari	Ket
			p	Non Keagamaan		Keagamaan		

Sumber: Hasil Analisis, 2006

1. Model Forum Komunikasi Penyediaan Prasarana perdesaan non keagamaan di Desa Morodemak (*Model Eksperimen*)

Untuk wilayah penelitian Desa Morodemak, analisis dilakukan terhadap 77 responden ($N=77$), dengan tingkat signifikansi (α) 5% dan df ($N-2=75$) diketahui nilai r_t (r -tabel) = 0,189. Sesuai hasil ujiterap model hipotetik forum komunikasi (tabel IV.7), diketahui nilai r_h (r hitung) untuk semua komponen model forum komunikasi $> r_t$ (r -tabel) dan $p < \alpha$ (0,005), dengan total $r_h = 0,936$ (sangat kuat), sehingga baik substansi maupun struktur model hipotetik forum komunikasi terbukti secara signifikan dapat diterapkan sebagai model forum komunikasi penyediaan prasarana perdesaan non keagamaan (*model eksperimen*) di Desa Morodemak, dengan ketentuan:

- Berdasarkan tahapannya, kegiatan komunikasi pada tahap perencanaan memiliki tingkat hubungan yang paling kuat ($r_h=0,911$), disusul kemudian tahap penggerakan ($r_h=0,908$), tahap pengorganisasian ($r_h=0,883$), kemudian tahap pengawasan ($r_h=0,824$).
- Tingkat keeratan hubungan kegiatan komunikasi pada tahap perencanaan berturut-turut: pembahasan rencana anggaran dan belanja kegiatan ($r_h=0,837$), pembahasan program dan jadwal kegiatan ($r_h=0,802$), inisiasi rencana ($r_h=0,800$), diseminasi program ($r_h=0,781$).
- Tingkat keeratan hubungan kegiatan komunikasi pada tahap pengorganisasian berturut-turut: pembentukan panitia pembangunan ($r_h=0,822$), pembahasan jenis, besar dan cara penggalangan partisipasi ($r_h=0,797$), penunjukan pelaksana ($r_h=0,780$).

- Tingkat keeratan hubungan kegiatan komunikasi pada tahap pergerakan berturut-turut: penghimpunan dana ($rh=0,823$), penyediaan alat/material ($rh=0,755$), pergerakan gotong-royong ($rh=0,689$).
- Tingkat keeratan hubungan kegiatan komunikasi pada tahap pengawasan berhurut-turut: laporan progres fisik ($rh=0,848$), laporan keuangan ($rh=0,769$), evaluasi kegiatan ($rh=0,765$).
- Berdasarkan penerapan prinsip-prinsip forum komunikasi, maka rutinitas kegiatan memiliki tingkat hubungan yang paling tinggi ($rh=0,884$), disusul kemudian keterbukaan forum ($rh=0,883$), kohesivitas forum ($rh=0,875$), keikutserhaan ($rh=0,866$)

2. Model Forum Komunikasi Penyediaan Prasarana perdesaan non keagamaan di Desa Purwosari (*Model Eksperimen*)

Untuk wilayah penelitian Desa Purwosari, analisis dilakukan terhadap 65 responden ($N=65$), dengan tingkat signifikansi (α) 5% dan df ($N-2=63$) diketahui nilai rt (r -tabel) = 0,206. Sesuai hasil ujiterap model hipotetik forum komunikasi (tabel IV.7), diketahui nilai rh (r hitung) untuk semua komponen model forum komunikasi $> rt$ (r -tabel) dan $p < \alpha$ (0,005), dengan total $rh = 0,956$ (hubungan sangat kuat), sehingga baik substansi maupun struktur model hipotetik forum komunikasi terbukti secara signifikan dapat diterapkan sebagai model forum komunikasi penyediaan prasarana perdesaan non keagamaan (*model eksperimen*) di Desa Purwosari, dengan ketentuan:

- Berdasarkan tahapannya, kegiatan komunikasi pada tahap perencanaan memiliki tingkat hubungan yang paling kuat ($rh=0,946$), disusul kemudian

tahap pergerakan ($rh=0,933$), tahap pengorganisasian ($rh=0,931$), kemudian tahap pengawasan ($rh=0,825$).

- Tingkat keeratan hubungan kegiatan komunikasi pada tahap perencanaan berturut-turut: pembahasan rencana anggaran dan belanja kegiatan ($rh=0,904$), pembahasan program dan jadwal kegiatan ($rh=0,878$), inisiasi rencana ($rh=0,793$), diseminasi program ($rh=0,782$).
- Tingkat keeratan hubungan kegiatan komunikasi pada tahap pengorganisasian berturut-turut: pembentukan panitia pembangunan ($rh=0,893$), pembahasan jenis, besar dan cara penggalangan parhisipasi ($rh=0,860$), penunjukan pelaksana ($rh=0,681$).
- Tingkat keeratan hubungan kegiatan komunikasi pada tahap pergerakan berturut-turut: penghimpunan dana ($rh=0,893$), penyediaan alat/material ($rh=0,732$), pergerakan gotong-royong ($rh=0,659$).
- Tingkat keeratan hubungan kegiatan komunikasi pada tahap pengawasan berhurut-turut: laporan keuangan ($rh=0,797$), laporan progres fisik ($rh=0,795$), evaluasi kegiatan ($rh=0,791$).
- Berdasarkan penerapan prinsip-prinsip forum komunikasi, maka rutinitas kegiatan memiliki tingkat hubungan yang paling tinggi ($rh=0,924$), kohesivitas forum ($rh=0,914$), keterbukaan forum ($rh=0,8825$), keikutsertaan ($rh=0,8817$).

3. Model Forum Komunikasi Penyediaan Sarana prasarana keagamaan di Desa Morodemak (*Model Kontrol*)

Untuk wilayah penelitian Desa Morodemak, analisis dilakukan terhadap 77 responden ($N=77$), dengan tingkat signifikansi (α) 5% dan df ($N-2=75$) diketahui

nilai r_t (r-tabel) = 0,189. Sesuai hasil ujiterap model hipotetik forum komunikasi (tabel IV.7), diketahui nilai r_h (r hitung) untuk semua komponen model forum komunikasi $> r_t$ (r-tabel) dan $p < \alpha$ (0,005), dengan total $r_h = 0,924$, sehingga baik substansi maupun struktur model hipotetik forum komunikasi terbukti secara signifikan dapat diterapkan sebagai model forum komunikasi penyediaan sarana prasarana keagamaan (*model kontrol*) di Desa Morodemak, dengan ketentuan:

- Berdasarkan tahapannya, kegiatan komunikasi pada tahap penggerakan memiliki tingkat hubungan yang paling kuat ($r_h=0,910$), disusul kemudian tahap pengorganisasian ($r_h=0,902$), tahap perencanaan ($r_h=0,896$), kemudian tahap pengawasan ($r_h=0,778$).
- Tingkat keeratan hubungan kegiatan komunikasi pada tahap perencanaan berturut-turut: pembahasan rencana anggaran dan belanja kegiatan ($r_h=0,850$), inisiasi rencana ($r_h=0,840$), pembahasan program dan jadwal kegiatan ($r_h=0,840$), diseminasi program ($r_h=0,780$).
- Tingkat keeratan hubungan kegiatan komunikasi pada tahap pengorganisasian berturut-turut: pembentukan panitia pembangunan ($r_h=0,860$), penunjukan pelaksana ($r_h=0,802$), pembahasan jenis, besar dan cara penggalangan parhisipasi ($r_h=0,781$).
- Tingkat keeratan hubungan kegiatan komunikasi pada tahap penggerakan berturut-turut: penggerakan gotong-royong ($r_h=0,833$), penyediaan alat/material ($r_h=0,810$), penghimpunan dana ($r_h=0,742$).

- Tingkat keeratan hubungan kegiatan komunikasi pada tahap pengawasan berhurut-turut: evaluasi kegiatan ($rh=0,758$), laporan progres fisik ($rh=0,756$), laporan keuangan ($rh=0,746$).
- Berdasarkan penerapan prinsip-prinsip forum komunikasi, maka kohesivitas kegiatan memiliki tingkat hubungan yang paling tinggi ($rh=0,9181$), keterbukaan forum ($rh=0,9179$), rutinitas kegiatan ($rh=0,898$), keikutserhaan ($rh=0,881$).

4. Model Forum Komunikasi Penyediaan Sarana prasarana keagamaan di Desa Purwosari (*Model Kontrol*)

Untuk wilayah penelitian Desa Purwosari, analisis dilakukan terhadap 65 responden ($N=65$), dengan tingkat signifikansi (α) 5% dan df ($N-2=63$) diketahui nilai rt (r -tabel) = 0,206. Sesuai hasil ujiterap model hipotetik forum komunikasi (tabel IV.7), diketahui nilai rh (r hitung) untuk semua komponen model forum komunikasi $> rt$ (r -tabel) dan $p < \alpha$ (0,005), dengan total $rh = 0,983$, sehingga baik substansi maupun struktur model hipotetik forum komunikasi terbukti secara signifikan dapat diterapkan sebagai model forum komunikasi penyediaan sarana prasarana keagamaan (*model kontrol*) di Desa Purwosari, dengan ketentuan:

- Berdasarkan tahapannya, kegiatan komunikasi pada tahap perencanaan memiliki tingkat hubungan yang paling kuat ($rh=0,9595$), disusul kemudian tahap penggerakan ($rh=0,9590$), tahap pengorganisasian ($rh=0,942$), kemudian tahap pengawasan ($rh=0,849$).
- Tingkat keeratan hubungan kegiatan komunikasi pada tahap perencanaan berturut-turut: pembahasan rencana anggaran dan belanja kegiatan

($rh=0,915$), pembahasan program dan jadwal kegiatan ($rh=0,900$), inisiasi rencana ($rh=0,895$), diseminasi program ($rh=0,782$).

- Tingkat keeratan hubungan kegiatan komunikasi pada tahap pengorganisasian berturut-turut: pembentukan panitia pembangunan ($rh=0,925$), pembahasan jenis, besar dan cara penggalangan partisipasi ($rh=0,906$), penunjukan pelaksana ($rh=0,764$).
- Tingkat keeratan hubungan kegiatan komunikasi pada tahap penggerakan berturut-turut: penghimpunan dana ($rh=0,914$), penggerakan gotong-royong ($rh=0,906$), penyediaan alat/material ($rh=0,797$).
- Tingkat keeratan hubungan kegiatan komunikasi pada tahap pengawasan berhurut-turut: laporan evaluasi kegiatan ($rh=0,833$), laporan progres fisik ($rh=0,818$), laporan keuangan ($rh=0,811$).
- Berdasarkan penerapan prinsip-prinsip forum komunikasi, maka rutinitas kegiatan memiliki tingkat hubungan yang paling tinggi ($rh=0,974$), keikutserhaan ($rh=0,953$), kohesivitas ($rh=0,951$), keterbukaan ($rh=0,947$).

4.3.2 Analisis Model Teknik Komunikasi

Analisis model teknik komunikasi dilakukan dengan melakukan ujiterap model hipotetik teknik komunikasi adalah analisis yang dilakukan untuk membuktikan dapat tidaknya komponen dan struktur model hipotetik teknik komunikasi diterapkan sebagai model teknik komunikasi penyediaan prasarana perdesaan non keagamaan (*model eksperimen*) dan model teknik komunikasi penyediaan sarana prasarana keagamaan (*model kontrol*).

Oleh karena partisipasi masyarakat merupakan tujuan dari penggunaan model, maka teknik yang dilakukan, yaitu dengan cara menguji signifikansi hubungan antara masing-masing variabel yang menjadi komponen penyusun model teknik komunikasi (X) dengan tingkat partisipasi masyarakat (Y). Uji signifikansi model teknik komunikasi dilakukan dengan teknik analisis korelasi *bivariate 'Pearson Product Moment'*.

TABEL IV.8
HASIL UJITERAP MODEL HIPOTETIK
TEKNIK KOMUNIKASI

No	Teknik Komunikasi	Kode	rh	Non Keagamaan		Keagamaan		Ket
			p	Morodemak	Purwosari	Morodemak	Purwosari	
1	Dua Tahap	T1	rh	0,733	0,837	0,819	0,791	Sig
			p	0,000	0,000	0,000	0,000	
2	Persuasif	T2	rh	0,828	0,863	0,812	0,869	Sig
			p	0,000	0,000	0,000	0,000	
3	Dialogis/Dua Arah	T3	rh	0,780	0,821	0,809	0,801	Sig
			p	0,000	0,000	0,000	0,000	
4	Deliberatif	T4	rh	0,888	0,929	0,813	0,855	Sig
			p	0,000	0,000	0,000	0,000	
	TOTAL	T	rh	0,872	0,919	0,842	0,877	Sig
			p	0,000	0,000	0,000	0,000	

Sumber: Hasil Analisis, 2006

Analisis ujiterap model teknik komunikasi dilakukan dari dua sisi, yaitu didasarkan pada perbedaan lokasi dan perbedaan jenis prasarana, sehingga akan menghasilkan empat model sebagai berikut:

1. Model Teknik Komunikasi Penyediaan Prasarana perdesaan non keagamaan di Desa Morodemak (*Model Eksperimen*)

Untuk wilayah penelitian Desa Morodemak, analisis dilakukan terhadap 77 responden (N=77), dengan tingkat signifikansi (α) 5% dan df (N-2=75) diketahui nilai rt (r-tabel) = 0,189. Sesuai hasil ujiterap model hipotetik teknik komunikasi (tabel IV.8), diketahui nilai rh (r hitung) untuk semua komponen model forum komunikasi $> rt$ (r-tabel) dan $p < \alpha$ (0,005), dengan total $rh = 0,872$, sehingga baik substansi maupun struktur model hipotetik teknik komunikasi terbukti secara

signifikan dapat diterapkan sebagai model teknik komunikasi penyediaan prasarana perdesaan non keagamaan (*model eksperimen*) di Desa Morodemak

Adapun tingkat keeratan hubungan masing-masing variabel (komponen) teknik komunikasi terhadap partisipasi masyarakat dari yang tertinggi berturut-turut: teknik komunikasi deliberatif ($rh=0,888$), teknik komunikasi persuasif ($rh=0,828$), teknik komunikasi dialogis/dua arah ($rh=0,780$), teknik komunikasi dua tahap ($rh=0,733$).

2. Model Teknik Komunikasi Penyediaan Prasarana perdesaan non keagamaan di Desa Purwosari (*Model Eksperimen*)

Untuk wilayah penelitian Desa Purwosari, analisis dilakukan terhadap 65 responden ($N=65$), dengan tingkat signifikansi (α) 5% dan df ($N-2=63$) diketahui nilai r_t (r -tabel) = 0,206. Sesuai hasil ujiterap model hipotetik teknik komunikasi (tabel IV.8), diketahui nilai rh (r hitung) untuk semua komponen model forum komunikasi $> r_t$ (r -tabel) dan $p < \alpha$ (0,005), dengan total $rh = 0,919$, sehingga baik substansi maupun struktur model hipotetik teknik komunikasi terbukti secara signifikan dapat diterapkan sebagai model teknik komunikasi penyediaan prasarana perdesaan non keagamaan (*model eksperimen*) di Desa Purwosari.

Adapun tingkat keeratan hubungan masing-masing variabel (komponen) teknik komunikasi terhadap partisipasi masyarakat dari yang tertinggi berturut-turut: teknik komunikasi deliberatif ($rh=0,888$), teknik komunikasi persuasif ($rh=0,828$), teknik komunikasi dialogis/dua arah ($rh=0,780$), teknik komunikasi dua tahap ($rh=0,733$).

3. Model Teknik Komunikasi Penyediaan Sarana prasarana keagamaan di Desa Morodemak (*Model Kontrol*)

Untuk wilayah penelitian Desa Morodemak, analisis dilakukan terhadap 77 responden ($N=77$), dengan tingkat signifikansi (α) 5% dan df ($N-2=75$) diketahui nilai r_t (r-tabel) = 0,189. Sesuai hasil ujiterap model hipotetik teknik komunikasi (tabel IV.8), diketahui nilai r_h (r hitung) untuk semua komponen model forum komunikasi $> r_t$ (r-tabel) dan $p < \alpha$ (0,005), dengan total $r_h = 0,872$, sehingga baik substansi maupun struktur model hipotetik teknik komunikasi terbukti secara signifikan dapat diterapkan sebagai model teknik komunikasi penyediaan sarana prasarana keagamaan (*model kontrol*) di Desa Morodemak

Adapun tingkat keeratan hubungan masing-masing variabel (komponen) teknik komunikasi terhadap partisipasi masyarakat dari yang tertinggi berturut-turut: teknik komunikasi dua tahap ($r_h=0,819$), teknik komunikasi deliberatif ($r_h=0,813$), teknik komunikasi persuasif ($r_h=0,812$), teknik komunikasi dialogis ($r_h=0,809$).

4. Model Teknik Komunikasi Penyediaan Sarana prasarana keagamaan di Desa Purwosari (*Model Kontrol*)

Untuk wilayah penelitian Desa Purwosari, analisis dilakukan terhadap 65 responden ($N=65$), dengan tingkat signifikansi (α) 5% dan df ($N-2=63$) diketahui nilai r_t (r-tabel) = 0,206. Sesuai hasil ujiterap model hipotetik teknik komunikasi (tabel IV.8), diketahui nilai r_h (r hitung) untuk semua komponen model forum komunikasi $> r_t$ (r-tabel) dan $p < \alpha$ (0,005), dengan total $r_h = 0,919$, sehingga baik substansi maupun struktur model hipotetik teknik komunikasi terbukti secara signifikan dapat diterapkan sebagai model teknik komunikasi penyediaan sarana prasarana keagamaan (*model kontrol*) di Desa Purwosari.

Adapun tingkat keeratan hubungan masing-masing variabel (komponen) teknik komunikasi terhadap partisipasi masyarakat dari yang tertinggi berturut-turut: teknik komunikasi persuasif ($rh=0,869$), teknik komunikasi deliberatif ($rh=0,855$), teknik komunikasi dialogis/dua arah ($rh=0,801$), teknik komunikasi dua tahap ($rh=0,791$).

4.4 Validasi Model Komunikasi Penyediaan Prasarana Perdesaan Non Keagamaan

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, adalah mengembangkan model komunikasi pembangunan dalam penyediaan prasarana perdesaan non keagamaan di kawasan Pesisir Utara Jawa Tengah dengan cara mengadopsi model komunikasi penyediaan sarana prasarana keagamaan yang sudah terbukti mampu mendorong partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, setelah rumuskan model eksperimen dan model kontrol berdasarkan hasil ujiterap model hipotetik, langkah berikutnya adalah melakukan validasi model penyediaan prasarana perdesaan non keagamaan dengan melihat tingkat kesesuaian model komunikasi penyediaan prasarana perdesaan non keagamaan (*model eksperimen*) terhadap model komunikasi penyediaan sarana prasarana keagamaan (*model kontrol*). Hal ini sesuai dengan pernyataan Sugiyono, bahwa validasi model dapat dilakukan dengan cara membandingkan keadaan sebelum dan sesudah penggunaan model (*before-after*) atau membandingkan model eksperimen dengan model kontrol (Sugiyono, 2006:339). Output yang diharapkan dari analisis ini adalah adanya rumusan temuan studi.

Validasi model pada penelitian ini menggunakan teknik analisis IPA (*Importence-Performance Analysis*), dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Tingkat Kesesuaian Model Eksperimen (*Performance*) terhadap Model Kontrol (*Importance*)

Untuk mengetahui tingkat kesesuaian model komunikasi penyediaan prasarana perdesaan non keagamaan (*model eksperimen*) terhadap model komunikasi penyediaan sarana prasarana keagamaan, maka dihitung dengan rumus: $Tk = X_A/X_B \times 100\%$ (Ruslan, 2003:217). Hasil perhitungan tingkat kesesuaian model tertera pada tabel IV.9, di mana kolom A menunjukkan skor model eksperimen (*performance*) dan kolom B menunjukkan skor model kontrol (*importance*), dan Tk adalah tingkat kesesuaian (%).

2. Uji Beda Model Kontrol (*Importance*) dengan Model Eksperimen (*Performance*)

Untuk membuktikan apakah model komunikasi penyediaan sarana prasarana keagamaan dapat diadopsi sebagai pengembangan model komunikasi penyediaan prasarana perdesaan non keagamaan, dan hasil perhitungan pada tabel IV.9 dapat dipergunakan untuk menentukan prioritas model lebih lanjut, maka dilakukan uji beda antara Model Kontrol dengan Model Eksperimen dengan teknik statistik '*Paired Sample T-Test*'. Analisis dilakukan terhadap 27 komponen model (N=27) sebagaimana tabel IV.9, dengan tingkat signifikansi (α) 5% dan df (N-1=26), maka nilai t (t -tabel) = 1,690. Sesuai perhitungan SPSS release 11.5, dihasilkan nilai t = 4,889 dengan $p=0,000$.

Oleh karena $t(4,889) > t(1,690)$ dan $p(0,000) < 0,005$, maka dapat dikatakan bahwa model komunikasi penyediaan sarana prasarana keagamaan (*model kontrol*) berbeda secara signifikan terhadap model komunikasi penyediaan prasarana perdesaan non keagamaan (*model eksperimen*). Dengan demikian

perumusan konsep pengembangan model berdasarkan hasil perhitungan analisis IPA pada tabel IV.9 dapat diteruskan.

3. Penentuan Prioritas Model

Selain didasarkan pada hasil perhitungan tingkat kesesuaian model, maka penentuan prioritas model dilakukan dengan cara memetakan posisi kuadran tiap-tiap komponen model pada diagram kartesius, dengan ketentuan:

- **Kuadran I** (*Prioritas Utama*), artinya pada komunikasi penyediaan sarana prasarana keagamaan termasuk komponen penting, namun kenyataan penerapan komponen tersebut pada komunikasi penyediaan prasarana perdesaan non keagamaan rendah, sehingga perlu menjadi prioritas utama.
- **Kuadran II** (*Pertahankan*), artinya pada komunikasi penyediaan sarana prasarana keagamaan termasuk komponen penting, dan kenyataan penerapan komponen tersebut pada penyediaan prasarana perdesaan non keagamaan tinggi, sehingga perlu dipertahankan.
- **Kuadran III** (*Prioritas Rendah*), artinya pada komunikasi penyediaan sarana prasarana keagamaan termasuk komponen yang tidak penting, dan kenyataan penerapan komponen tersebut pada komunikasi penyediaan prasarana perdesaan non keagamaan juga rendah, sehingga bukan termasuk prioritas yang utama (prioritas rendah).
- **Kuadran IV** (*Berlebihan*), artinya pada komunikasi penyediaan sarana prasarana keagamaan termasuk komponen yang tidak penting, dan kenyataan penerapan komponen tersebut pada komunikasi penyediaan prasarana perdesaan non keagamaan termasuk tinggi, sehingga dianggap berlebihan.

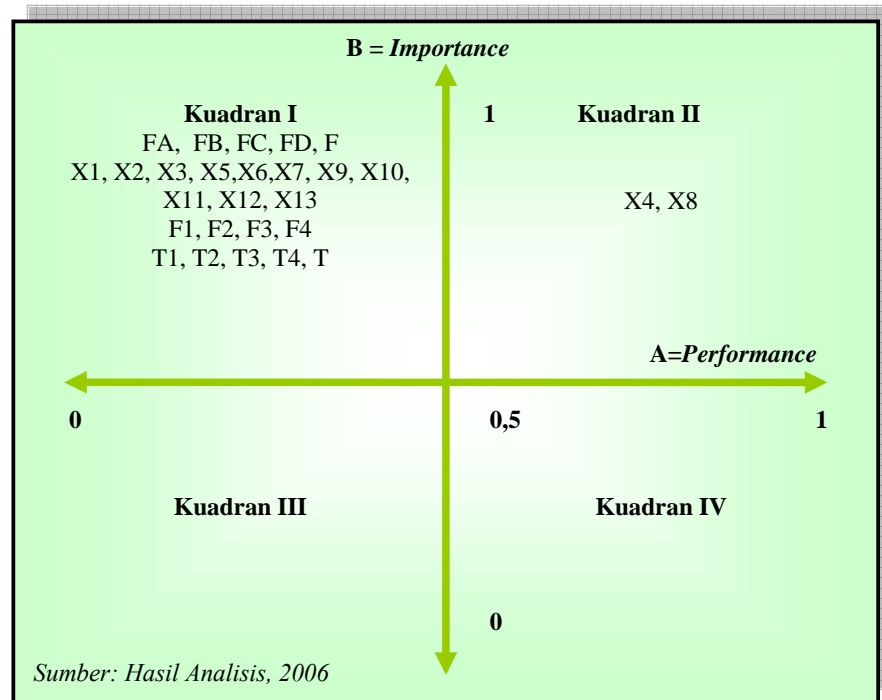
TABEL IV.9
HASIL PERHITUNGAN ANALISIS IPA

Forum Komunikasi		Kode	Morodemak					Purwosari				
			A		B		Tk	A		B		Tk
			Skor	Bobot	Skor	Bobot		Skor	Bobot	Skor	Bobot	
Tahap Komunikasi	A. Perencanaan	FA	2893	0,47	5609	0,91	51,58%	2608	0,50	4716	0,91	55,30%
	1. Inisiasi rencana	X1	638	0,41	1386	0,90	46,03%	571	0,44	1167	0,90	48,93%
	2. Pembahasan Program & Jadwal	X2	674	0,44	1401	0,91	48,11%	601	0,46	1178	0,91	51,02%
	3. Pembahasan RAB	X3	646	0,42	1331	0,86	48,53%	595	0,46	1120	0,86	53,13%
	4. Diseminasi program	X4	935	0,61	1491	0,97	62,71%	841	0,65	1251	0,96	67,23%
	B. Pengorganisasian	FB	1857	0,40	3666	0,79	50,65%	1673	0,43	3089	0,79	54,16%
	1. Pembentukan Panitia	X5	615	0,40	1353	0,88	45,45%	557	0,43	1132	0,87	49,20%
	2. Penunjukan pelaksana	X6	556	0,36	883	0,57	62,97%	500	0,38	764	0,59	65,45%
	3. Pembahasan jenis & cara partisipasi	X7	686	0,45	1430	0,93	47,97%	616	0,47	1193	0,92	51,63%
	C. Penggerakan	FC	2176	0,47	3740	0,81	58,18%	1952	0,50	3100	0,79	62,97%
	1. Penggerakan gotong-royong	X8	926	0,60	1361	0,88	68,04%	841	0,65	1142	0,88	73,64%
	2. Penghimpunan dana	X9	685	0,44	1484	0,96	46,16%	604	0,46	1181	0,91	51,14%
	3. Penyediaan alat/ material	X10	565	0,37	895	0,58	63,13%	507	0,39	777	0,60	65,25%
	D. Pengawasan	FD	1696	0,37	4392	0,95	38,62%	1542	0,40	3676	0,94	41,95%
	1. Laporan keuangan	X11	556	0,36	1479	0,96	37,59%	509	0,39	1239	0,95	41,08%
	2. Laporan progres fisik	X12	567	0,37	1467	0,95	38,65%	510	0,39	1227	0,94	41,56%
	3. Laporan evaluasi kerja	X13	573	0,37	1446	0,94	39,63%	523	0,40	1210	0,93	43,22%
Total		F	8622	0,43	17407	0,87	49,53%	7775	0,46	14581	0,86	53,32%
Prinsip	1. Keikutsertaan	F1	2458	0,49	4276	0,85	57,48%	2222	0,53	3574	0,85	62,17%
	2. Keterbukaan	F2	1966	0,39	4416	0,88	44,52%	1788	0,42	3706	0,88	48,25%
	3. Rutinitas	F3	2086	0,42	4313	0,86	48,37%	1856	0,44	3607	0,85	51,46%
	4. Kohesivitas	F4	2112	0,42	4402	0,88	47,98%	1909	0,45	3694	0,87	51,68%

Teknik Komunikasi		Kode	Morodemak					Purwosari				
			A		B		Tk	A		B		Tk
			Skor	Bobot	Skor	Bobot		Skor	Bobot	Skor	Bobot	
1	Teknik Dua Tahap	T1	574	0,37	1457	0,95	39,40%	533	0,41	1226	0,94	43,47%
2	Teknik Persuasif	T2	719	0,37	1789	0,93	40,19%	658	0,40	1501	0,92	43,84%
3	Teknik Dialogis/Dua Arah	T3	596	0,39	1445	0,94	41,25%	521	0,40	1216	0,94	42,85%
4	Teknik Deliberatif	T4	1091	0,47	2182	0,94	50,00%	980	0,50	1817	0,93	53,94%
Total		T	2980	0,41	6873	0,94	43,36%	2692	0,44	5760	0,93	46,74%

Sumber: Hasil Analisis, 2006

Apabila hasil pembobotan pada tabel IV.9, dituangkan dalam diagram kartesius, maka terlihat adanya kecenderungan yang sama posisi kuadran masing-masing komponen model baik untuk Desa Morodemak maupun Desa Purwosari (gambar 4.23).



GAMBAR 4.23
DIAGRAM KARTESIUS PRIORITAS MODEL

4. Temuan Studi

- Hasil uji beda model kontrol terhadap model eksperimen dengan teknik analisis *Paired Sample T-Test*, nilai $t_h(4,889) > t_t(1,690)$ dan $p(0,000) < 0,005$ dengan tingkat hubungan yang sangat kuat $\{r = 0,993 \text{ dan } p(0,000) > 0,005\}$, sehingga terbukti seluruh komponen model kontrol dapat diadopsi sebagai pengembangan model eksperimen.

- Berdasarkan diagram kartesius prioritas model, maka:
 - a. Sebagian besar kegiatan komunikasi pada tahap perencanaan, pengorganisasian, pergerakan maupun pengawasan pada model kontrol termasuk komponen kegiatan yang penting, namun kenyataan penerapan kegiatan tersebut pada model eksperimen rendah (*FA, FB, FC, FD berada pada kuadran I*), sehingga dalam pengembangan model komunikasi penyediaan prasarana perdesaan non keagamaan perlu menjadi prioritas utama.
 - b. Prinsip keikutsertaan, keterbukaan, rutinitas dan kohesivitas pada model kontrol termasuk komponen yang penting, namun kenyataan penerapan komponen tersebut pada model eksperimen rendah (*F1, F2, F3, F4 berada pada kuadran I*), sehingga dalam pengembangan model komunikasi penyediaan prasarana perdesaan non keagamaan perlu menjadi prioritas utama.
 - c. Terdapat dua komponen kegiatan komunikasi yang dalam model kontrol termasuk penting dan kenyataan penerapan komponen kegiatan termasuk tinggi, yaitu diseminasi program dan pergerakan swadaya gotong-royong, sehingga dalam pengembangan model komunikasi penyediaan prasarana perdesaan non keagamaan perlu dipertahankan (*X4 dan X8 berada pada kuadran II*), sedang kegiatan inisiasi, pemrograman, penganggran, pembentukan panitia pembangunan, penunjukan pelaksana kegiatan, pembahasan jenis dan cara berpartisipasi, penggalangan dana, penyediaan alat/material, laporan

keuangan, progres fisik dan evaluasi kegiatan masih perlu menjadi prioritas utama (*X1, X2, X3, X5, X6, X7, X9, X10, X11, X12, dan X13 berada pada kuadran I*).

- d. Teknik komunikasi dua tahap, persuasif, dialogis dan deliberatif pada model kontrol termasuk komponen penting, namun kenyataan penerapan komponen teknik komunikasi tersebut pada model eksperimen rendah (T1, T2, T3, T4 berada pada kuadran I), sehingga perlu menjadi prioritas utama.
- Berdasarkan perhitungan tingkat kesesuaian model (Tk), terdapat beberapa temuan:
 - a. Kegiatan komunikasi pada tahap pengawasan memiliki tingkat kesesuaian yang paling rendah dibanding yang lain, disusul kemudian tahap pengorganisasian, tahap perencanaan, berikut tahap pergerakan. Pada tahap perencanaan, urutan kegiatan komunikasi dari tingkat kesesuaian yang paling rendah adalah inisiasi, penetapan program dan jadwal kegiatan, penetapan rencana anggaran dan belanja kegiatan, berikut yang masih perlu dipertahankan kinerjanya adalah diseminasi program. Pada tahap pengorganisasian, urutan kegiatan komunikasi dari tingkat kesesuaian yang paling rendah adalah pembentukan panitia pembangunan, pembahasan jenis dan cara penggalangan partisipasi, berikut penunjukan pelaksana kegiatan. Pada tahap perencanaan, urutan kegiatan komunikasi dari tingkat kesesuaian yang paling rendah adalah inisiasi, penetapan program dan jadwal

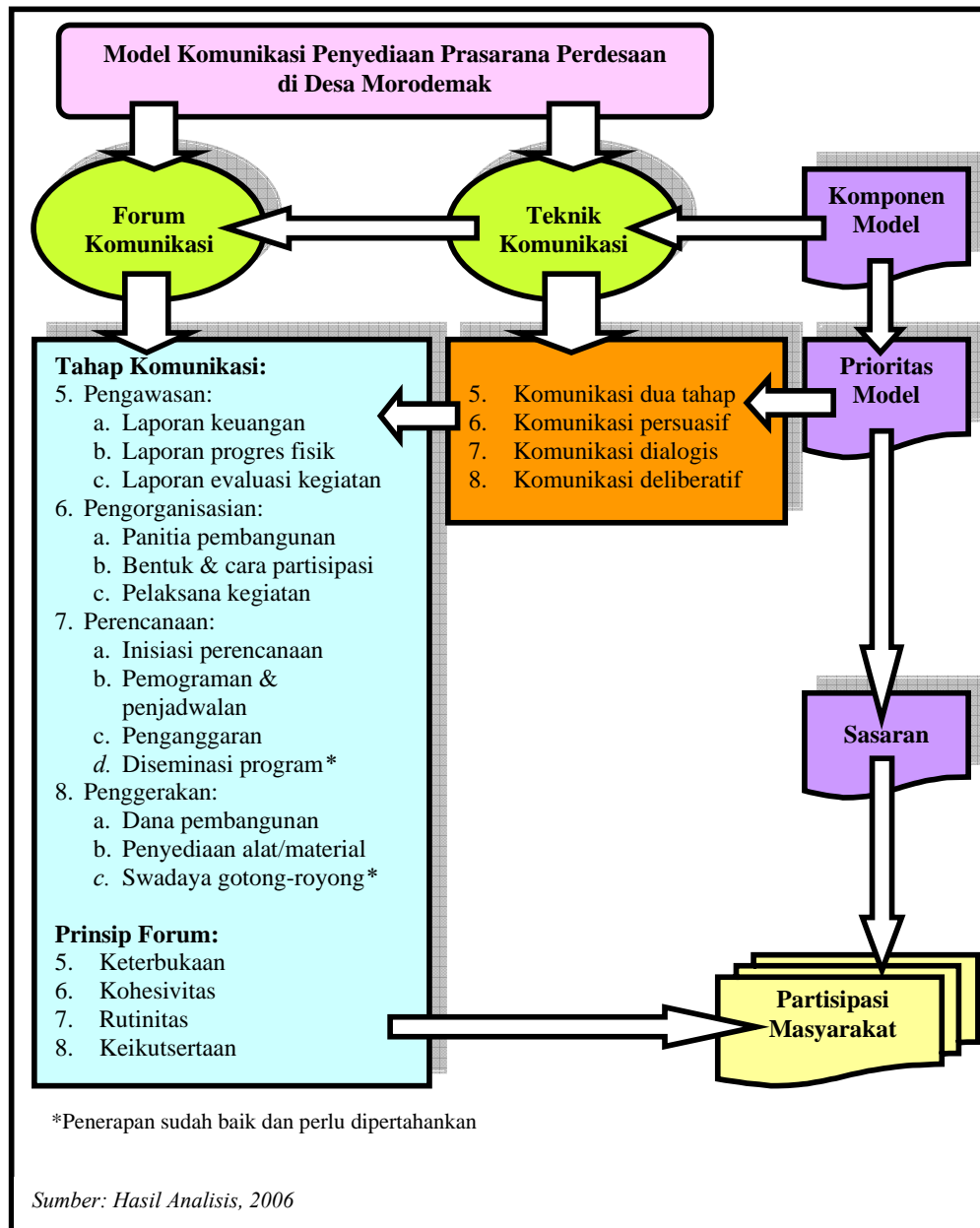
kegiatan, penetapan rencana anggaran dan belanja kegiatan, berikut yang masih perlu dipertahankan kinerjanya adalah diseminasi program. Pada tahap penggerakan, urutan kegiatan komunikasi dari tingkat kesesuaian yang paling rendah adalah penggalangan dana, penyediaan alat/material, berikut penggerakan swadaya gotong-royong. Pada tahap perencanaan, urutan kegiatan komunikasi dari tingkat kesesuaian yang paling rendah adalah inisiasi, penetapan program dan jadwal kegiatan, penetapan rencana anggaran dan belanja kegiatan, berikut yang masih perlu dipertahankan kinerjanya adalah diseminasi program. Pada tahap pengawasan, urutan kegiatan komunikasi dari tingkat kesesuaian yang paling rendah adalah laporan keuangan, laporan progres fisik, berikut evaluasi kegiatan.

b. Tingkat kesesuaian prinsip forum komunikasi:

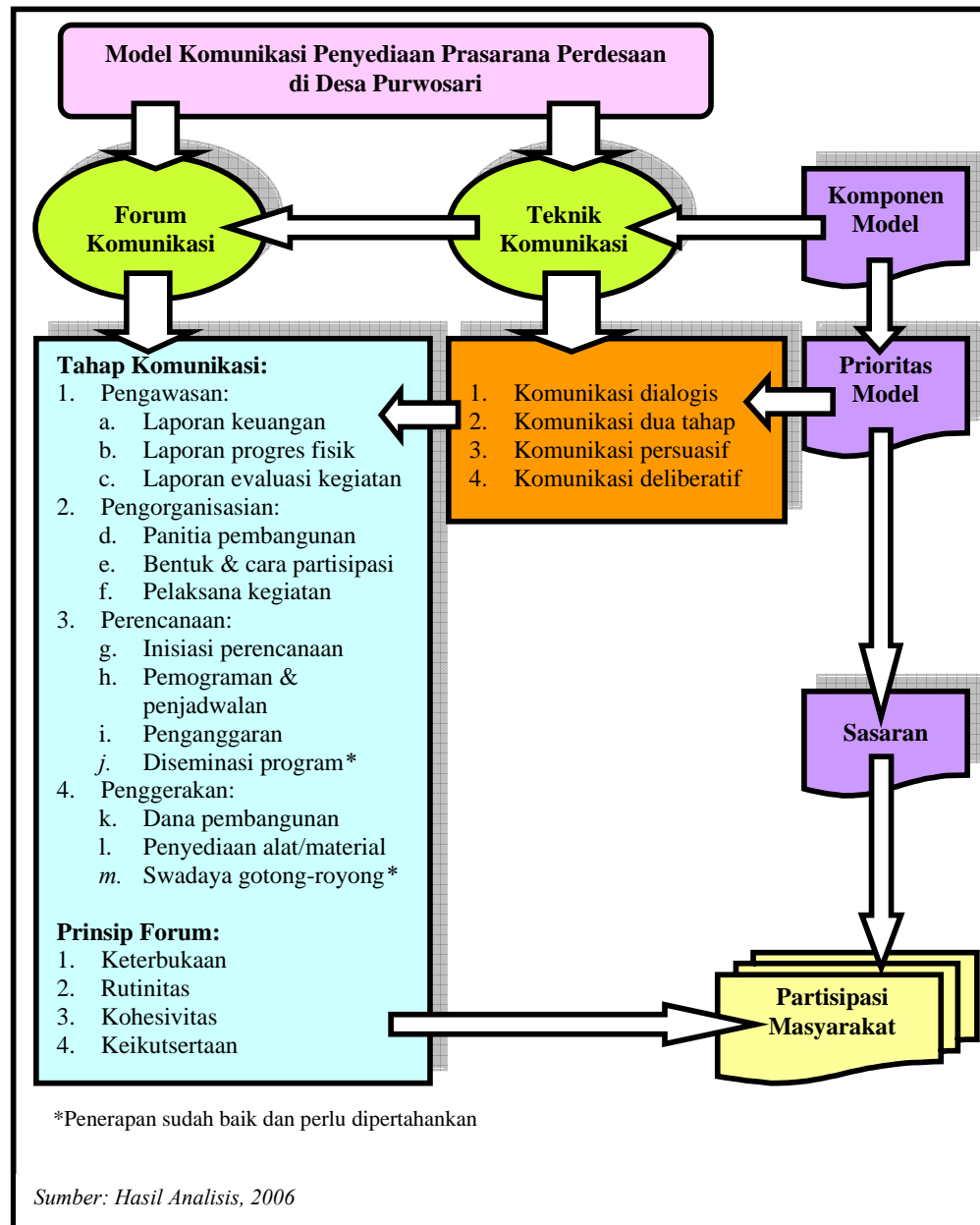
- 1) Desa Morodemak: prinsip keterbukaan memiliki tingkat kesesuaian paling rendah, disusul kemudian prinsip kohesivitas, rutinitas, berikut keikutsertaan.
- 2) Desa Purwosari: prinsip keterbukaan memiliki tingkat kesesuaian paling rendah, disusul kemudian prinsip rutinitas, kohesivitas dan keikutsertaan.

c. Tingkat kesesuaian teknik komunikasi:

- 1) Desa Morodemak: teknik komunikasi dua tahap memiliki tingkat kesesuaian paling rendah, disusul kemudian teknik persuasif, dialogis, berikut deliberatif.



GAMBAR 4.24
MODEL KOMUNIKASI PENYEDIAAN PRASARANA PERDESAAN
NON KEAGAMAAN DI DESA MORODEMAK



GAMBAR 4.25
MODEL KOMUNIKASI PENYEDIAAN PRASARANA PERDESAAN
NON KEAGAMAAN DI DESA PURWOSARI

- 2) Desa Purwosari: teknik komunikasi dialogis memiliki tingkat kesesuaian paling rendah, disusul kemudian teknik dua tahap, persuasif, berikut deliberatif.

4.5 Perumusan Model Komunikasi Pembangunan dalam Penyediaan Prasarana Perdesaan Non Keagamaan

Perumusan model komunikasi pembangunan dalam penyediaan prasarana perdesaan non keagamaan dilakukan dengan cara mengevaluasi, menyempurnakan model hipotetik atas dasar temuan-temuan studi yang telah teridentifikasi sebelumnya

Adapun rumusan model komunikasi pembangunan dalam penyediaan prasarana perdesaan non keagamaan adalah sebagaimana gambar 4.24 dan gambar 4.25 di atas, dengan ketentuan:

- 1) Model pada gambar 4.24 untuk masyarakat dengan ciri: aksesibilitas dan mobilitas penduduk rendah (relatif terisolir), sebagian besar penduduk bekerja pada sektor primer, ketergantungan terhadap tokoh informal terutama tokoh agama sangat tinggi, kegiatan organisasi kemasyarakatan seringkali terpadu dalam kegiatan keagamaan.
- 2) Model pada gambar 4.25 untuk masyarakat dengan ciri: aksesibilitas dan mobilitas penduduk relatif lebih tinggi karena adanya pengaruh kota, adanya aktivitas sektor kota (buruh industri, angkutan, dll) selain sektor primer, meskipun ketergantungan terhadap tokoh informal tinggi namun tidak mengurangi sikap kritis penganutnya, masih terlihat adanya perbedaan antara kegiatan organisasi keagamaan dengan organisasi-organisasi yang lain.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pada bab terakhir dari tesis yang berjudul "Model Komunikasi Pembangunan dalam Penyediaan Prasarana Perdesaan di Kawasan Pesisir Utara Jawa Tengah" ini disusun beberapa kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

5.1 Kesimpulan

2. Hasil ujiterap membuktikan bahwa seluruh komponen maupun struktur model hipotetik terbukti dapat diterapkan secara signifikan pada model komunikasi penyediaan prasarana perdesaan non keagamaan sebagai *model eksperimen* dan model komunikasi penyediaan sarana prasarana keagamaan sebagai *model kontrol* (lihat tabel IV.7 hal.137, dan tabel IV.8 hal.144).
3. Hasil uji beda model kontrol dengan model eksperimen terbukti berbeda secara signifikan dengan tingkat hubungan yang sangat kuat, sehingga dapat disimpulkan bahwa model komunikasi penyediaan sarana prasarana keagamaan dapat diadopsi sebagai pengembangan model model komunikasi penyediaan prasarana perdesaan non keagamaan (lihat hal. 148).
4. Sebagian besar kegiatan komunikasi pada semua tahapan yang dilakukan oleh pemerintah dalam komunikasi penyediaan prasarana perdesaan non keagamaan masih menjadi prioritas utama pengembangan model, sebab komponen-komponen kegiatan tersebut pada model kontrol termasuk penting, namun kenyataan penerapannya pada model eksperimen rendah. Hanya dua kegiatan yang kinerjanya sudah relatif baik, yaitu sosialisasi (*diseminasi*) dan penggerakan swadaya gotong-royong (Gambar 4.23, hal.151).

Kebiasaan Lurah Desa dan Ketua RT/RW melakukan sosialisasi kegiatan dan penggerakan swadaya gotong-royong melalui forum-forum publik (pengajian umum, jamiyah, pertemuan RT/RW) adalah kebiasaan yang patut dipertahankan (tabel IV.2, hal. 93). Namun demikian kegiatan ini masih bersifat informatif, sehingga apabila masyarakat tidak diikuti sejak proses pengambilan keputusan pada tahap perencanaan hingga tahap pengawasan, maka kegiatan tersebut tidak cukup efektif menggerakkan partisipasi masyarakat (gambar 4.10, hal.103).

5. Rendahnya penerapan prinsip-prinsip keikutsertaan, keterbukaan, rutinitas dan kohesivitas forum dalam kegiatan komunikasi penyediaan prasarana perdesaan non keagamaan (gambar 4.23, hal. 151) memberi bukti bahwa pola komunikasi penyediaan prasarana perdesaan non keagamaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah belum memberi peluang akses informasi dan komunikasi yang lebih besar bagi setiap elemen masyarakat. Forum-forum komunikasi seperti Musrenbang dan rapat desa yang mendapat legalisasi secara perundangan sebagai wahana interaksi dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam implementasinya belum cukup bukti memberi ruang partisipasi (*public sphere*) bagi keikutsertaan masyarakat, forum-forum tersebut masih bersifat elitis yang hanya terjangkau oleh lembaga-lembaga representasi, seperti Pemerintah Desa, BPD, LKMD, RT/RW (tabel IV.2, hal. 93). Sementara itu dalam komunikasi penyediaan sarana prasarana keagamaan, institusi-institusi lokal keagamaan (forum jamaah, jamiyah/majlis taklim, pengajian umum) dan forum pertemuan

RT/RW telah terbukti menjadi ajang pertemuan yang utama bagi elemen masyarakat dalam membahas berbagai persoalan yang terkait dengan sarana prasarana keagamaan. Sebagai forum yang sangat akrab dan menyatu dengan aktivitas keseharian masyarakat (*community friendly*), maka institusi-institusi lokal tersebut terbukti lebih fleksibel terhadap penerapan prinsip-prinsip keikutsertaan, keterbukaan, rutinitas dan kohesivitas (gambar 4.19 – 4.22, hal. 132-135).

6. Rendahnya penerapan teknik komunikasi dua tahap, persuasif, dialogis dan deliberatif (gambar 4.23, hal. 151) secara simultan memberi bukti rendahnya intensitas kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga teknik-teknik komunikasi tersebut yang sebenarnya sangat sesuai dengan karakteristik masyarakat perdesaan praktis tidak dilakukan, atau sudah dilakukan tetapi tidak menyerpa masyarakat bawah yang menjadi target partisipasi.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka direkomendasikan kepada pemerintah, terutama Pemerintah Daerah di Kawasan Pesisir Utara Jawa Tengah beberapa hal sebagai berikut:

b. Umum:

- Merekomendasikan desain model sebagaimana gambar 4.24 dan gambar 4.25 (halaman 155 dan 156) sebagai model komunikasi pembangunan dalam penyediaan prasarana perdesaan di kawasan Pesisir Utara Jawa

Tengah, masing-masing untuk masyarakat perdesaan yang bercirikan desa-desa dan desa-kota.

- Merekomendasikan pola komunikasi penyediaan prasarana perdesaan bertumpu pada sumberdaya lokal (gambar 4.14, hal. 122), sebagai pengembangan pola komunikasi penyediaan prasarana perdesaan yang sudah ada, karena pola komunikasi tersebut lebih memberikan peluang keikutsertaan bagi publik (*public sphere*) sejak tahap perencanaan, pengorganisasian, penggerakan hingga pengawasan.
- Oleh karena forum-forum lokal (jamaah sholat, jamiyah/majlis taklim, pengajian umum, pertemuan RT/RW, dll) lebih terbuka dan secara intensif telah menjadi ajang interaksi antar sesama warga, maka forum-forum tersebut dapat dijadikan sebagai media komunikasi penyediaan prasarana perdesaan. Penyebaran informasi pembangunan melalui pertemuan tatap muka (*face to face*) perlu didukung dengan media papan pengumuman yang mudah diakses oleh warga.
- Dalam kegiatan penyuluhan/komunikasi pembangunan penyediaan prasarana perdesaan di kawasan Pesisir Utara Jawa Tengah hendaknya:
 - 1) Memberi peran yang lebih besar bagi tokoh-tokoh informal lokal, terutama pemuka agama sebagai mediator dan komunikator di tingkat lokal;
 - 2) Pesan-pesan pembangunan yang disebarkan oleh para penyuluh hendaknya menjelaskan sisi manfaat suatu program, akibat apabila suatu

program tidak dilaksanakan, dan menunjukkan dalil-dalil penguat agar menambah keyakinan masyarakat;

- 3) Mengutamakan umpan balik (*feedback*) dari kelompok sasaran dengan teknik komunikasi dialogis;
 - 4) Mengutamakan sistem permusyawaratan dalam kegiatan komunikasi yang berhubungan dengan kebijakan/keputusan publik.
- Proyek-proyek pemerintah skala desa dari dana di luar DPD/K (APBD, APBN, dsb.) sebaiknya dilaksanakan oleh masyarakat desa, selain untuk memberi proses pembelajaran bagi masyarakat, memberdayakan potensi dan institusi lokal, juga dapat menghilangkan stagnasi komunikasi yang selama ini terjadi akibat proyek-proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga (kontraktor).

c. Khusus:

- Pengawasan dalam rangka akuntabilitas publik hendaknya tahapan komunikasi yang paling menjadi prioritas dalam proses penyediaan prasarana perdesaan, baik yang berkenaan dengan pemanfaatan anggaran (akuntabilitas keuangan), perkembangan kegiatan (akuntabilitas manfaat), maupun evaluasi kegiatan (akuntabilitas prosedural).
- Bagi masyarakat desa kota di kawasan Pesisir Utara Jawa Tengah, sesuai karakteristik masyarakatnya yang kritis maka penerapan teknik komunikasi dialogis dianggap paling efektif
- Bagi masyarakat desa desa di kawasan Pesisir Utara Jawa Tengah, sesuai karakteristik masyarakatnya yang sangat paternalistik, penerapan teknik

komunikasi dua tahap dianggap paling efektif, yaitu memerankan tokoh-tokoh informal di desa sebagai mediator dan komunikator di tingkat lokal.

5.3 Studi Lanjut

Peneliti menyadari sepenuhnya, bahwa konsep pengembangan model komunikasi penyediaan prasarana perdesaan sebagai hasil akhir dari proses penelitian ini tidak mungkin menggambarkan keseluruhan fenomena komunikasi pembangunan yang sesungguhnya. Sebagaimana ditulis dalam ruang lingkup penelitian, bahwa penelitian ini terkait dengan kegiatan komunikasi yang dijalankan oleh pemerintah dalam penyediaan prasarana perdesaan non keagamaan, dan kegiatan komunikasi yang dijalankan oleh pengurus/panitia pembangunan lembaga-lembaga keagamaan dalam penyediaan sarana dan prasarana keagamaan, sehingga kegiatan komunikasi dalam penyediaan prasarana perdesaan non keagamaan yang tidak terkait langsung dengan kegiatan komunikasi pemerintah tidak terjangkau dalam penelitian ini.

Pada bagian akhir penelitian ini direkomendasikan studi lanjut tentang pengembangan model komunikasi pembangunan penyediaan prasarana perdesaan non keagamaan yang dilakukan oleh lembaga non pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akuntabilitas dan Good Governance*. 2000. Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
- Anggrahini, CH. Nina. 2003. *Kinerja LKMD dalam Pembangunan Prasarana Dasar Perkotaan di Kota Karanganyar*, Magister Teknik Pembangunan Kota, Universitas Diponegoro Semarang
- Beatley, T., et.al. 1994. *An Introduction to Coastal Zones Management*. Washington D.C.: Island Press.
- Brembeck and William S. Howell. 1976. *Persuasion: A Mean of Social Influence*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Brown, Marilyn A., 1977. *The Role of Diffusion Agencies in Innovation Adoption: A Behavioral Approach*, Ph.D. thesis, Michigan State University, University Microfilms International, Ann Arbor, Michigan.
- Cassata, Mary B., dan Molefi K. Asante. 1979. *Mass Communication. Principles and Practices*. New York:Macmillan..
- Charnley, Mitchell V. 1965. *Reporting*. New York: University of Minnesota..
- Daftar Rumah Tangga P4B 2005 Kabupaten Demak*. Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Demak, 2004
- Dahuri, Rokhmin, et. al. 2004. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Peisir dan Lautan secra Terpadu*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Demak Tahun 2005*. BPS Kabupaten Demak, 2005
- Demak dalam Angka Tahun 2004*. BPS Kabupaten Demak, 2004
- Diamond, Larry, Juan Linz dan Seymour Martin Lipset (eds.), 1990. *Politics in Developing Countries: Comparing Experiences with Democracy*. Boulder, Colorado: Lynne Rienner
- Effendy, Onong Uchjana. 2006. *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Effendy, Onong Uchyana. 1981. *Kepemimpinan dan Komunikasi*. Bandung: Alumni.

- Effendy, Onong Uchyana. 1993. *Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: Alumni.
- Emerson, E. 1982. *Pengantar Studi Ilmu administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung
- Gerungan, W.A. 1991. *Psikologi Sosial*. Bandung: Eresco.
- Gill, Michael E.M.C. 1982. *Pedoman Pembangunan Organisasi bagi Para Manajer Operasional*, Jakarta: Budiman Presendo
- Glasson, J. 1974. *An Introduction to Regional Planning*. London: Hutchinson Educational.
- Hadi, Sutrisno. 1983. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM.
- Havelock, R.G. 1973. *The Change Agent's Guide to Innovation in Education*. Englewood Cliffs, N.J.: Educational Tecnology Publications.
- Honcock, Alan. 1977. *Communications Planning for Development: An Operational Framework*. Seminar Communication Planning. Kuala Lumpur.
- Hoover, E.M. 1975. *Introduction to Regional Economics*. New York: Alfred A. Knopt.
- Jayadinata, Johara T. 1999. *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan, dan Wilayah*. Bandung: Penerbit ITB.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1997. Jakarta: Balai Pustaka
- Kecamatan Bonang dalam Angka Tahun 2004*. BPS Kabupaten Demak, 2004
- Kecamatan Sayung dalam Angka Tahun 2004*. BPS Kabupaten Demak, 2004
- Kertapati, Ton. 1981. *Bunga Rampai Azas-azas Penerangan dan Komunikasi*. Jakarta: Bina Aksara.
- Kodoatie, Robert J. 2005. *Pengantar Manajemen Infrastruktur*. Semarang: Pustaka Pelajar
- Korten, David C. 1984. *The Bureaucrats Can't Do it Alone, Development Forum*, Maret, 1984.

- Lionberger, H.F, & Gwin, P.H. 1982. *Communication Strategies*. Illinois: The Interstate Printers & Publishers, Inc.
- Mardikanto, Totok. 1987. *Komunikasi Pembangunan*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- McNair, Brian. 1998. *An Introduction to Political Communication*. Routledge.
- McQuail, Denis. 1994. *Mass Communication Theory, Third edition*. Sage Publications
- McQuail, Denis. 2002. *McQuail's Reader's in Mass Communication*. Sage Publications
- Muhadjir, Noeng. 2001. *Identifikasi Faktor-faktor Opinion Leader Inovatif bagi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Muhammad, Arni. 2005. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mulyana, Deddy. 2005. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, Zulkarimen. 2002. *Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori dan Penerapannya*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Nugroho, Iwan & Rochmin Dahuri. 2004. *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES
- Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 14 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa*. 2004. Demak: Pemerintah Kab.Demak
- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan*. 2004. Demak: Pemerintah Kabupaten Demak
- Pratikto, Riyono. 1987. *Berbagai Aspek Ilmu Komunikasi*. Bandung: Remadja Karya.
- Rakhmat, Jalaluddin. 1994. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rakhmat, Jalaluddin. 1995. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rekapitulasi Usulan RMT/KK Miskin Kabupaten Demak*. BPS Kabupaten Demak, 2006

- "Rencana Strategis Penanggulangan Kemiskinan Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah," <http://www.pu.go.id/Ditjen_mukim/htm-lampau/pk-kimpraswil.htm>
- Riduwan. 2004. *Metode & Teknik Menyusun Tesis*. Bandung: Alfabeta.
- Rogers, E.M. 1969. *Modernization Among Peasants*. New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc.
- Ruslan, Rosady. 2003. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sastropoetro, Santoso, R.A. 1988. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni.
- Siagian, Sondang P. 1984. *Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siswanto. 2006. *Pengantar Manajemen*. Bandung: Bumi Aksara.
- Soegiarto, A. 1976. *Pedoman Umum Pengelolaan Wilayah Pesisir*. Jakarta: Lembaga Oseanologi Nasional.
- Soehartono, Irawan. 2002. *Metode Penelitian Sosial, Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarto, Hetifah Sj. 2004. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Suprpto, Tommy. 2006. *Pengantar Teori Komunikasi*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Surat Edaran Bersama Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1354/M.PPN/03/2004-050/ 744/SJ, tanggal. 24 Maret 2004, tentang Pelaksanaan Forum Musrenbang dan Perencanaan Partisipatif.
- Susanto, Astrid S. 1977a. *Komunikasi dalam Teori dan Praktek I*. Bandung: Bina Cipta.

- Susanto, Astrid S. 1977b. *Komunikasi dalam Teori dan Praktek 2*. Bandung: Bina Cipta.
- Tarigan, Robinson. 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tjokrowinoto, Moeljarto. 1999. *Pembangunan: Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang *Penataan Ruang*.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang *Perumahan dan Permukiman*.
- Up Dating Kegiatan Industri Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Demak Tahun 2005*. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Demak, 2005
- "Voice, Akses, dan Kontrol Masyarakat," <http://www.ireyogya.org/sutoro/voice_dan_akses_masyarakat.pdf>
- Winardi. 1983. *Asas-asas Manajemen*. Bandung: Alumni.
- Yin, Robert K. 2002. *Studi Kasus (Desain dan Metode)*. Jakarta: Raja Grafindo.